

# MOZAIK

## PEMIKIRAN & KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM

Telaah Historis Kebijakan Ekonomi  
Sultan Alauddin Khalji

Oleh:

JOKO SUSILO  
MOHAMMAD RIDWAN



HALAMAN MOEKA



ACADEMICA  
MENCERAIKAN & MENGGEDUKAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 72  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana denda pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# MOZAIK

PEMIKIRAN & KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM

Telaah Historis Kebijakan Ekonomi Sultan Alauddin Khalji

Penulis:

**JOKO SUSILO & MOHAMMAD RIDWAN**

Editor:

**M. Ridwan**

Desain Isi & Sampul:

**Tim HalamanMoeka.net**

Jakarta, Oktober 2016

ISBN: 978-602-269-190-7

Diterbitkan atas kerja sama:

**Halaman Moeka Publishing**

Griya Taman Banjarwangi B6 No  
5. Banjarwangi, Ciawi, Bogor  
Jl. Manggis IV No.2 Rt. 07/04  
Tanjung Duren Selatan  
Grogol Petamburan, Jakarta  
Barat  
[www.halamanmoeka.net](http://www.halamanmoeka.net)

**ACADEMIKA  
SAMARINDA**



# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah SWT, karena rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya, shalawat dan salam semoga senantiasa mengalir kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat, serta orang yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

*Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa, karena berkat rahman dan rahim-Nya semata akhirnya usaha penyusunan buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini tidak akan selesai dan terwujud dalam bentuk dan isi sebagaimana mestinya, jika tidak ada bantuan dan jasa dari berbagai pihak dalam upaya penyusunannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada nara sumber dan rekan-rekan, atas segala arahan, waktu, ilmu sejak awal hingga akhir penulisan, termasuk juga motivasi yang diberikan kepada penulis untuk selalu berkarya, dan berfikir positif.

Mengenai tulisan ini penulis menyadari masih mengandung banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan, dan penyempurnaannya, serta semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis memohon ampun dan berserah diri.

**Penulis**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Telaah Pustaka	6
B. Profil Singkat Sultan Alauddin Khalji	10
C. Pendekatan Kajian	23
D. Pembahasan	27
BAB II RIWAYAT HIDUP SULTAN ALAUDDIN KHALJI	28
A. Sejarah Bangsa Khalji	28
B. Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi Awal Pemerintahan Alauddin	57
BAB III KEBIJAKAN SULTAN ALAUDDIN KHALJI	65
A. Kebijakan Politik Dalam Negeri	65
B. Kebijakan Militer	76
C. Kebijakan Ekonomi Sistem Pengendalian Harga	82
BAB IV DAMPAK KEBIJAKAN PENGENDALIAN HARGA TERHADAP EKONOMI SOSIAL POLITIK	93
A. Faktor Kesuksesan Kebijakan Pengendalian Harga	93
B. Dampak Positif Bagi Ekonomi Negara	97
C. Dampak Pada Peradaban Sosial	107

D. Dampak Pada Kekuatan Politik _____	109
BAB V KEBIJAKAN PENGEDALIAN HARGA SULTAN ALAUDDIN KHALJI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI _____	
A. Pembahasan Terhadap Alasan Penerapan Kebijakan Pengendalian Harga _____	113
BAB VI PENUTUP _____	
A. Kesimpulan _____	154
B. Saran _____	157
DAFTAR PUSTAKA _____	159
BIODATA PENULIS _____	167

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2007 yang lalu, rakyat Indonesia harus menghadapi naiknya harga minyak goreng, yang dipicu oleh kenaikan bahan bakunya yaitu kelapa sawit atau CPO (*Crude Palm Oil*) dunia yang mencapai Rp.12.000,- per kilogram. Kenaikan harga CPO tersebut terjadi karena tingginya permintaan kelapa sawit oleh Cina dan Amerika Serikat yang berniat melakukan konversi penggunaan bahan bakar minyak bumi menjadi minyak nabati yaitu biodiesel. Keadaan harga pasar dunia ini membuat perusahaan kelapa sawit Indonesia menaikkan harga produknya berupa minyak goreng, hal tersebut beralasan karena ada keuntungan di dalamnya, apalagi Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia selain Malaysia. Minyak goreng bagi penduduk Indonesia termasuk bahan pokok, yang mana akhirnya kenaikan harga barang tersebut dapat memicu naiknya kebutuhan bahan pokok yang lain.

Pada awal tahun 2010 yang lalu, juga terjadi kenaikan harga beras, gula dan sejumlah bahan pokok lain. Berkaitan dengan situasi kenaikan harga bahan pokok terutama beras awal tahun 2010 tersebut, Badan Pusat Statistik merilis 7 faktor yang dapat memicu antara lain pertama, karena pengaruh psikologis kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tahun

2010 sebesar 10 persen, sesuai dengan Inpres No 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan. Kedua, mundurnya masa tanam yang mengakibatkan mundurnya panen, sehingga masa paceklik menjadi lebih panjang. Ketiga, beras bersubsidi (rasdi) yang belum berjalan penuh atau optimal. Keempat, ekspektasi pedagang dengan gencarnya berita tentang kenaikan harga beras dunia. Kelima, spekulasi kenaikan harga pupuk yang diperkirakan akan diberlakukan mulai April 2010. Keenam, hambatan transportasi akibat gangguan cuaca. Ketujuh, stok petani, penggilingan dan pedagang relatif menipis.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan langkah menyelesaikan kenaikan harga bahan pokok, namun langkah instant dan insidental yang dilakukan pemerintah dianggap cenderung tidak efektif oleh sebagian pihak karena perubahan orientasi pembangunan dan konsistensi kebijakan ketahanan pangan masih setengah hati. Sebagai contoh dalam usaha impor beras membutuhkan kurun waktu tertentu dan dalam kurun waktu tersebut harga barang di pasar cenderung telah meroket dan semakin memberatkan konsumen,<sup>2</sup> padahal Wakil Presiden Budiono sendiri yang juga seorang ekonom mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan juga tergantung pada kemampuan pengendalian terhadap harga barang pokok.<sup>3</sup>

Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mencari format kebijakan yang efektif untuk menangani masalah pangan,

<sup>1</sup> “Harga Pangan Minyak Melambung”, dikutip dari <http://economy.okezone.com> accessed 1 Maret 2011.

<sup>2</sup> “Impor Beras Tidak Serta Merta Stabilkan Harga”, dikutip dari [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com) accessed 1 Maret 2011.

<sup>3</sup> [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) accessed 27 Juli 2010.

yang mana jika dibiarkan berlarut akan memicu naiknya harga barang lainnya dan berakhir pada inflasi. Hal ini tentulah menjadi tantangan tersendiri bagi siapapun untuk mencari solusi dengan menggali dari berbagai sumber salah satunya adalah sejarah, yang mana itu bercerita tentang kehidupan bangsa terdahulu dari sudut dunia manapun yang dapat dijadikan inspirasi. F. R. Ankersmith menyatakan bahwa untuk mengetahui kelakuan secara obyektif manusia masa lampau (*cognition historica*) maka gunakan sejarah, sehingga sejarah hakikatnya berfungsi sebagai guru mengenai kehidupan (*historia magistra vitae*). Oleh karena itu dengan mengembangkan peristiwa masa silam, kita dapat menimba ajaran praktis, dan pada gilirannya sejarah bermakna sebagai pedoman bagi masa kini dan masa yang akan datang, dan berfungsi memperkokoh identitas kelompok dan memperkuat solidaritas, serta sekaligus berfungsi sebagai pelajaran yang harus dipetik oleh bangsa kita dewasa ini.<sup>4</sup>

Sultan Alauddin Khalji (1296-1316 M), seorang pemimpin India Abad XIII dari kesultanan Khalji yang menguasai dan mengendalikan secara luas daerah-daerah Pusat dan Selatan India.<sup>5</sup> Pemerintahannya hanya berjalan dua puluh tahun, namun ia memiliki ambisi besar untuk menjadi penguasa seperti Alexander Agung II.<sup>6</sup> Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut ia berfikir keras membangun pasukan yang hebat, padahal di

---

<sup>4</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Kajian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 4.

<sup>5</sup> Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 200.

<sup>6</sup> H. G. Keene, *History of India*, (Edinburgh: John Grant, 1906), I: 56.

awal pemerintahannya kondisi negara dipenuhi dengan budaya korupsi, serta menghamburkan uang untuk pesta minuman keras dan wanita di antara para pejabatnya.<sup>7</sup> Kondisi ekonomi di awal pemerintahan Sultan Alauddin menghadapi masa kritis karena harga barang pokok sangat tinggi dan langka disebabkan aksi penimbunan oleh para pedagang, perampokan merajalela sehingga perekonomian menjadi tidak berkembang, administrasi negara yang mengatur keadaan pasar berjalan tidak efektif, dan petugas negara di daerah yang bertugas dalam masalah pertanian cenderung mengeksploitasi petani serta tidak jujur.<sup>8</sup> Kondisi keamanan dalam negeri juga dipenuhi dengan pemberontakan, dan dari luar negeri ada serangan bangsa Mongol yang tidak diketahui kapan dan seberapa besar kekuatannya.<sup>9</sup> Namun keadaan ini dapat ia selesaikan dengan sukses, kunci dari keberhasilan Sultan Alauddin adalah ia melakukan perbaikan ekonomi yang dikenal dengan Sistem Pengendalian Harga (*Price Control System*), dan banyak sejarawan menilai kebijakan ekonominya ini berhasil.<sup>10</sup>

Sejarawan Barani<sup>11</sup> menilai keberhasilan Sultan Alauddin

---

<sup>7</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life and Works of Sultan Alauddin Khalji*, (New Delhi: Atlantic Publishers & Distributor, 1992), hal. 94.

<sup>8</sup> *ibid.*, hal. 45-70.

<sup>9</sup> J. C. PowellPric, *A History of India*, (Toronto: Thomas Nelson & Sons, 1955), hal. 140.

<sup>10</sup> K. Ali, *History of India, Pakistan, and Bangladesh*, (Dhaka: Ali Publication, 1980), hal. 83.

<sup>11</sup> Barani bernama asli Dhiya'uddin Barani (1285-1357 M) seorang teoretisi Islam pertama abad XIII dan sejarawan pengarang *Tarikh-e Firuz Shahi* sebuah buku berisi sejarah kepemimpinan di

di bidang ekonomi ternyata diikuti oleh keberhasilan lainnya di bidang politik, sosial, dan keamanan. Ia mengungkapkan “*during the reign, either through his agency or the beneficent rulling of providence, there were several remarkable events and matters which had never been witnessed or heard of in any age or time, and probably never will again*”.<sup>12</sup> Ungkapan tersebut seharusnya menjadi pertanyaan besar bagi siapapun untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh Sultan Alauddin, lebih lanjut ia mengatakan bahwa ada sepuluh keberhasilan yang mampu dicapai pada masa Sultan Alauddin yaitu: pertama, gandum (biji-bijian untuk konsumsi), pakaian, dan kebutuhan hidup yang lain menjadi sangat murah. Kedua, kemenangan demi kemenangan (penaklukan) terjadi terus menerus. Ketiga, penghancuran dan penundukkan atas serangan bangsa Mongol dapat diwujudkan. Keempat, pemeliharaan atas jumlah pasukan yang besar dapat dilakukan dengan biaya yang rendah. Kelima, pemberontakan dapat ditekan dan dihukum dengan keras, serta terciptanya ketundukkan pada pemerintah terjadi secara umum. Keenam, jalan atau jalur lalu lintas dari segala arah menjadi aman. Ketujuh, kebiasaan berbuat jujur tercipta di antara pelaku pasar. Kedelapan, pembangunan dan perbaikan sejumlah masjid, menara, benteng, serta danau buatan dapat terwujud. Kesembilan, pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir pemerintahan Alauddin, kebiasaan

---

India sekaligus nasehat bagi Sultan Firuz Syah Tughluq yang telah mengasingkan dirinya: Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, alih bahasa Abdullah Ali, Cet. 1 (Jakarta: Serambi, 2006), hal. 300.

<sup>12</sup> H. M. Elliot, *The History of India as Told by Its Own Historians*, (London: Turbner & Co, 1869), III: 206.

rakyatnya secara umum lebih cenderung untuk berbuat baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan sederhana. Kesepuluh, tanpa dukungan dari Sultan sekalipun banyak orang terdidik dan orang besar berkumpul di negaranya.<sup>13</sup>

Kemampuan Sultan Alauddin Khalji menyelesaikan permasalahan rakyatnya di atas sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena beberapa alasan. Pertama adalah karena belum adanya Kajian ilmiah yang secara spesifik mengkaji tokoh Sultan Alauddin, terutama dari sudut pandang kebijakan ekonominya. Kedua, apa latar belakang kebijakan itu dapat muncul?, terutama untuk mengetahui kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada masa Sultan Alauddin. Ketiga, bagaimana sistem pengendalian harga itu dijalankan?, sehingga sistem ini dikatakan mampu menciptakan kemajuan. Keempat, apa sebenarnya dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem pengendalian harga tersebut?. Kelima, bagaimana pandangan pemimpin negara muslim yang lain, serta bagaimana pandangan teori ekonomi modern terkait permasalahan tersebut?. Harapan dari itu semua adalah mengambil hikmah, yang mana kemudian dapat diterapkan pada kondisi saat ini walaupun memiliki persamaan dan perbedaan. Oleh sebab itu, pembahasan yang lebih dalam atas pertanyaan besar tersebut harus dijelaskan pada bab-bab berikutnya.

## A. TELAAH PUSTAKA

Sultan Alauddin Khalji adalah putra Yaghrish Khan, sedangkan Yaghrish Khan merupakan saudara dari Jalaluddin Khalji (Jalaluddin Feroze) seorang Sultan Pertama di dalam

<sup>13</sup> *Ibid.*, III: 206-207

kesultanan Khalji. Alauddin Khalji memiliki saudara kandung Ulugh Khan, yang mana kedua bersaudara ini kemudian dijadikan menantu oleh Jalaluddin Khalji sekaligus diberikan posisi penting dalam pemerintahan.<sup>14</sup> Menurut catatan Nizamuddin penulis *Tabqat-e-Akbari*, Jalaluddin Khalji merupakan cucu dari Qalij Khan, sedangkan Qalij Khan adalah salah satu menantu dari Chengis Khan. Qalij Khan menetap di negeri dataran tinggi Ghur dan Gurjistan setelah Khawarizm Shah<sup>15</sup> ditaklukkan oleh Chengis Khan.<sup>16</sup>

Ziauddin Barani (1285-1357 M) seorang teoritis Islam pertama abad XIII dan sejarawan pengarang *Tarikh-e Firuz Shahi* yang diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris oleh H. M. Elliot dengan judul *The History of India as Told by Its Own Historians*, mengungkapkan dalam karangannya tersebut bahwa Sultan Alauddin Khalji merupakan sosok pemimpin muslim yang berhasil membawa peradaban India pada kemajuan ekonomi yang tinggi, bahkan hasil pembangunan fisik tersebut dapat disaksikan hingga saat ini. Adapun kunci keberhasilan itu ada

---

<sup>14</sup> Sultan Jalaluddin memberikan Alauddin posisi sebagai *Amir-e-Tuzk* dan saudaranya Ulugh Khan diberikan posisi *Akhur-Beg*: Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 23.

<sup>15</sup> Kepemimpinan Khawarizm Shah dipegang oleh putranya Jalaluddin Ibn Khawarizm Shah, ia berhasil dikalahkan oleh Chengis Khan sehingga pasukan Chengis Khan berhasil menguasai Ghaznah. Sedangkan pasukan Jalaluddin Ibn Khawarizm Shah melarikan diri dan mengarungi laut menuju India. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620 H / 1223 M: M. Sayyid al-Wakil, *Wajah Dunia Islam; Dari Dinasti Bani Umayyah hingga Imperialisme Modern*, alih bahasa Fadhli Bahri, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), hal. 250.

<sup>16</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 15.

tujuh kebijakan antara lain: pematokan harga gandum atau bahan pokok lain (*fixing the price of grain*), mengawasi dan menjaga harga gandum tetap rendah (*to secure the cheapness of grain*) dengan menunjuk orang bijak, paling dipercaya, dan paling mampu mengemban tugas ini, mengisi gudang pangan milik negara dengan gandum dan bahan pokok lain (*accumulation of corn in the king's granaries*) dengan motif berjaga-jaga ketika kondisi produksi pangan rendah, mendirikan departemen khusus untuk mengangkut bahan pangan dari daerah ke gudang pangan atau dari gudang pangan ke daerah (*the caravans*), membatasi penyimpanan bahan pangan oleh individu dan pedagang untuk menjaga agar harga tetap murah (*regrating*), penegasan kepada wali (gubernur) di wilayah untuk bisa meningkatkan produksi pangan agar bisa mengisi gudang pangan (*engagements*), dan membuat badan intelejen dengan sistem pelaporan dari tiga sumber berbeda yang rutin memberikan laporan tentang kondisi dan praktek di pasar kepada Sultan Alauddin secara langsung (*reporting system*).<sup>17</sup>

Tulisan Barani memang merupakan sumber primer, namun tidak mengungkapkan dua hal penting yaitu bagaimana sebuah teori ekonomi menjelaskan kebijakan ekonomi tersebut?, dan tidak secara detail membandingkannya dengan pemimpin Islam lain yang menghadapi kondisi yang sama tetapi dengan kebijakan yang berbeda.

Ghulam Sarwar Khan Niazi dalam Kajian disertasi doktoralnya yang kemudian diterbitkan dengan judul *The Life and Works of Sultan Alauddin Khalji* banyak mengutip dari tulisan

<sup>17</sup> H. M. Elliot, *The History.*, III: 192-195.

sejarawan seperti *Tarikh-e-Firuz Shahi* karya Ziauddin Barani sendiri, *Gulshan-e-Ibrahimi* karya Muhammad Qasim Hindu Shah Firishta, *Afzal al-Fawa'id* dan *Khazain al-Futuh* karya Amir Khusrau yang ditulis pada tahun 711 H, *Fatuh as-Salatin* karya Isami yang ditulis pada tahun 1349 M di Daulatabad yaitu tiga puluh tahun setelah Sultan Alauddin wafat atau delapan tahun lebih awal dari karya Barani, *Malfoozat* karya Shah Nasiruddin Chiragh Dehlwi, dan *Siyar al-Aulia* karya Mir Khurd.<sup>18</sup> Buku ini memberikan gambaran kesultanan Khalji, dimulai dengan sejarah bangsa Khalji, proses pergantian kekuasaan di kesultanan Khalji dari Sultan Jalaluddin kepada Sultan Alauddin, kemudian kepemimpinan Sultan Alauddin Khalji serta kebijakan-kebijakannya (kebijakan sosial, administrasi negara, agama, dan ekonomi), dan diakhiri dengan keberhasilan yang dicapai selama pemerintahannya. Selain itu, buku ini menjelaskan pendapat penulisnya tentang kritik pendapat para sejarawan yang dinilainya salah menampilkan sosok Sultan Alauddin, seperti *Cambridge History of India* karya Sir W. Haig. Karya Ghulam Sarwar Khan Niazi ini sedikit lebih dalam ketika menjelaskan kebijakan ekonomi Sultan Alauddin dinilai dari sudut pandang fikih Islam, seperti *kharaj*, *jizyah*, dan termasuk batas besarnya nilai yang boleh diambil negara dari kedua pajak itu.<sup>19</sup> Ini merupakan salah satu sumber sekunder dalam Kajian ini, namun karya ini tidak menjelaskan lebih dalam bagaimana sebuah teori ekonomi menjelaskan kebijakan ekonomi tersebut.

Kajian oleh Ulya Fuhaidah pada program pascasarjana

---

<sup>18</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 1-8.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 56.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2006 dengan judul *Pemikiran Politik Alauddin Khalji di India* juga telah menjelaskan sosok Sultan Alauddin Khalji,<sup>20</sup> dimulai dengan sejarah masuknya Islam di India, pergantian kekuasaan pemimpin Islam di India hingga kesultanan Khalji, dan kebijakan politik Sultan Alauddin Khalji. Kajian ini masih memiliki keterbatasan yaitu tidak menjelaskan lebih dalam kebijakan ekonomi tokoh tersebut, ini dimaklumi karena fokus kajiannya hanya masalah politik.

Dengan memperhatikan beberapa Kajian di atas, maka sangat jelas bahwa ada beberapa hal yang belum dijelaskan yaitu teori ekonomi yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Harga, dan perbandingan dengan penerapan kebijakan ekonomi oleh pemimpin Islam lain yang menghadapi kondisi yang sama. Oleh karena itu, dalam Kajian ini mengambil fokus kajian pada dua hal yang belum dijelaskan tersebut sehingga jelas letak perbedaan Kajian ini dengan Kajian yang lain.

## B. PROFIL SINGKAT SULTAN ALAUDDIN KHALJI

Sultan Alauddin Khalji merupakan sultan kedua dalam kepemimpinan kesultanan Khalji, ia memimpin kesultanan tersebut antara tahun 1296-1316 M. Ia memiliki saudara kandung bernama Ulugh Khan, yang keduanya adalah putra dari Yaghrish Khan.<sup>21</sup> Kedua putra Yaghrish Khan tersebut kemudian dijadikan

---

<sup>20</sup> Ulya Fuhaidah, “*Pemikiran Politik Alauddin Khalji di India*”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006, hal. 30-110.

<sup>21</sup> Yaghrish Khan mungkin bernama asli Shahabuddin Khalji, ia memiliki putra bernama Alauddin Khalji. Shahabuddin Khalji sendiri adalah saudara Jalaluddin Khalji: Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 23.

menantu oleh Jalaluddin Khalji sekaligus diberikan posisi penting<sup>22</sup> di dalam pemerintahannya.<sup>23</sup> Jalaluddin Khalji sendiri adalah seorang sultan pertama kesultanan Khalji dan merupakan saudara Yaghrish Khan. Menurut catatan Nizamuddin penulis *Tabqat-e-Akbari*, Jalaluddin Khalji merupakan cucu dari Qalij Khan, sedangkan Qalij Khan adalah salah satu menantu dari Chengis Khan. Qalij Khan menetap di negeri dataran tinggi Ghur dan Gurjistan setelah Khawarizm Shah<sup>24</sup> ditaklukkan oleh Chengis Khan.<sup>25</sup>

Kondisi negara yang baru dipimpin Sultan Alauddin Khalji penuh dengan ancaman baik dari dalam maupun luar, yang mana sultan pertama belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sukses. Ia kemudian membuat kebijakan ekonomi *Price Control System* (Sistem Pengendalian Harga) untuk keluar dari permasalahan tersebut, sehingga ada empat alasan mendasar munculnya kebijakan ini yaitu: pertama, ia memiliki keinginan menciptakan dan memelihara pasukan yang besar dan kuat tidak saja untuk menghadapi serangan bangsa Mongol tetapi untuk mewujudkan keinginannya melebarkan sayap kekuasaannya.

---

<sup>22</sup> Sultan Jalaluddin memberikan Alauddin posisi sebagai *Amir-e-Tuzk* dan saudaranya Ulugh Khan diberikan posisi *Akhur-Beg*: *Ibid.*, hal. 24.

<sup>23</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal.137.

<sup>24</sup> Kepemimpinan Khawarizm Shah dipegang oleh putranya Jalaluddin Ibn Khawarizm Shah, ia berhasil dikalahkan oleh Chengis Khan sehingga pasukan Chengis Khan berhasil menguasai Ghaznah. Sedangkan pasukan Jalaluddin Ibn Khawarizm Shah melarikan diri dan mengarungi laut menuju India. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620 H / 1223 M: M. Sayyid al-Wakil, *Wajah Dunia Islam.*, hal. 250.

<sup>25</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 15.

Kedua, dalam menjalankan pembenahan kebijakannya ke dalam maupun ke luar melalui pembenahan administrasi maka ia membutuhkan dana besar, walaupun sebelumnya telah menaklukkan Deogir namun itu belum cukup. Ketiga, serangan bangsa Mongol yang telah memutuskan jalur perdagangan dari dan menuju ke wilayah kekuasaannya membuat barang menjadi langka dan membuat harga naik. Alasan keempat, masuknya uang yang banyak dari Deccan yang telah ditaklukkan Alauddin juga menyebabkan jatuhnya nilai mata uang dan akhirnya menaikkan harga kebutuhan harga bahan pokok.<sup>26</sup>

Kebijakan *Price Control System* (Sistem Pengendalian Harga) yang dijalankan Sultan Alauddin Khalji dinilai berhasil mencapai kemajuan tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi di bidang politik, sosial, dan keamanan.<sup>27</sup> Kebijakan itu berisi tujuh point antara lain: pertama, menetapkan harga barang kebutuhan pokok dan kebutuhan mendesak lainnya dalam harga yang sangat murah. Kedua, membentuk *Diwan-e-Riyasat* dan *Shahana-e-Mandi* yang bertugas menjaga, mengelola pasar, dan memberi tindakan terhadap pelaku ekonomi atas pelanggaran aturan. Ketiga, membangun lumbung gandum untuk menampung bahan kebutuhan pokok terutama gandum. Keempat, adalah membentuk petugas pengangkut. Kelima, melarang tindakan penimbunan dan kejahatan ekonomi lainnya. Keenam, memberikan penegasan kepada pejabat pemungut pajak dan asistennya di wilayah bagian untuk menjamin peningkatan jumlah gandum yang akan diangkut ke lumbung gandum milik

---

<sup>26</sup> K. Ali, *History of India.*, hal. 81.

<sup>27</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal. 206.

negara dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, selain itu Sultan juga memberikan perintah kepada pimpinan *diwan*, pengawas (inspektur), dan pejabat pemungut pajak yang lain untuk memungut pajak secara rutin sebelum para pengelola tanah membawa hasil panen gandum itu ke dalam rumah mereka. Ketujuh, membuat sistem pelaporan harian kepada Sultan dari tiga sumber berbeda, yang mana berisi keadaan harga pasar dan transaksi yang dilakukan pelaku pasar.<sup>28</sup>

### 1. Definisi Ekonomi

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno (*greek*), yang terdiri dari *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* yang artinya aturan, maka secara bahasa ekonomi berarti aturan rumah tangga. Akhirnya kata ekonomi kemudian digunakan untuk menunjuk kepada suatu istilah baik yang menyangkut kegiatan produksi, manajemen produksi, sirkulasi, konsumsi rumah tangga, bisnis dalam tingkat masyarakat, negara, dan dunia.<sup>29</sup>

Kajian ekonomi memunculkan dua pembahasan yaitu ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Ilmu ekonomi membahas masalah aspek produksi yang lebih banyak berkaitan dengan kegiatan untuk memperbanyak jumlah barang dan jasa, serta bagaimana cara menjaga pengadaannya (produksi). Sistem ekonomi membahas aspek distribusi kekayaan, yang mana sama sekali tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikit kekayaan,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>29</sup> Anatol Murad, *Economics Principles and Problems*, (Iowa: Littlefield Adams and Co, 1969), hal. 3.

tetapi hanya berhubungan dengan tata kerja (mekanisme) pendistribusiannya.<sup>30</sup> Dengan demikian sistem ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek pengaturan kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, terutama yang berkaitan dengan bagaimana mengatur mekanisme pendistribusian harta kekayaan bagi manusia.

## 2. Definisi Pasar dan Mekanisme Harga

Pasar didefinisikan suatu tempat yang mana pada hari tertentu para penjual dan para pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang. Para penjual menawarkan barang dengan harapan dapat laku terjual dan memperoleh sekecil uang sebagai gantinya. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya. Ini pasar dalam arti asli atau konkrit. Akan tetapi kemudian dalam waktu yang agak lama di sekitar pasar muncul banyak dibangun toko (kios) dan *shopping center* (pusat perbelanjaan), barang yang dibutuhkan dapat juga dipesan melalui telepon atau surat, sehingga pertemuan antara penjual dan pembeli untuk jual beli barang tidak lagi terbatas pada suatu tempat tertentu saja. Oleh karena itu dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar dipakai dalam arti yang lebih luas (pasar abstrak). Dalam ilmu ekonomi, sesuatu digolongkan sebagai pasar jika memenuhi hal berikut: pertama, ada suatu pertemuan atau interaksi, ada orang yang mau menjual barang (penjual), ada orang yang mau membeli (pembeli), ada

---

<sup>30</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Muh. Maghfur, Cet. 2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 57-58.

barang atau jasa tertentu, dan ada harga tertentu.<sup>31</sup>

Penjual dan pembeli bertemu di pasar. Masing-masing mempunyai keinginan dan kepentingannya sendiri-sendiri. Hanya kalau keinginan mereka dapat dipertemukan, akan terjadi transaksi jual beli. Faktor penting yang dapat mempertemukan mereka adalah harga, yang terbentuk di dalam pasar ketika interaksi terjadi antara penjual dan pembeli. Para penjual mengharapkan harga setinggi mungkin untuk barang/jasa yang ditawarkan, agar mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi bila mereka minta harga yang terlalu tinggi, para pembeli tidak mau membeli sehingga barang tidak akan laku. Di lain pihak, kalau penjual mendapat harga yang terlalu rendah, mereka tidak akan bersedia melepaskan barangnya karena merasa rugi.

Pedoman yang dijadikan landasan penjual dalam menentukan harga antara lain: pertama, biaya yang telah dikeluarkan seperti: biaya bahan dan alat, upah tenaga kerja, banyaknya waktu/keahlian yang telah dicurahkan, dan biaya variabel lain. Kedua, laba yang diinginkan yang merupakan sumber penghasilan.

Para pembeli sebaliknya menginginkan harga yang serendah mungkin, agar mendapat barang sebanyak mungkin dengan uang yang dibelanjakan, atau mengeluarkan uang sekecil mungkin nominalnya mungkin akan memperoleh apa yang dibutuhkan .

Pedoman yang dijadikan landasan pembeli membeli barang antara lain: pertama, kebutuhan-kebutuhan menurut urutan

---

<sup>31</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, Cet. 7 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), hal. 154.

mendesaknya, yang mana semakin tinggi kebutuhan akan barang tersebut atau semakin besar manfaatnya yang terdapat di dalam barang tersebut, maka pembeli akan semakin bersedia membayar dengan harga yang tinggi untuk memperolehnya. Kedua, besarnya penghasilan atau jumlah uang yang tersedia untuk dibelanjakan, makin banyak uangnya maka semakin mudah orang untuk mengeluarkannya. Oleh sebab itu, ada hubungan timbal balik yang muncul antara harga suatu barang dan jumlah yang mau dijual atau dibeli yaitu: pertama, bila harga tinggi, maka penjual mau menjual banyak akan tetapi pembeli hanya mau membeli sedikit. Kedua, bila harga rendah, maka pembeli mau membeli banyak akan tetapi penjual hanya akan menjual sedikit.<sup>32</sup>

### 3. Penyakit Ekonomi

Dalam sejarah perkembangan ekonomi di berbagai negara baik dalam negeri maupun luar negeri, sebenarnya keadaan ekonomi jarang mengalami keadaan stabil untuk jangka waktu yang agak lama. Pada masa yang mana kegiatan ekonomi berkembang dengan cepatnya, maka produksi bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, dan mencari pekerjaan mudah. Tetapi masa-masa kemajuan ini silih berganti dengan masa-masa kemunduran, yang mana semuanya terasa macet sebagai contoh produksi merosot, pendapatan masyarakat berkurang, dan pengangguran bertambah. Pengalaman ini memberikan kesimpulan bahwa penyakit dalam ekonomi itu antara lain:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 154-168.

- a. resesi atau kemunduran, kalau kegiatan ekonomi lambat, produksi merosot, dan banyak pengangguran, maka perekonomian nasional menjadi lesu seperti kurang darah, dan hasil produksi kurang dari pada yang seharusnya dapat dicapai dengan kepastian produksi yang ada. Kalau kemerosotan itu sudah parah maka disebut depresi.
- b. inflasi yaitu keadaan yang terjadi tatkala perekonomian nasional diupayakan untuk lari cepat, akan tetapi kapasitas produksinya tidak dapat melayani permintaan masyarakat, dan harga-harga pun merangkak naik, ibaratnya seperti menderita kekurangan darah.
- c. Stagflasi yaitu terjadinya inflasi dan stagnasi (macet) secara bersamaan.<sup>33</sup>

Inflasi yang didefinisikan sebagai kenaikan harga umum di dalam perekonomian dalam kurun waktu tertentu, para pakar ekonomi modern masih menganggap bahwa terjadinya inflasi sangat berkaitan erat dengan jumlah uang beredar (JUB) sebagaimana digambarkan dalam rumus:

$$M \cdot V = P \cdot T$$

Penjelasan teori ini, kalau jumlah uang (M) bertambah (*ceteris paribus*, maka V konstan dan T juga konstan, maka harga-harga (P) akan naik. Atau dengan kata lain inflasi terjadi karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang, yang mana dalam ekonomi nasional bahwa arus barang yang berupa hasil produksi Rumah Tangga Perusahaan (RTP)

---

33 *Ibid.*, hal. 392.

ditambah dengan impor akan bertemu dengan arus uang yang berasal dari pembelanjaan masyarakat di pasar yang berupa konsumsi (C), Investasi (I), belanja pemerintah (G), dan Ekspor (Xn). Apabila antara arus uang dan arus barang ini seimbang dan berjalan lancar maka berdampak positif, yaitu berupa:

- a. produksi berjalan lancar dan melayani kebutuhan/permintaan masyarakat, sambil memberikan kesempatan kerja bagi warga masyarakat.
- b. hasil produksi dapat terjual, artinya dibeli oleh masyarakat, atau cocok dengan kebutuhan masyarakat, tidak terlalu banyak atau sedikit, atau dengan harga yang tidak terlalu mahal atau murah.
- c. jumlah uang beredar tepat sesuai untuk melayani kebutuhan ekonomi.
- d. tanda kecocokan antara arus barang dan uang adalah harga-harga menjadi stabil.

Para pakar ekonomi menemukan bahwa terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang ini berasal dari empat segi yaitu:

- a. segi produksi atau arus barang (segi *supply*). Misalnya karena panen gagal, ada hama/banjir/bencana alam, kemacetan transportasi, perubahan teknik produksi, dan sebagainya.
- b. segi permintaan (segi *demand*), kelebihan atau kekurangan permintaan masyarakat, misalnya karena adanya perubahan selera konsumen atau mode (*consumption/C*), atau karena perubahan tingkat

investasi akibat perkembangan teknologi (*investment/I*), atau karena defisit APBN (berakibat pada belanja pemerintah/*G*), atau karena ekspor lebih besar (atau lebih kecil) daripada impor (*Xn*), atau karena pandangan para pelaku usaha yang optimis (atau pesimis), maka ini semua dapat mempengaruhi permintaan atau pembelanjaan masyarakat (tingkat *C*, *I*, *G*, dan *Xn*).

- c. segi harga, misalnya karena kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan dasar, sebagai contoh kebijakan OPEC (organisasi dunia bagi negara-negara pengeksport minyak bumi) untuk menaikkan harga minyak tanah, atau karena kenaikan, atau penurunan kurs valuta asing yang mempengaruhi harga barang impor.
- d. segi uang, misal karena ekspansi jumlah uang beredar oleh pengeluaran pemerintah lebih cepat daripada yang dapat diserap oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, maka para pakar ekonomi merumuskan jenis-jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya yang antara lain:

- a. *Demand Pull Inflation*, inflasi yang disebabkan karena kelebihan permintaan efektif<sup>34</sup> karena pembelanjaan ( $C + I + G + Xn$ ) terlalu besar (naik terlalu cepat), sehingga tidak dapat dilayani oleh kapasitas produksi, sehingga

---

<sup>34</sup> Permintaan efektif (*effective demand*) yaitu jumlah sesuatu yang mau/ingin dibeli oleh masyarakat atau permintaan riil. Permintaan potensial (*Potential Demand*) adalah permintaan yang kemungkinan muncul dari masyarakat atau permintaan yang masih diprediksi di atas kertas.

terjadi kelebihan permintaan (*demand*) dibandingkan penawaran (*supply*) berakibat keseimbangan keduanya terganggu. Biasanya permintaan masyarakat ini didukung oleh uang atau kredit yang disediakan oleh dunia perbankan atau tabungan (*saving*) yang ditarik.

b. *Cost Push Inflation*, inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, sehingga mengakibatkan harga barang produksi melambung di atas normal. Inflasi ini digolongkan menjadi dua:

- (1) Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan bahan-bahan baku, seperti kenaikan harga bahan bakar (Bensin, Solar, Minyak Tanah) sebagai respon atas penetapan harga bahan bakar dunia oleh OPEC.
- (2) Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan gaji, seperti kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang kemudian diikuti oleh karyawan swasta, selanjutnya diikuti oleh kenaikan harga lainnya.

*Imported Inflation*, inflasi yang muncul karena respon atas inflasi di negara lain atau luar negeri. Biasanya inflasi ini banyak dialami oleh negara yang sedang berkembang (*developing countries*) yang sebagian besar dari usaha produksinya di hampir semua sektor industri mempergunakan bahan dan alat yang masih harus diimpor dari luar negeri, sehingga inflasi yang ada di negara Jepang bisa diimpor juga ke Indonesia bersamaan dengan produk impornya.

Ketiga jenis inflasi ini biasanya saling mendorong dan saling memperkuat, karena informasi adanya inflasi cenderung

direspon masyarakat seperti produsen dan pedagang dengan bertindak sedemikian rupa, sehingga justru memperkuat inflasi yang sudah ada, adapun skenario yang biasa terjadi adalah sebagai berikut:

- a. saat kondisi harga-harga barang naik, para pedagang cenderung menyimpan barangnya menunggu sampai harga naik lebih tinggi lagi, sehingga berakibat peredaran barang berkurang yang mengakibatkan harga-harga akan naik.
  - b. saat harga naik, para pengusaha akan mengikuti gerakan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan pendapatan dan labanya dengan menaikkan harga jualnya.
  - c. saat harga naik, masyarakat cenderung panik dan segera membeli barang sebelum harga naik lagi, sehingga permintaan akan barang naik dan justru harga bertambah naik lagi.
  - d. karena di sini ada kaitan antara barang yang satu dengan barang yang lain, maka kenaikan harga barang yang satu akan mendorong harga barang-barang lain juga mengalami kenaikan. Selain kaitan harga barang, hal lain juga bisa terpengaruh atau ikut naik seperti harga tiket transportasi, harga karcis parkir.<sup>35</sup>
4. Pengendalian Harga

Menurut Steven Cheung dari Universitas Washington, pengendalian harga (*price control*) adalah satu dari bentuk kebijakan campur tangan atas transaksi *private* di dalam pasar.

<sup>35</sup> Gilarso, T, *Pengantar*, hal. 398 – 404.

Yang mana isi kebijakan itu adalah: pertama, melakukan pematokan harga atau pemasukan (*income*) atas sesuatu yang ditransaksikan oleh pelaku pasar. Kedua, tidak melibatkan kepemilikan yang tidak sah (dalam ekonomi) dari atau kepada pemerintah, seperti tidak melibatkan pajak, dan subsidi. Oleh karena itu, penetapan harga seharusnya tidak dihubungkan langsung dengan hal yang dijual atau dibeli oleh perusahaan pemerintahan atau pemanfaatan sumber daya untuk menjaga harga yang telah ditetapkan, dengan syarat-syarat ini maka dorongan harga (oleh pemerintah) tidak diperbolehkan. *Price control* bisa diadakan pada kondisi *disequilibrium*, tidak ada kesimpulan lain yang bisa diperdebatkan.<sup>36</sup>

John Kenneth Galbraith memaknai *price control* sebagai segala kebijakan yang meluas, dengannya harga pasar yang sedang memunculkan masalah dapat di pengaruhi atau diganti. Harga yang berlaku dapat diganti dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk dibeli atau pun dijual, bisa juga jika harga dibekukan pada satu harga. Ini dilakukan apabila pergerakan harga dirasakan bisa membuat dampak yang buruk seperti saat perang, atau jika itu menjadi sulit untuk mencapai tujuan nasional seperti keadaan *full employment* (tanpa pengangguran) tanpa adanya inflasi, serta untuk memudahkan siapa pun dapat mengakses bahan pangan. Ini menjadi sah karena memang tujuannya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.

Berkaitan dengan kebijakan *price control*, Adam Smith sampai dengan Figou sebagai ahli ekonomi klasik tidak berdiri

---

<sup>36</sup> Steven N. S. Cheung, "A Theory of Price Control", *Journal of Law and Economics*, No. 1, Vol. 17 (April, 1974), hal. 53.

pada posisi doktrin *laissez faire* sebagaimana yang mereka yakini. Adam Smith tidak percaya bahwa pergerakan bebas dari harga adalah kebijakan yang terbaik kapan pun dan di mana pun. Walaupun demikian Figou menganggap bahwa banyak fakta yang terbukti tentang keberhasilan kebijakan *price control* tersebut.<sup>37</sup>

## C. PENDEKATAN KAJIAN

### 1. Jenis Kajian

Kajian ini merupakan jenis Kajian studi tokoh, yang merupakan salah satu jenis Kajian kualitatif, yang berbentuk studi multi kasus dengan pendekatan Kajian historis dan Kajian kepustakaan. Kaidah yang dibangun dalam studi tokoh ini adalah mengikuti kaidah Kajian kualitatif. Kajian kualitatif ini adalah prosedur Kajian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan *setting* dan individu-individu dalam *setting* itu secara keseluruhan. Subyek studi dapat berupa organisasi, lembaga atau individu, tidak dipersempit menjadi variable yang terpisah atau menghasilkan hipotesis.<sup>38</sup> Indikator yang dipakai untuk memilih tokoh Sultan Alauddin Khalji tersebut salah satunya adalah:<sup>39</sup>

- a. berhasil di bidangnya. Istilah berhasil menunjuk pada \_\_\_\_\_ pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Orang yang berhasil

<sup>37</sup> Stephanie Laguerodie dan Francisco Virgara, "The Theory of Price Controls", dikutip dari [www.google.com](http://www.google.com) accessed 11 Juli 2010.

<sup>38</sup> Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Kajian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 15.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 19.

adalah orang yang mencapai tujuan-tujuan tertentu baik jangka panjang maupun jangka pendek berdasarkan potensi yang dimiliki dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya.

- b. ketokohnya diakui secara mutawahir, artinya dengan segala kekurangan dan kelebihan sang tokoh, sebagian besar warga masyarakat memberikan apresiasi positif dan mengidolaknya sebagai orang yang pantas menjadi tokoh atau ditokohkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sesuai dengan bidangnya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Kajian yang dilakukan dengan menggunakan prosedur pengumpulan data dalam tiga tahap yaitu:

- a. tahap orientasi, yaitu tahap untuk mengumpulkan data secara umum tentang tokoh untuk mencari hal-hal menarik dan penting untuk diteliti dengan tujuan mendapatkan fokus studi.
- b. tahap eksplorasi, yaitu tahap pengumpulan data yang dilakukan lebih terarah sesuai dengan fokus studi.
- c. tahap studi terfokus, yaitu tahap di mana Penulis mulai melakukan studi secara mendalam yang terfokus pada masalah keberhasilan, keunikan, dan karya sang tokoh yang dianggap penting dan mempunyai pengaruh signifikan dalam masyarakat dari berbagai sumber informasi.

Selanjutnya Kajian yang dilakukan ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi atau *library*

*research*, yaitu mencatat tulisan-tulisan orang lain yang berkaitan dengan sang tokoh dengan harapan memahami keseluruhan atau sebagian dari pemikiran sang tokoh,<sup>40</sup> Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. data primer, yaitu data yang ditentukan secara *purposive* sampling, yang mana informan ditentukan berdasarkan pandangan sangat mengetahui tentang tokoh Sultan Alauddin Khalji dan kebijakannya.<sup>41</sup> Data ini mencakup bibliografi dan buku yang berkaitan langsung dengan profil Sultan Alauddin Khalji dan kebijakan politik ekonominya, seperti *The History of India as Told by Its Own Historians* karya H. M. Elliot. Buku ini terdiri dari delapan volume (jilid), setiap volume merupakan kumpulan dari buku-buku yang bercerita tentang India. Pada Kajian ini salah satunya mengambil data dari volume ke-III yang berisi buku *Tarikh-e-Firuz Shahi* karya Ziauddin Barani dan *Khazainul Futuh* karya Amir Khusrau, yang mana sejarawan ini merupakan saksi hidup atas pemerintahan Sultan Alauddin Khalji.
- b. bahan sekunder, yaitu sumber data mencakup buku sejarah yang menceritakan sejarah India secara keseluruhan dan memasukkan Sultan Alauddin Khalji sebagai salah satu sub bahasan di dalamnya, salah satu dari bahan sekunder ini seperti buku *The Life and Works of Sultan Alauddin Khalji* karya Ghulam Sharwar Khan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 15.

Niazi, buku *History of India* karya C. Mabel Duff, buku *The Indian Empire, Its People, History, and Products* karya William Wilson Hunter.

- c. bahan lain sebagai pelengkap seperti buku dan tulisan dari jurnal tentang kebijakan pengendalian harga menurut para pakar ekonomi konvensional dan Islam sekaligus yang memuat definisi yang berkaitan dengan Kajian ini, sebagai contoh buku *Adhwau 'ala al-Mu'amalati al-Maliyati Fi al-Islami* karya Mahmud Hamudah dan Mushtafa Hasanain yang memuat definisi *tas'ir*, buku *Principles of Economics* karya Clifford L. James dan jurnal seperti *Journal of Law and Economics* yang memuat judul *A Theory of Price Control* yang ditulis oleh Steven N. S. Cheung.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam studi tokoh ini dapat dilakukan dengan langkah: menemukan pola atau tema tertentu untuk menangkap karakteristik pemikiran sang tokoh, mencari hubungan logis antar pemikiran sang tokoh dalam berbagai bidang, mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran sang tokoh sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai bidang yang sesuai, mencari generalisasi gagasan yang spesifik.<sup>42</sup>

### 4. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagai bagian dari Kajian kualitatif, studi tokoh harus

---

<sup>42</sup> Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh.*, hal. 61-62.

pula memenuhi persyaratan sebagai suatu *disciplined inquiry*. Sebagaimana pada Kajian pada umumnya, setiap kegiatan studi tokoh haruslah dilaksanakan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan, artinya nilai penemuan memang penting atau cukup berarti. Untuk mendukung signifikansi temuan, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data yaitu dengan cara:

- a. Dependabilitas Data, yaitu melakukan konsultasi dengan berbagai pihak untuk memeriksa proses studi yang dilakukan Penulis agar temuan studi dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai kaidah metode Kajian.
- b. Konfirmabilitas Data, ini sama dengan dependabilitas namun orientasinya bukan pada proses Kajian tetapi pada hasil (produk) Kajian terutama berkaitan dengan deskripsi temuan studi dan diskusi hasil studi. Kemudian kedua cara ini digunakan secara bersamaan untuk memenuhi standar Kajian kualitatif yaitu *truth value, applicability, consistency, critice, dan neutrality*.<sup>43</sup>

## D. PEMBAHASAN

Kajian ini disusun secara sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil Kajian secara menyeluruh dan jelas, oleh sebab itu Kajian ini mencakup beberapa bab dan sub bab dalam sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu atau Bab Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan Kajian,

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 82-83.

manfaat Kajian, telaah pustaka, kerangka teori, metode Kajian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang riwayat hidup Sultan Alauddin Khalji, meliputi sejarah bangsa Khalji dan Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi Awal Pemerintahan Alauddin

Bab tiga menjelaskan tentang kebijakan Sultan Alauddin Khalji, meliputi kebijakan politik dalam negeri, kebijakan militer, dan kebijakan ekonomi.

Bab empat menjelaskan tentang dampak kebijakan pengendalian harga terhadap ekonomi sosial politik, mencakup faktor kesuksesan kebijakan pengendalian harga, dampak positif bagi ekonomi negara, dampak pada peradaban sosial, dan dampak pada kekuatan politik.

Bab lima menjelaskan tentang pembahasan sistem pengendalian harga Sultan Alauddin Khalji yang dibandingkan dengan teori ekonomi serta kebijakan pemimpin muslim yang lain.

Bab enam adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari Penulis. Penulisan tesis ini kemudian diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup Penulis.

## BAB II

# RIWAYAT HIDUP SULTAN ALAUDDIN KHALJI

### A. SEJARAH BANGSA KHALJI

Sejarah bangsa Khalji tidak dapat dilepaskan dari sejarah Islam di India, yang mana bangsa Khalji tersebut memiliki peranan penting sebagai penopang dalam perjuangan penyebaran Islam terutama pada pemerintahan Sultan Muhammad Ghuri (1186-1206 M). Wilayah India sebelum datangnya ajaran Islam telah mengenal kepercayaan tertentu, salah satunya adalah kepercayaan bangsa Dravida<sup>1</sup> yang memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhan secara abstrak. Selanjutnya pada abad VI SM, bangsa Aria dari Persia datang dengan membawa keyakinan yang mana mereka meyakini Tuhan secara nyata, dan perwujudan ritual atas keyakinan ini adalah mereka menyembah api, bulan, matahari, angin, pohon, sungai, dan para dewa. Selain itu mereka juga melakukan ritual pengorbanan manusia untuk membuat senang para dewa. Kedatangan bangsa Aria dengan keyakinannya yang berbeda dengan bangsa Dravida memunculkan perebutan

---

<sup>1</sup> Bangsa Dravida diyakini sebagai salah satu bangsa yang telah menetap di India sejak 6000-5000 SM, walaupun sebelumnya ada bangsa Negroid dan Austroloid namun sejarah kedua bangsa ini tidak banyak diketahui: M. Abdul Karim, *Sejarah Islam di India*, (Yogyakarta: Bunga Grafies Production, 2003), hal. 3.

pengaruh antara mereka sehingga membuat banyak penganut bangsa Dravida menjadi penganut keyakinan bangsa Aria, yang mana kemudian kepercayaan ini menjadi agama Brahmana (Hindu) yang juga mempercayai adanya kasta di antara pemeluknya.<sup>2</sup> Selanjutnya pada tahun 599 SM lahir Mawahir seorang pelopor agama Jaina<sup>3</sup> yang menggariskan dasar agama ini pada pertapaan dan meninggalkan kehidupan mewah, selain itu sumber keagamaan bukan dari kitab suci tetapi dari Mahawir sendiri. Namun kemudian agama ini pun melebur pada agama Hindu yang ada sebelumnya hingga muncul agama Budha yang dipelopori oleh Gautama Budha<sup>4</sup> yang menentang adanya kasta-kasta yang dianut oleh agama Hindu.<sup>5</sup>

Perebutan pengaruh antara penganut agama Jaina, Hindu dan Budha terus berlangsung antara tahun 543 SM hingga 1000 M<sup>6</sup> hingga dalam kurun waktu tersebut muncul cerita tentang

<sup>2</sup> Agama Brahmana (543 SM sampai 1000 M) meyakini adanya kasta yang meliputi kasta Brahmana, kasta Ksatriya, kasta Waisa dan kasta Sudra. Agama Brahmana didirikan 600 tahun sebelum adanya agama Kristen, agama Brahmana ini kelak menjadi salah satu agama yang hampir dianut lebih dari 500 juta orang di Asia: Sir William Wilson Hunter, *A Brief History of The Indian Peoples*, (Oxford: The Clarendon Press, 1893), hal. 74.

<sup>3</sup> Agama Jaina memiliki pokok ajaran yaitu *ahimsa* (tidak hasad), agama sejati dan ini berlaku atas semua makhluk: M. Abdul Karim, *Sejarah Islam.*, hal. 4.

<sup>4</sup> Gautama Budha lahir pada tahun 557 SM di Kapilabastu (Kapilavastu) di kaki Gunung Himalaya, ia adalah seorang pangeran atau putra dari Suddhodana, raja Kapilabastu, ia juga diberi amanah untuk mengurus penduduk Sakya yang berjarak 100 mil sebelah utara Benares: Sir William Wilson Hunter, *A Brief History.*, hal. 74.

<sup>5</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Islam.*, hal. 3.

<sup>6</sup> Sir William Wilson Hunter, *A Brief History.*, hal. 79-84.

pengaruh bangsa lain seperti invasi bangsa Yunani yang dilakukan oleh Alexander Agung (*Alexander the Great*) pada tahun 327 SM.<sup>7</sup> Selanjutnya bangsa *Scythian*<sup>8</sup> atau Tartar yang berasal dari Asia Tengah juga melakukan invasi hingga Punjab setelah melewati daerah Himalaya, dan keberadaan mereka di India diperkirakan hingga tahun 500 M.<sup>9</sup> Itulah mengapa di India saat ini ditemukan tiga bangsa yang memiliki kebiasaan, agama dan bahasa yang berbeda yaitu non-Aria yang lebih dahulu mendiami India, Aria yang berasal dari Persia (Barat Laut India) pada masa prasejarah, dan terakhir *Sycthian* atau Tartar yang berasal dari Asia Tengah.

Pada abad VI M Nabi Muhammad SAW yang mana saat itu menjadi pemimpin agama (*Rasulullah*) sekaligus pemimpin politik negara Islam (*Amir al-Mukminin*) telah melakukan hubungan politik dengan pihak luar dengan cara mengirim utusan ke luar maupun menerima utusan dari luar negeri, salah satu di antara utusan yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah Cheraman Perumal, raja Kadangaluru dari pantai Malabar yang telah memeluk Islam.<sup>10</sup> Sehingga setelah itu periode masuknya Islam di India dibagi dalam empat tahap yaitu zaman Nabi Muhammad SAW (antara 630-631 M), zaman *Khulafaur Rasyidin* dan Dinasti Umayyah (632-750 M), Dinasti Ghazni (1001-1186 M), Dinasti Ghuri (1186-1206 M).<sup>11</sup> Namun

---

<sup>7</sup> Penaklukan Alexander Agung di India tanpa ada perlawanan berarti dari penduduknya. Ia melintasi Indus hingga Attock selanjutnya menginvasi wilayah Taxiles hingga Jehlam (Hydapes).

<sup>8</sup> Bangsa *Scythian* disebut juga bangsa Sistan.

<sup>9</sup> Sir William Wilson Hunter, *A Brief History*., hal. 90.

<sup>10</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Islam*., hal. 7.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 6.

pengaruh pengikut Nabi Muhammad SAW di India yang dibuktikan dengan pergantian penguasa muslim antara tahun 1001-1857 M.<sup>12</sup>

Pada masa *Khulafaur Rasyidin*, pemerintahan selanjutnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat diserahkan kepada Abu Bakar yang mana periode Abu Bakar (632-634 M) ini hanya berlangsung singkat dan mampu mengamankan negara baru Islam dari perpecahan dan kehancuran, baik dari kalangan sahabat mengenai persoalan pengganti Nabi maupun tekanan dari luar<sup>13</sup> dan dalam.<sup>14</sup> Langkah ini termasuk dalam tahap

---

<sup>12</sup> Periode penguasa muslim di India: Dinasti Ghazni (Turki) meliputi Mahmud Ghazni sampai Sultan Khusrau (1001-1186 M), Dinasti Ghuri (Afghan) meliputi Muhammad Ghuri/Shahabuddin (1186-1206 M), Kepemimpinan orang dari Turki/*chieftly Turki* meliputi Kutubuddin hingga Balban dan Kaikubad (1206-1290 M), Dinasti Khalji meliputi Jalaluddin Firuz hingga Nasiruddin Khusru (1290-1320 M), Dinasti Tughlaq meliputi Ghiyasuddin Tughlaq hingga Firuz Shah Tughlaq dan akhir dari dinasti ini di tangan Sultan Amir Timur Lang (1320-1414 M), Dinasti Sayyed (1414-1450 M), Dinasti Lodi (1451-1526 M), Dinasti Timur dari Mughol meliputi Sultan Babar (1526-1530 M), Humayun (1530-1556 M), Akbar Agung (1556-1605 M), Jahangir (1605-1627 M), Shah Jahan (1628-1658 M), Aurangzeb/Alamgir I (1658-1707 M), Bahadur Shah/Shah Alam I (1707-1712 M), Jahandar Shah (1712 M), Farukhsiyar (1713-1718 M), Muhammad Shah (1719-1748 M), Ahmad Shah (1748-1754 M), Alamgir II (1754-1759 M), Shah Alam II/kekaisaran Titular (1759-1806 M), Akbar II/Kekaisaran Titular (1806-1837 M), Muhammad Bahadur Shah (1837-1857 M): Sir William Wilson Hunter, *A Brief History.*, hal. 109-110.

<sup>13</sup> Untuk mengurangi tekanan dari luar dengan mengirim ekspedisi ke luar negeri seperti Syam di bawah kendali Usamah bin Zaid disertai 12 bataliyon untuk 12 wilayah dengan misi menghadapi pembangkang dan menumpas nabi-nabi palsu.

<sup>14</sup> Untuk mengurangi tekanan dari dalam dengan memberikan

pemantapan posisi Islam sendiri di wilayah Arab dan sekitarnya, namun ini termasuk langkah yang cerdas yang dilakukan oleh Abu Bakar telah membuat musuh-musuh besar pemerintahannya seperti Sasania di Timur dan Romawi di Barat beranggapan bahwa pemerintahan di Madinah sangat aman, damai dan sangat kuat yang dibuktikan dari kemampuan Abu Bakar mengirim pasukan ke 12 front yang masing-masing front dipimpin oleh seorang jenderal.<sup>15</sup> Oleh karena itu pada periode Abu Bakar, penyebaran Islam di India masih sama kondisinya dengan masa Nabi Muhammad SAW.

Pada masa Umar Ibn Khattab (634-644 M) peta Islam meluas ke daerah timur sampai perbatasan India dan sebagian Asia Tengah di Barat sampai Afrika Utara.<sup>16</sup> Setelah Umar Ibn Khattab wafat, pemerintahan Islam diberikan kepada Usman Ibn 'Affan (peta Islam melebar ke arah Barat sampai Aljazair bahkan Tunisia, dan ke arah Utara sampai ke Aleppo dan sebagian Asia Kecil, dan ke arah Timur Laut sampai ke *Ma Wara al-Nahar* (Transoxiana), dan ke arah Timur sampai seluruh Persia bahkan sampai batas wilayah Balucistan (wilayah Pakistan sekarang) serta Kabul dan Ghazni.<sup>17</sup> Maka dari periode Nabi Muhammad hingga periode Usman Ibn 'Affan peta penyebaran Islam hanya sampai batas Pakistan, sehingga muncul masa Dinasti Umayyah (661-750 M) di mana salah satu pemimpinya adalah Walid amanah kepada Ali Ibn Abi Talib untuk memegang keamanan dalam negeri yang sangat parah keadaannya.

<sup>15</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), hal. 83.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 84.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 91.

I ((705-715 M) yang mampu menancapkan pengaruh Islam di India<sup>18</sup> dan menempatkan wakilnya di wilayah Timur/*al-Masyriq* yaitu Hajjaj Ibn Yusuf.

Saat Walid I memimpin Dinasti Umayyah, Hajjaj Ibn Yusuf yang saat itu berdomisili di Iran sebagai kepala front Timur mengutus panglima muda yang juga sebagai menantu (*son in law*) dan keponakannya Muhammad Ibn Qasim menuju wilayah India. Muhammad Ibn Qasim memang masih berumur 17 tahun namun karakter, kemampuan politik dan strategi perangnya sangat hebat bahkan IL Musannif penulis buku *The Land of Hind* mengatakan “ Though son-in-law of Hajjaj, the tyrant of Iran, his temper and policy equaled his courage and strategy“.<sup>19</sup>

Karakter yang dimiliki Muhammad Ibn Qasim ini yang ternyata menjadi salah satu sebab keberhasilannya dalam menaklukkan di tanah India selain faktor lain seperti kemahiran, kecepatan, keunggulan tentaranya atas tentara Dahir, kepatuhan yang tinggi tentaranya kepada komandonya dan dari pihak orang India memang telah ada perpecahan di antara mereka serta keterpurukan kepemimpinan Dahir.<sup>20</sup> Dinasti Umayyah yang telah terjadi pergantian kepemimpinan mulai dari Muawiyah (661-668 M), Yazid I (680-683 M) termasuk di dalamnya Walid I hingga terakhir Marwan II (744-750 M) dalam melebarkan peta Islam ke arah Timur mampu menjangkau anak benua India sampai perbatasan China.

<sup>18</sup> India yang dimaksud adalah Hind yang mencakup Pakistan, India, Bangladesh dan sekitarnya.

<sup>19</sup> IL Musannif, *The Romantic Land of Hind*, (London: W. H. Allen & Co, 1882), hal. 1

<sup>20</sup> M. Abdul. Karim, *Sejarah Islam.*, hal. 10.

Kekuasaan Islam atas wilayah India setelah Dinasti Umayyah dikendalikan oleh Dinasti Abassiah (750-1258 M) namun terjadi pasang surut terutama terkait hubungan mereka dengan orang-orang Turki dan Persia yang saat itu memang sangat kuat pengaruhnya,<sup>21</sup> hingga muncul kemudian berdiri dinasti Tahiriyah,<sup>22</sup> dinasti Saffariyah,<sup>23</sup> dinasti Samaniyah,<sup>24</sup> dan

<sup>21</sup> Phillip K. Hitti, *History of The Arabs; From the Earliest Times to the Present*, alih bahasa Cecep Lukman (et al)., Cet. 1 (Jakarta: Serambi, 2008), hal. 585-587

<sup>22</sup> Dinasti Tahiriyah didirikan oleh Thahir Ibn al-Husayn, di Khurasan, ia adalah seorang keturunan budak Persia yang mana pada tahun 820 M diangkat sebagai gubernur di semua kawasan sebelah timur Baghdad oleh al-Ma'mun. Thahir juga terkenal sebagai seorang ahli perang, dan dinasti Tahiriyah berakhir tahun 872 M.

<sup>23</sup> Dinasti Saffariyah bermula di Sijistan (sebuah wilayah antara Pakistan dan Afghanistan saat ini) dan berkuasa di Persia selama 41 tahun (867-908 M), didirikan oleh Ya'qub Ibn al-Laits al-Shaffar (867-878 M). Al-Shaffar (tukang tembaga) menjadikan pandai tembaga sebagai pekerjaannya, dan merampok sebagai kegemarannya. Karena pengaruhnya yang kuat, akhirnya gubernur Sijistan mengangkatnya sebagai pemimpin balatentaranya, hingga kemudian ia menggantikan tuannya di Sijistan bahkan memperluas wilayah kekuasaannya hingga hampir seluruh Persia dan kawasan pinggiran India, bahkan mengancam kekuasaan Khalifah al-Mu'tamid di Baghdad.

<sup>24</sup> Dinasti Samaniyah (874-999 M) didirikan oleh keluarga Samaniyah dari Persia dan Transoxiana yang merupakan keturunan Saman, seorang bangsawan penganut ajaran Zoroaster dari Balkh. Pendiri dinasti ini adalah Nashr Ibn Ahmad, tetapi yang menegakkan kekuasaan dinasti ini adalah saudara Nashr, Isma'il (892-907 M), yang pada tahun 900 berhasil merebut Khurasan dari genggamannya Saffariyah. Di bawah kepemimpinan Nashr II (Ibn Ahmad, 913-943 M), dinasti ini berhasil menguasai kawasan Sijistan, Karman, Jurjan, Rayyi, Tabaristan, Transoxiana dan Khurasan. Bahkan, seluruh wilayah Transoxiana termasuk ibukotanya Bukhara dan kota terkemuka lain seperti Samarkand juga berhasil dikuasai.

kemudian dinasti Ghaznawi.<sup>25</sup>

Bangsa Khalji untuk pertama kali disebutkan pada sejarah Bangsa Sistan di abad ke-3 Hijriyah, namun bangsa Khalji mulai sering dibicarakan oleh sejarawan saat periode dari Ya'qub Ibn al-Laits al-Shaffar (867-878 M) seorang pendiri sekaligus pemimpin dinasti Saffariyah di Sijistan. Ia mampu memperluas wilayah kekuasaannya dari Sijistan hingga hampir seluruh Persia dan kawasan pinggiran India termasuk di dalamnya Khalj (sebutan dalam bahasa Persia untuk nama tempat di Afghanistan) atau Khilji sebuah suku di daerah ini (yang untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut Khalji) dan mendirikan peradaban dunia pada kota Ghazni. Subkari, salah satu orang Khalji yang merupakan tahanan perang Ya'qub Ibn al-Laits al-Shaffar, telah membangkitkan kekuatan dan menjadi Sipahsalar (pemegang otoritas militer/panglima) pada pasukan Saffariyah (*Safaride*

---

<sup>25</sup> Dinasti Ghaznawi (962-1186 M) didirikan oleh Alptigin, ia sebenarnya seorang budak Turki yang disukai dan dihargai oleh penguasa Samaniyah. Ia memulai karir sebagai pengawal kemudian menjadi kepala pengawal dan selanjutnya diberi jabatan gubernur di Khurasan pada tahun 961 M. Kemudian ia pergi ke Ghazni (sebuah wilayah di Afghanistan sekarang) karena sudah tidak disukai penguasa Samaniyah, dan di wilayah Ghazni inilah ia mendirikan dinasti independen setelah merebutnya dari tangan penguasa pribumi. Sejarawan berbeda pendapat terkait tahun berdirinya dinasti ini, dalam buku *A Brief History of the Indian Peoples* karya Sir William Wilson Hunter menyebutkan tahun 1001 -1186 M, namun sebagian besar sejarawan lain menyebutkan dinasti ini berdiri tahun 962 M. Menurut Phillip K. Hitti dalam *History of The Arabs; From the Earliest Times to the Present*, bahwa tahun 1001 M merupakan tahun yang mana Mahmud (999-1030 M), putra Subuktigin memperoleh gelar *al-Ghazi* dalam sejarah Islam sebagai penakluk orang kafir di India dan sebagai masa kejayaan dinasti Ghaznawi di India.

*Army*) saat kepemimpinan Ya'qub Ibn al-Laits al-Shaffar.<sup>26</sup>

Dinasti Samaniyah muncul menggantikan kekuasaan dinasti Saffariyah, pada saat dinasti Samaniyah ini wilayah kekuasaannya ke batas terjauh mencakup kawasan Sijistan, Karman, Jurjan, Rayyi dan Tabaristan, selain Transoxiana dan Khurasan. Kendati Samaniyah tampak setia kepada Abbasiyah namun dinasti ini sebenarnya independen. Di mata khalifah di Baghdad, Samaniyah adalah para *amir* (gubernur) atau bahkan *'amil* (pemungut pajak), tetapi di mata rakyat mereka, kekuasaan mereka sungguh tidak terbantahkan. Di bawah kekuasaan Samaniyahlah kaum muslim berhasil menaklukkan kawasan Transoxiana, ibukotanya, Bukhara, dan kota terkemukanya, Samarkand, hampir mengungguli Baghdad sebagai pusat pendidikan dan seni. Saat inilah muncul ilmuwan muslim, al-Razi yang mempersembahkan karyanya di bidang kedokteran *al-Manshur* kepada pangeran Samaniyah, Abu Shalih Manshur ibn Ishaq dari Sijistan. Pada masa ini pula Ibn Sina muda (masih berusia belasan tahun) yang tinggal di Bukhara berkesempatan secara leluasa mengakses buku-buku di perpustakaan istana.<sup>27</sup>

Dinasti Ghaznawi menggantikan kekuasaan dinasti Samaniyah, yang mana dinasti baru ini didirikan oleh Alaptigin, seorang mantan gubernur Khurasan di era Samaniyah yang kemudian melarikan diri ke daerah Ghaznah atau Ghazni (terletak di Afghanistan) sebuah wilayah bagian Samaniyah, kemudian mendirikan dinasti di sana setelah menaklukkan penguasa pribumi Abu Bakar Lawik. Kepemimpinan Ghaznawi

<sup>26</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 9.

<sup>27</sup> Phillip K. Hitti, *History.*, hal. 586-587.

digantikan oleh Abu Ishaq putra Alaptigin, dan setelah Abu Ishaq kepemimpinan dipegang oleh Subuktigin, yang selanjutnya dinasti Ghaznawi mengalami kejayaan di masa putra Subuktigin yaitu Mahmud Ghaznawi.<sup>28</sup>

Saat Alaptigin memimpin dinasti Ghaznawi, ia adalah orang yang paling bertanggungjawab atas berakhirnya pemerintahan orang Hindu di lembah Kabul dan Peshawar. Sejarawan Abu Nashr Utbi dalam karyanya *Tarikh-e-Yamini* mengatakan bahwa Alaptigin memperbesar kekuataannya dengan merekrut pasukan yang terdiri dari orang Afghan dan orang Khalji. Dia mengambil ribuan dari orang Afghan dan Khalji untuk bekerja padanya, maka dengan kekuatan pasukan yang besar ini pula Sultan Subuktigin mendapatkan kemenangan atas Jaipal, penguasa India Hindu dan mengusir mereka dari lembah Kabul.<sup>29</sup> Pengganti Subuktigin (976-997 M) yaitu Mahmud Ghaznawi (999-1030 M) melanjutkan langkah mertuanya tersebut,<sup>30</sup> ia tidak hanya

---

<sup>28</sup> M. Abdul. Karim, *Sejarah Islam.*, hal. 13.

<sup>29</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 9.

<sup>30</sup> Sultan Subuktigin meninggal pada 997 M dan menyerahkan kepemimpinan kepada putranya yaitu Ismail (998-999 M), namun setelah satu tahun Ismail menyerahkan jabatan kepemimpinan kepada saudaranya Mahmud yang memiliki kemampuan memimpin dan mengambil keputusan yang lebih hebat serta semangat yang lebih besar dibandingkan dengan dirinya. Menurut catatan Phillip K. Hitti, Mahmud memiliki kepercayaan Islam Sunni dan mengakui kekuasaan Khalifah al-Qadir (991-1031 M) di Baghdad hingga Khalifah memberinya gelar *Yamin al-Dawlah* (tangan kanan negara) selain gelar *al-Ghazi* yang diperolehnya karena prestasinya menaklukkan kaum kafir. Ia juga untuk pertama kalinya memperoleh gelar tertinggi dalam Islam yaitu *Sulthan*, dan ini dibuktikan dari keping mata uang yang termaktub di dalamnya nama dirinya serta para penerusnya dengan gelar *amir* (gubernur) atau

mengusir pemimpin Hindu dari seluruh lembah Qandhar tetapi juga mengikrarkan perang suci (*the holy war*) secara meluas sampai ke daerah di luar sungai besar Sind.<sup>31</sup> Kota Ghaznah yang merupakan ibukota negara Ghaznawiyah memiliki posisi strategis karena berada di puncak sebuah bukit tinggi yang dari posisi tersebut Mahmud Ghaznawi bisa memandang jelas seluruh dataran India utara, dan memudahkannya memantau melalui lembah Kabul, sekaligus ini juga memberikan keuntungan baginya untuk melakukan rangkaian serangan ke sebelah Timur. Menurut Phillip K. Hitti, Mahmud Ghaznawiyah selama tahun 1001 sampai 1024 telah melakukan tujuh belas serangan ke India, yang di antaranya berhasil menduduki kawasan Punjab, dan pusat kotanya Lahore dari penguasa Multan dan Sind. Serangan ini memberikan ia kesempatan untuk menancapkan pengaruh Islam di sana. Catatan sejarah menunjukkan wilayah kekuasaannya meliputi India utara di timur dan Irak-Persia di barat, juga seluruh daerah Khurasan, Takaristan yang berpusat di Balkh, sebagian Transoxiana di utara, serta Sijistan di selatan.<sup>32</sup> Aksi penaklukan Mahmud Ghaznawi tersebut diperkuat oleh orang pribumi yaitu bangsa Khalji dalam jumlah besar dan didorong semangat jihad *fi sabilillah*, melihat besarnya jasa bangsa Khalji dalam perjuangannya maka Mahmud Ghaznawi memberikan mereka tanah di India. Hasil dari kebijakan ini maka selama 8 abad ribuan bangsa Afghan termasuk orang Khalji memasuki

---

*sayyid* (kepala). Inilah prestasi penguasa dari Turki dalam catatan sejarah Islam.

<sup>31</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 10.

<sup>32</sup> Phillip K. Hitti, *History.*, hal. 589-590.

berbagai wilayah di India dan menempati daerah tersebut secara permanen.<sup>33</sup>

Izzud Muhammad Ghuri wafat pada tahun 1206 M namun ia tidak memiliki anak laki-laki termasuk juga tidak ada yang menggantikannya dari Ghur untuk menguasai tahta Delhi. Selain itu Muhammad Ghuri telah memberikan *letter of manumission* (merdeka dari perbudakan) kepada bekas budak (ia adalah keturunan Turki) sekaligus menantuninya dan panglima perangnya yaitu Qutub al-Din Aybek (1206-1210 M), maka ia naik menggantikan Muhammad Ghuri sebagai pemimpin di Delhi pada tahun tersebut.<sup>34</sup> W. W. Hunter dalam karyanya *A Brief History of The Indian Peoples* menyebutkan pemerintah Qutub al-Din Aybek (1206 M) sebagai awal dari pemerintahan budak (*slave kings/chiefly Turki*) sampai pada Balban dan Kaikubad (1290 M).<sup>35</sup> Qutub al-Din Aybek mampu menguasai India dari Sind hingga Bengal, dan ia mendirikan sebuah masjid di pusat kota Delhi yang diberi nama *Kutab Mosque* (Masjid Kutab/Qutub) dan sebuah menara yang diberi nama *Kutab Minar* (Menara Kutab/Qutub) yang diambil dari namanya sendiri,<sup>36</sup> namun M. A. Karim mengatakan bahwa nama masjidnya adalah *Quwat al-Islam* dan nama menara yang besar bernama *Qutub Minar* yang diambil dari nama guru spiritualnya, seorang ulama besar dan sufi dari tarekat Chistiyah yaitu Qutub al-Din Bakhtiar

<sup>33</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 10.

<sup>34</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), hal. 261.

<sup>35</sup> Sir William Wilson Hunter, *A Brief History of The Indian Peoples*, (Oxford: The Clarendon Press, 1893), hal. 109.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 119.

Ka'ki.<sup>37</sup>

Setelah Qutub al-Din Aybek wafat, pemerintahan dikendalikan oleh Iltutmish atau Altamsh (1211-1236 M)<sup>38</sup> yang mana ia harus menghadapi tiga persoalan penting yang diwariskan oleh mertuanya Qutub al-Din Aybek yaitu pemberontakan dari pejabatnya sendiri di pemerintahan (jenderal muslim dan gubernur di propinsi yang tidak puas), pemberontakan dari orang Hindu dan serangan bangsa Mongol dari Asia tengah.<sup>39</sup> Iltutmish yang memiliki ayah bernama Yalam Khan ini merupakan mantan budak keturunan Turki yang dibeli dan dibebaskan oleh Qutub al-Din Aybek,<sup>40</sup> kemudian dinikahkan dengan putrinya dan diberi posisi sebagai gubernur di Badaun pada masa Aybek.<sup>41</sup> Iltutmish yang bergelar *Sultan Syamsu al-Dunya wa al-Din Abu al-Muzaffar* Altamsh dalam menjalankan pemerintahannya mampu menjaga India dari serangan bangsa Mongol pimpinan Chengis Khan walaupun negeri di sekitarnya hancur akibat serangan tersebut.

Setelah Iltutmish wafat pada 1236 M, pemerintahan

<sup>37</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran.*, hal. 262.

<sup>38</sup> M. A. Karim mengatakan bahwa Qutub al-Din Aybek wafat 1210 M dan digantikan oleh putranya Aram Shah (1210-1211 M), namun ia tidak cakap dalam memimpin pemerintahan. Posisi kepemimpinan kemudian digantikan oleh Iltutmish (1211 M-1236 M) itulah mengapa W. W. Hunter menyebut Iltutmish sebagai *the third and greatest Sultan of the Slave Dynasty* walaupun dalam catatan sejarah lain Aram Shah tidak disebutkan sebagai sultan yang menggantikan ayahnya Qutub al-Din Aybek.

<sup>39</sup> Sir William Wilson Hunter, *A Brief History.*, hal. 119.

<sup>40</sup> IL Musannif, *The Romantic Land of Hind*, (London: W. H. Allen & Co, 1882), hal. 137.

<sup>41</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran.*, hal. 262.

dipimpin oleh *putrinya* Raziya<sup>42</sup> dengan alasan semua anak laki-lakinya tidak ada yang mampu. Para pembesar istana banyak yang tidak setuju sehingga Rukunuddin Firuz diangkat sebagai sultan. Ternyata Rukunuddin Firuz tidak mampu memegang kendali pemerintahan<sup>43</sup> sehingga Raziya diangkat menjadi sultan lagi.<sup>44</sup> Razia sebagai sultan yang baru menjalankan pemerintahan sebagaimana sultan laki-laki, ia menerima tamu dan berdiskusi dengan mereka, menjalankan dan menata hukum dengan tegas serta mereformasi segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan keras, tetapi *khalifah* di Baghdad tidak menghendaki perempuan memimpin kesultanan dan para pembesar istana banyak yang iri serta melakukan perlawanan terhadapnya. Razia terpaksa melawan mereka dalam 2 peperangan dahsyat, akan tetapi akhirnya ia terbunuh dalam perang tersebut setelah tiga setengah tahun (pertengahan tahun 1236-1240 M) memimpin Delhi.<sup>45</sup>

Setelah meninggalnya Sultan Razia pada tahun 1240 M, maka kepemimpinan diserahkan kepada putra Iltutmish yang

---

<sup>42</sup> Menurut Sir W. W. Hunter dalam *A Brief History of The Indian Peoples*, Sultan Raziya memimpin Delhi dari tahun 1236-1239 M bukan sampai 1240 M.

<sup>43</sup> Menurut John Clark Marshman dalam *The History of India: From The Earliest Period to The Close of Lord Dalhousie's Administration*, setelah Iltutmish wafat maka putranya Rukunuddin Firuz menggantikan kepemimpinan di Delhi namun ia langsung dipecat oleh para pembesar istana setelah 6 bulan kepemimpinannya (awal samapi pertengahan tahun 1236). Tahta Delhi kemudian diserahkan kepada *putri* Iltutmish yaitu Raziya dengan gelar sultan bukan sultana.

<sup>44</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran.*, hal. 263.

<sup>45</sup> John Clark Marshman, *The History.*, hal. 50.

lain yaitu Bahram Shah (1240-1246 M), namun ia bukanlah pemimpin yang hebat sehingga kepemimpinan diserahkan Nasiruddin (1246-1266 M)<sup>46</sup> yang merupakan pamannya (adik Iltutmish). Nasiruddin merupakan sultan yang saleh dan paling baik pribadinya di antara para penguasa abad 13 M, yang mana ia memiliki kebiasaan menulis al-Qur'an dan menjahit topi pada waktu senggang serta tidak mau menerima satu sen pun uang negara sebagai gaji.<sup>47</sup> Setelah sultan yang saleh ini wafat kepemimpinan diserahkan kepada Ghiasuddin Balban (1266-1287 M)<sup>48</sup> yang merupakan perdana menterinya sekaligus menantu Iltutmish dan bukan kepada keturunan Nasiruddin sendiri dikarenakan ia tidak memiliki keturunan laki-laki.<sup>49</sup>

Sultan Balban dalam memimpin Delhi memiliki kekuatan yang besar. Ia mempercayai pasukan dari Afghan salah satunya adalah orang Khalji, dan juga memilih salah satunya yaitu Jalaluddin Khalji sebagai jenderal untuk memimpin pasukan ini. Balban meninggal dunia pada tahun 1287 dan ia berkehendak penggantinya memimpin Delhi adalah Bughra Khan, namun

<sup>46</sup> Menurut John Clark Marshman, kepemimpinan setelah Sultan Razia mengalami pergantian selama 2 kali dan salah satunya menurut M. A. Karim adalah Bahram Shah. Kepemimpinan Bahram Shah lemah sehingga diganti oleh Nasiruddin yang merupakan cucu Iltutmish (*a grandson of Altumsh*) yang mana ketika memimpin Delhi ia mengangkat Balban (menantu Iltutmish) sebagai perdana menterinya (*chief minister*).

<sup>47</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran.*, hal. 263-264.

<sup>48</sup> Menurut Sir W. W. Hunter dalam *A Brief History of The Indian Peoples*, sultan Balban merupakan sultan terakhir dari keturunan Turki mantan budak, yang mana ia memerangi dengan keras orang Mongol, bangsawan/pejabat India yang liar, dan Rajput.

<sup>49</sup> John Clark Marshman, *The History.*, hal. 51.

Bughra Khan yang saat itu menjadi pemimpin di Multan (*Khan of Multan*) yang merupakan wilayah bagian kekuasaan Balban tidak mau dan tidak peduli masalah pergantian kepemimpinan di Delhi. Ziauddin Barani pengarang *Tarikh-e-Firuz Shahi* mengatakan bahwa sultan Balban mengirim surat panjang kepada Bughra Khan berisi permohonan kepada putranya tersebut sekaligus kekhawatiran Balban agar jangan sampai dua orang cucunya yaitu Kaikhusru dan Kaikobad (2 putra Bughra Khan) diberi posisi menggantikan Balban dikarenakan mereka masih sangat muda dan belum banyak pengalaman dalam pemerintahan. Dikarenakan tidak ada tanggapan dari putranya Bughra Khan, akhirnya Balban memberikan pesan terakhir tiga hari sebelum kematiannya kepada Malikul Umara *Kotwal* di Delhi, Khwaja Husain Basri *wazir*-nya, dan beberapa pembantu serta orang kepercayaannya untuk mengangkat Kaikubad (bergelar Muizzuddin Kaikubad) menjadi sultan di Delhi menggantikannya walaupun masih memendam kekhawatiran akan kemampuan cucunya tersebut.<sup>50</sup> Kekhawatiran Balban ternyata terbukti, ketidakmampuan cucunya tersebut ternyata justru menyebabkan banyak para pejabat atau pembesar istana banyak yang tidak puas atas kepemimpinannya, sehingga mereka bersepakat menjatuhkannya.<sup>51</sup> Sejarawan Sir W. W. Hunter menyebutkan bahwa Kaikubad diracun dan para dokter tidak tahu apa penyakit yang diderita oleh Kaikubad.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> H. M. Elliot, *The History of India as Told by Its Own Historians*, (London: Turbner & Co, 1869), III: 122-124.

<sup>51</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran.*, hal. 264.

<sup>52</sup> Kaikubad dibenci oleh dua orang pejabat senior yang telah menjabat sejak pemerintahan Balban yaitu Malik Nizamuddin dan Malik

Keadaan pada saat terakhir pemerintahan Kaikubad memang banyak terjadi kekacauan internal yang muncul terkait permasalahan siapa yang berhak menjadi pengganti Kaikubad yang saat itu tidak ada harapan lagi untuk sembuh, sehingga kedamaian dan keamanan hilang di dalam negeri. Selain itu juga tidak ada seorang pun bangsawan Turki yang mampu menjaga pemerintahan ini dari perpecahan.<sup>53</sup> Akhirnya pangeran yang paling muda dinobatkan di atas tahta kesultanan dengan gelar Sultan Shamsuddin<sup>54</sup> dan pos kunci (pos penting) diserahkan kepada pihak lain.<sup>55</sup> Sementara itu para bangsawan Turki memutuskan untuk mengakhiri semua pengaruh para bangsawan yang bukan dari bangsa Turki. Mereka kemudian membuat daftar nama pejabat di luar mereka yang dapat dikorbankan, dan nama Jalaluddin Khalji berada di urutan yang paling atas. Langkah ini membuat semua orang Khalji berkumpul disekitar Jalaluddin Khalji dan mereka diikat dalam perjanjian untuk tetap setia dan bersatu pada suku mereka yaitu Khalji, tempat mereka melakukan rapat adalah di Baharpur. Saat di Baharpur mereka membahas perkembangan kekuatan bangsawan Turki dan mereka akhirnya bersepakat untuk mendukung Jalaluddin. Sultan Kaikubad

---

Kiwamuddin, yang mana mereka mereka lebih bijaksana, memiliki kemampuan dan paling mampu dibandingkan Kaikubad yang masih kecil. Malik Nizamuddin semakin marah kepada Kaikubad tatkala ia hendak disingkirkan dari Delhi untuk ditugaskan ke Multan, sehingga Malik Nizamuddin memasukkan racun ke dalam minuman sang sultan muda tersebut: Sir William Wilson Hunter, *A Brief History*., hal. 121.

<sup>53</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life*., hal. 12-13.

<sup>54</sup> Nama asli putra Kaikubad itu adalah Kaimus yang masih berumur tiga tahun: M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran*., hal. 264.

<sup>55</sup> H. M. Elliot, *The History of India*., III: 134.

meninggal dunia akhirnya wafat pada tahun 1289 M, setelah itu Jalaluddin masuk ke Kilogiri dan ia dinobatkan sebagai Sultan Delhi dengan penampilan dan pertunjukkan yang meriah.<sup>56</sup> Dengan jalan ini, orang Khalji kemudian mampu menyingkirkan orang Turki sekaligus ini merupakan babak akhir kekuasaan Turki dan babak baru bagi orang Khalji memimpin India.

Jalaluddin Khalji naik tahta Delhi pada tahun 688 H/1289 M pada usia 70 tahun, namun penobatannya di Kilogiri bukan di Delhi.<sup>57</sup> Ia memimpin Delhi dengan gelar *Sultan al-Halim Jalalu al-Dunya wa al-Din Firuz Shah Khalji* dan menjalankan pemerintahan hanya selama enam tahun (1290-1296 M) atau tujuh tahun (1289-1296 M). Jalaluddin memiliki 3 putra, yang tertua memiliki gelar *Khan-e-Khanan*, putra kedua Arkali Khan dan yang termuda Kadar Khan.<sup>58</sup> Jalaluddin memiliki saudara yang bergelar Yaghrish Khan<sup>59</sup>, putra Yaghrish Khan adalah

<sup>56</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 13.

<sup>57</sup> Sejarahwan Barani mengatakan, bahwa penduduk Delhi telah 80 tahun sudah terbiasa dipimpin oleh keturunan Turki sehingga belum bisa menerima kepemimpinan selain keturunan Turki. Namun akhirnya setelah Jalaluddin dinobatkan menjadi sultan yang baru maka para pejabat, bangsawan, kaum terpelajar, pegawai pemerintah, dan penduduk mau menerima Jalaluddin masuk ke Delhi dan memberikannya jubah kebesaran. Menurut Amir Khusru dalam *Miftahul Futuh*, Jalaluddin naik tahta pada tahun 689 M, sebaliknya sejawaran Firishta mengatakan tahun 687 M: H. M. Elliot, *The History of India.*, hal. 136.

<sup>58</sup> Penulis belum menemukan nama asli dari putra tertua (*the eldest son*) sultan Jalaluddin, sedangkan putra keduanya Arkali Khan menjadi gubernur di Multan, dan putra yang paling muda bernama Ruknuddin Ibrahim yang kelak menggantikan posisi sultan di Delhi dalam usia yang masih sangat muda: Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 28.

<sup>59</sup> Yaghrish Khan mungkin bernama asli Shahabuddin Khalji,

Alauddin Khalji dan Ulugh Khan. Kedua putra Yaghrish Khan tersebut kemudian dijadikan menantu oleh Jalaluddin sekaligus diberikan posisi penting<sup>60</sup> di dalam pemerintahannya.<sup>61</sup> Menurut catatan Nizamuddin penulis *Tabqat-e-Akbari*, Jalaluddin Khalji merupakan cucu dari Qalij Khan, sedangkan Qalij Khan adalah salah satu menantu dari Chengis Khan. Qalij Khan menetap di negeri dataran tinggi Ghur dan Gurjistan setelah Khawarizm Shah<sup>62</sup> ditaklukkan oleh Chengis Khan.<sup>63</sup>

Jalaluddin merupakan sosok pemimpin yang memiliki karakter lemah lembut, bijaksana, dan adil. Karakter Jalaluddin ini terlihat saat ia memberikan Malik Chajju<sup>64</sup> pengampunan padahal ia adalah seorang pemberontak, bahkan Jalaluddin mengadakan makan bersama dan menyambutnya dengan

---

ia memiliki putra bernama Alauddin Khalji. Shahabuddin Khalji sendiri adalah saudara Jalaluddin Khalji: *Ibid.*, hal. 23.

<sup>60</sup> Sultan Jalaluddin memberikan Alauddin posisi sebagai *Amir-e-Tuzk* dan saudaranya Ulugh Khan diberikan posisi *Akhur-Beg*: *Ibid.*, hal. 23.

<sup>61</sup> H. M. Elliot, *The History*, hal. 137.

<sup>62</sup> Kepemimpinan Khawarizm Shah dipegang oleh putranya Jalaluddin Ibn Khawarizm Shah, ia berhasil dikalahkan oleh Chengis Khan sehingga pasukan Chengis Khan berhasil menguasai Ghaznah. Sedangkan pasukan Jalaluddin Ibn Khawarizm Shah melarikan diri dan mengarungi laut menuju India. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620 H / 1223 M: M. Sayyid al-Wakil, *Wajah Dunia Islam; Dari Dinasti Bani Umayyah hingga Imperialisme Modern*, alih bahasa Fadhli Bahri, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), hal. 250.

<sup>63</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life*, hal. 15.

<sup>64</sup> Malik Chajju adalah keponakan dari sultan Balban yang tidak puas atas kepemimpinan Jalaluddin karena faktor ia bukan berasal dari bangsa Turki, akhirnya melakukan pemberontakan pada tahun kedua pemerintahan Jalaluddin Khalji.

keramahtamahan yang luar biasa. Sikap Jalaluddin yang toleran terhadap pemberontak ini membuat para pejabat dari bangsa Khalji yang lain tidak senang dan cenderung menganggap Jalaluddin sudah tidak mampu lagi memimpin kesultanan Khalji. Kebijakan Jalaluddin lain yang semakin dianggap kurang populis oleh pejabat dari bangsa Khalji adalah ketika ia menghentikan pengepungan benteng Ranthambor dengan alasan untuk mengurangi jumlah pasukannya yang tewas, karena nyawa lebih berharga dari pada benteng tersebut.<sup>65</sup> Faktor usia Jalaluddin inilah yang mungkin membuat ia tidak berkeinginan bertindak keras kepada siapa pun, ini dapat dilihat dari perkataan Jalaluddin sendiri ketika penasihatnya Malik Ahmad Chap memintanya untuk tegas terhadap segala pemberontakan terutama kepada Malik Chajju:<sup>66</sup>

*Oh Ahmad, I am aware of what you say. I have seen the punishment of rebellion before you saw it, but what can I do? I have grown old among Musulmans, I am not accustomed to spill their blood, My age exceeds seventy, and I have never caused one to be killed; shall I now, in my old days, for the short life that remains, which has never continued to others and will not be prolonged for me, act against the principles of the law and bring Muhammadans to the block?*

Malik Chajju dan para pengikutnya yang mendapatkan pengampunan dari Jalaluddin akhirnya pergi ke Kara menjadi

---

<sup>65</sup> K. Ali, *History of India, Pakistan, and Bangladesh*, (Dhaka: Ali Publications, 1980), hal. 68.

<sup>66</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal. 140.

pelayan gubernur Kara yang saat itu dipimpin oleh Alauddin Khalji (menantu dan keponakan Jalaluddin Khalji). Bebasnya Malik Chajju inilah yang menjadikan banyak pihak lain yang tidak puas atas kepemimpinan Jalaluddin semakin berani menampakkan ketidak patuhan mereka pada pemerintah pusat di Delhi, dan kebanyakan dari mereka adalah para *jagirdar* dan *zamindar* di wilayah bagian kesultanan Khalji. Oleh sebab itulah pemerintahan Jalaluddin menjadi pemerintahan yang penuh dengan pemberontakan, kekacauan dan kriminalitas baik bidang ekonomi, politik dan keamanan akibat ketidak tegasan kepemimpinannya.<sup>67</sup>

Sultan Jalaluddin sebenarnya adalah seorang yang sangat berani tetapi karena umurnya sudah tua, maka ini yang menyebabkan fisik dan mentalnya lemah. Pada saat yang sama keinginannya untuk mencari kekayaan seperti harta rampasan perang masih besar dan faktanya memang saat itu kas negara di Delhi sedang kosong, berdasarkan fakta inilah Sultan Jalaluddin selalu memberikan peluang kepada Alauddin untuk menaklukkan negara-negara yang ada di sekitar wilayah kekuasaannya seperti Bhilsan dan Deogir.<sup>68</sup> Penaklukkan Bhilsan oleh Alauddin pada tahun 1292 M<sup>69</sup> telah direstui Jalaluddin

<sup>67</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 33.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 37.

<sup>69</sup> Setelah menaklukkan Bhilsan (ibukotanya adalah Malwa), Alauddin mendapatkan jabatan baru sebagai *Ariz-e Mamalik* yang mengatur Kara termasuk juga Oudh. Saat penaklukkan Bhilsan, ia mendengar bahwa kota Deogir (ibukota dari Yadava) memiliki kekayaan dan gajah yang banyak. Alauddin menaklukkan Deogir tanpa memberitahunya kepada Sultan Jalaluddin: H. M. Elliot, *The History.*, hal. 148.

sebelum berangkat,<sup>70</sup> namun selanjutnya dalam penaklukan Deogir Alauddin melakukannya tanpa restu dari Sultan Jalaluddin yang seharusnya menurut administrasi kenegaraan seorang pejabat di bawah Sultan harus meminta izin sebelum melaksanakan tugas kepada pejabat yang lebih tinggi posisinya terutama kepada Sultan. Peristiwa inilah yang membuat Alauddin menjadi takut pergi ke Delhi untuk memberikan laporan kepada Sultan karena keberangkatannya ke Deogir tanpa izin dari Sultan.<sup>71</sup> Alauddin akhirnya pulang ke Kara, sehingga inilah yang memunculkan spekulasi opini terhadap dirinya berusaha untuk memberontak kepada Sultan di Delhi sebagaimana ungkapan Malik Ahmad Chap kepada Sultan Jalaluddin tatkala mendengar berita kemenangan Alauddin di Deogir. Malik Ahmad Chap saat itu mengusulkan agar Sultan Jalaluddin menemui rombongan pasukan Alauddin dan merampas harta *ghanimah*-nya sebelum mereka masuk ke Kara yaitu di Chanderi, menurutnya Alauddin dapat menjadi orang yang mabuk kekuasaan karena ia memiliki harta rampasan perang yang banyak<sup>72</sup> dan penasihatnya adalah seorang mantan pemberontak yang selalu berada di sisinya.<sup>73</sup>

Berita kemenangan Alauddin Khalji di Deogir telah sampai di telinga Sultan Jalaluddin saat berada di Gawalior, kemudian ia segera memutuskan sikap untuk kembali ke Delhi akan

---

<sup>70</sup> H. G. Keene, *History of India*, (Edinburgh: John Grant, 1906), I: 54.

<sup>71</sup> J. C. Powell Pric, *A History of India*, (Toronto: Thomas Nelson & Sons, 1955), hal. 134.

<sup>72</sup> Alexander Dow, *The History of Hindostan*, (London: A. Wilson, 1803), I: 266.

<sup>73</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 26.

tetapi dalam perjalanan ke Delhi yaitu di Kilogiri ia berubah pikiran untuk menemui Alauddin dengan tidak menghiraukan nasihat Malik Ahmad Chap.<sup>74</sup> Sultan Jalaluddin berangkat ke Kara melintasi sungai Gangga tanpa pengawalan pasukan yang banyak,<sup>75</sup> karena dalam pikirannya sebagaimana dijelaskan Almas Beg (saudara Alauddin) bahwa Alauddin merasa bersalah karena aksi penaklukkannya di Deogir tanpa restu dari Sultan sehingga ia harus pergi ke Kara pada bulan Ramadhan.<sup>76</sup>

Setelah melalui perjalanan jauh dan melintasi sungai, maka Jalaluddin memerintahkan pasukannya untuk berada di tepi sungai dan tidak mengikutinya masuk ke perkemahan Alauddin. Jalaluddin masuk ke dalam perkemahan Alauddin sendiri tanpa pengawalan, kemudian Alauddin menemuinya dengan penuh hormat bahkan ia bersujud di telapak kaki pamannya tersebut. Jalaluddin membuka percakapan dengan memberikan pujian kepada Alauddin sebagai Ali Kameezi sebagaimana ungkapan sejarawan Barani:

*The Sultan slapped Ala-ud-Din on his cheeks with love  
and addressed him as Ali Kameezi and talked with him in*

---

<sup>74</sup> Ahmad Chap mengusulkan untuk menghadang pasukan Alauddin di Chanderi sebelum mereka sampai Kara dan merampas harta *ghanimah* yang dibawanya, jika Sultan memaksa untuk pergi ke Kara maka Ahmad Chap mengusulkan untuk membawa pasukan yang banyak untuk melindungi Sultan.

<sup>75</sup> H. G. Keene, *History of India*, (Edinburgh: John Grant, 1906), I: 55.

<sup>76</sup> Ketakutan Alauddin terhadap Jalaluddin atas aksi penaklukan Deogir tanpa izin darinya tertulis dalam surat Alauddin kepada Almas Beg (Ulugh Khan) yang ditunjukkan kepada sultan Jalaluddin selama perjalanan ke Kara: H. M. Elliot, *The History*., hal. 152.

*greet kindness. Then he caught hold of Ala-ud-Din's hand and took him towards his own personal yacht. Thus going he asked Ala-ud-Din as to why he was afraid of him and told him that it had filled his heart with sorrow. At the moment when Sultan Jalal-ud-Din pulled Ala-ud-Din towards himself by the hand the latter gave a signal to those cruel traitors who had been prepared to commit the murder and the deed was done.*<sup>77</sup> (Sultan menempelkan Alauddin pada pipinya dengan kasih sayang dan menjulukinya sebagai Ali Kameezi dan berbincang dengan Alauddin dalam suka cita. Kemudian Sultan memegang tangan Alauddin dan mengajaknya (menariknya) menuju kapal pribadinya. Selanjutnya Sultan bertanya kepada Alauddin mengapa ia menjadi takut kepada Sultan dan mengatakan kepada Alauddin bahwa itu telah membuat hati Sultan sedih. Pada saat Sultan memeluk Alauddin dengan tangannya, orang di dekat (Alauddin) memberikan sebuah tanda kepada orang yang telah dipersiapkan untuk melakukan tindakan pengkhianatan kejam ini dan akhirnya tindakan pelanggaran hukum ini pun terjadi.)

Sejarawan Barani menyebutkan bahwa pembunuh Sultan Jalaluddin adalah 2 orang pengawal Alauddin yaitu Muhammad Salim dan Ikhtiyaruddin sekaligus memenggal kepala Sultan Jalaluddin, dan pembunuhan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadhan.<sup>78</sup> Peristiwa pembunuhan ini memunculkan

---

<sup>77</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 37-38.

<sup>78</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal. 156.

perbedaan opini di antara sejarawan, Barani<sup>79</sup> dan sejarawan lain mengatakan bahwa Alauddin telah melakukan konspirasi untuk membunuh pamannya sendiri,<sup>80</sup> namun Ghulam Sarwar Khan<sup>81</sup> justru menyebutkan bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena kesalahan pengawal Alauddin ketika memahami maksud dari tindakan sultan Jalaluddin yang memeluk Alauddin dan percakapan yang mereka berdua lakukan.<sup>82</sup>

Berita pembunuhan atas sultan Jalaluddin menyebar dengan cepat di kalangan pejabat dan bangsawan Khalji di Delhi, pejabat yang memegang kendali kekuatan Delhi Ahmad Chap yang sebelumnya menemani sultan Jalaluddin di Gawalior segera kembali ke Delhi dan melakukan pengamanan ketat terhadap istana. Istri sultan Malika Jahan tanpa meminta pertimbangan kepada pihak manapun termasuk putra tertuanya Arkali Khan yang saat itu berada di Multan segera mengangkat putra sultan yang paling muda Rukunuddin Ibrahim menjadi sultan. Rukunuddin Ibrahim yang masih sangat muda ini tidak memiliki pengetahuan tentang dunia politik, sehingga

<sup>79</sup> Ziauddin al Barani (1285-1357) adalah seorang pemikir/teoritisasi Islam pertama yang mengekspos dan berupaya memecahkan pandangan Islam dan Iran tentang pemerintahan. Ia adalah putra bangsawan. Ia menulis buku *Fatawa-yi jahandari* (bahasa Persia) saat mengabdikan pada Muhammad Ibn Tughluq dan buku *Tarikh-e-Firuz Shahi* tentang sejarah kesultanan di Delhi dan berisi nasihat: Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, alih bahasa Abdullah Ali, Cet. 1 (Jakarta: Serambi, 2006), hal. 300.

<sup>80</sup> H. M. Elliot, *The History*, hal. 152-155.

<sup>81</sup> Ghulam Sarwar Khan Niazi penulis *The Life and Works of Sultan Alauddin Khalji* yang merupakan hasil disertasi doctoral yang diterbitkan tahun 1992.

<sup>82</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life*, hal. 38-43.

ia termasuk orang yang dianggap belum mampu. Arkali Khan merasa tidak suka ketika mendengar berita adiknya diangkat menjadi sultan oleh Permaisuri Malika Jahan tanpa meminta pertimbangan darinya, karena kepemimpinan Delhi merupakan perkara penting sehingga ia merasa lebih berhak atas posisi tersebut karena sebagai putra tertua dan memiliki kemampuan yang lebih dari adiknya. Arkali Khan memutuskan untuk tidak datang ke Delhi dan tetap berada di Multan. Alauddin yang berada di Multan mendengar bahwa putra tertua sultan Arkali Khan tidak datang ke Delhi melihat bahwa ini merupakan kesempatan baginya untuk menguasai Delhi. Kondisi kekacauan pemerintahan setelah kematian sultan dan mental para pejabat yang tidak loyal menjadi faktor yang menguntungkan Alauddin, maka ia melakukan propaganda dengan memberikan uang dan emas yang dimilikinya dari Deogir kepada para *malik* dan *amir*. Langkah ini menuai hasil, yang mana para *amir* dan *malik* melupakan kesedihan atas terbunuhnya sultan jalaluddin dan sekaligus memberikan loyalitas mereka kepada Alauddin hanya dalam waktu 5 bulan saja. Sultan Rukunuddin Ibrahim, Permaisuri Malika Jahan, Ahmad Chap dan pejabat yang masih setia kepada sultan merasa terancam sehingga mereka memilih untuk melarikan diri ke Multan. Sebagian pejabat ada yang meninggalkan istri dan keluarganya kemudian mereka melarikan diri ke Multan. Alauddin mendengar berita ini segera melakukan perjalanan ke Delhi,<sup>83</sup> ia merasa tidak khawatir karena Arkali

---

<sup>83</sup> Menurut Amir Khusru, Alauddin menuju Delhi untuk naik tahta pada tanggal 22 Dzulhijjah 1295 M: H. M. Elliot, *The History.*, hal. 69.

Khan putra sultan Jalaluddin yang terkenal berani dan hebat dalam berperang tidak akan mau datang ke Delhi. Alauddin mengatur posisi di Delhi,<sup>84</sup> yang mana saudaranya diberi posisi penting seperti Ulugh Khan, Nusrat Khan, Zafar Khan dan Alap Khan. Pendukungnya yang lain dinaikkan pangkatnya dari sebelumnya *amir* menjadi *malik*, dari *malik* menjadi *khan* termasuk jabatan-jabatan lainnya. Alauddin juga memberikan mereka uang, kendaraan (kuda), dan pelayanan yang mereka kehendaki.<sup>85</sup>

Setelah posisinya aman di Delhi, Alauddin mengutus dua panglima pasukan terbaiknya Nusrat Khan dan Ulugh Khan ke Multan untuk mengejar Rukunuddin Ibrahim dan para pengikutnya serta menundukkan Arkali Khan yang secara politik akan menjadi pesaingnya. Akhirnya misi pasukan ini berhasil menundukkan Arkali Khan dan menangkap Rukunuddin Ibrahim serta pengikutnya.<sup>86</sup> Mereka semua dibawa ke Delhi kemudian dimasukkan dalam penjara, sedangkan kedua putra sultan Jalaluddin dibuat buta (*was blinded*) kedua matanya<sup>87</sup> dan ini terjadi tahun 1296 M.<sup>88</sup> Setelah penangkapan pesaingnya

---

<sup>84</sup> Alauddin naik tahta di Delhi pada tanggal 19 Juli 1296: R. C. Majumdar, *An Advanced History of India*, (London: Macmillan and Co, 1948), hal. 298-299.

<sup>85</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal. 156-158.

<sup>86</sup> K. Ali, *History of India, Pakistan, and Bangladesh*, (Dhaka: Ali Publications, 1980), hal. 70.

<sup>87</sup> Informasi lain menyebutkan bahwa Ahmad Chap dibutakan matanya, kedua putra sultan Jalaluddin dibunuh, dan Permaisuri dipenjara di dalam benteng Hansi: R. C. Majumdar, *An Advanced.*, hal. 299.

<sup>88</sup> J. C. PowellPric, *A History of India* (Toronto: Thomas

dalam politik, maka Alauddin merasa posisinya semakin kuat saat itu dan selanjutnya ia dapat fokus memperbaiki kondisi negara yang kacau setelah wafatnya sultan Jalaluddin. Sir. W. W. Hunter menilai perjalanan hidup Alauddin Khalji yang dimulai dari posisinya sebagai gubernur di Kara, lalu penaklukan Deogir yang tanpa izin dari sultan Jalaluddin dan terjadinya pembunuhan terhadap sultan serta diikuti oleh penangkapan kedua putra sultan adalah usaha yang sengaja direncanakan. Ia juga menilai bahwa penaklukan Deogir sudah direncanakan untuk memperkuat pasukannya dalam penyerbuan dan penaklukan Delhi selanjutnya.<sup>89</sup> Namun argumentasi ini dibantah oleh Ghulam Sarwar Khan dengan menyebutkan bahwa tujuan Alauddin menaklukan Deogir adalah bagian dari usahanya membantu sultan untuk mengisi kekosongan kas negara.<sup>90</sup>

Alauddin merupakan sosok yang dianggap memiliki ambisi besar, bahkan pada 3 tahun pertama pemerintahannya ia memiliki 2 ambisi besar yaitu ingin mendirikan agama baru (*a new religion*) seperti *Rasulullah* Muhammad dan menjadi penakluk dunia seperti Alexander kedua (*the second Alexander*).<sup>91</sup> Alauddin mengemukakan alasannya kepada Alaul Mulk karena Nabi Muhammad memiliki empat sahabat (*al-Khulafa al-Rasyidun*), ia juga memiliki empat orang sahabat yaitu Ulugh Khan, Zafar Khan, Nusrat Khan, dan Alap Khan. Alaul Mulk memberikan

---

Nelson & Sons, 1955), hal. 134.

<sup>89</sup> Sir William Wilson Hunter, *A Brief History.*, hal. 121.

<sup>90</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 37.

<sup>91</sup> Alexander Dow, *The History of Hindostan*, (London: A. Wilson, 1803), I: 280

masuk kepada Sultan, sebaiknya meninggalkan ambisi untuk menguasai dunia, lebih baik bekerja keras mencurahkan pemikirannya untuk membangun India. Alaul Mulk mengatakan bahwa Alexander Agung memiliki *wazir* yang pandai dalam bidang pemerintahan dan disiplin ilmu pengetahuan lain seperti Aristoteles, sedangkan Sultan Alauddin tidak memiliki *wazir* se pandai itu. Sementara itu jabatan kenabian tidak dimiliki oleh semua orang, tidak semua penguasa menjadi nabi, namun ada nabi yang menjadi penguasa seperti Muhammad SAW. Jabatan kenabian juga adalah mutlak hak Tuhan, maka jika Sultan masih berkehendak untuk menjadi nabi tentulah rakyat dan para Ulama akan meninggalkan Sultan.<sup>92</sup>

## B. KONDISI SOSIAL POLITIK DAN EKONOMI AWAL PEMERINTAHAN ALAUDDIN

Saat pertama kali Alauddin menjabat sebagai sultan, ia menemukan terdapat banyak masalah yang menghadang antara lain: pertama, bahwa pola kerja atau administrasi yang berjalan sangatlah tidak efektif. Kedua, pemerintahan yang harus dia pimpin ternyata penuh dengan pemberontakan.<sup>93</sup> Ini tidak lain

<sup>92</sup> Teks diskusi antara Alauddin dan Alaul Mulk terdapat pada buku *Tarikh-e-Firuz Shahi* karya Ziauddin Barani yang merupakan keponakan Alaul Mulk: H. M. Elliot, *The History*, hal. 168-169.

<sup>93</sup> Akat Khan seorang pengurus kuda berdarah Turki (putra dari saudara Sultan yang memiliki jabatan *Wakildar*) berusaha memberontak. Ia ingin membunuh Alauddin dengan cara memenggal leher Alauddin saat ia berada di tenda ketika sedang berburu di Til-pat dalam perjalanan untuk menaklukkan Rantambhor. Akhirnya Akat Khan dibunuh dengan dipenggal kepalanya dan Katlagh Khwaja (saudara Akat Khan) juga dibunuh. Pada saat yang sama, Umar Khan dan Mangu Khan terinspirasi

karena Sultan Jalaluddin adalah sosok yang sudah lanjut usia, memiliki karakter yang terlalu baik hatinya, sehingga terlihat tidak tegas, dan ia pun tidak mampu menahan gelombang besar yang sedang mencoba merobohkan kekuasaannya selama 7 tahun pemerintahannya, ini tidak lain karena kebijakan politiknya sangat lemah dan tidak tegas.

Ketika sultan Jalaluddin terbunuh, administrasi negara mengalami masa yang sangat lemah. Akhirnya posisi kepemimpinan ini diatur oleh Alauddin setelah sebelumnya melewati berbagai rintangan, sedangkan pangeran (putra mahkota) yaitu Arkali Khan yang seharusnya lebih diandalkan justru tetap berdiam di wilayah Multan.

Peralihan kepemimpinan dari Sultan Jalaluddin kepada Alauddin ternyata mampu meningkatkan pamor Sultan yang sebelumnya lemah dan menciptakan kedamaian di seluruh wilayah kekuasaan Delhi yang sebelumnya penuh pemberontakan. Apabila melihat kembali sejarah kesultanan ini, yang mana sejak orang Turki menjalankan pemerintahan di wilayah utara India selama hampir 1 abad sebelum dilanjutkan oleh orang Khilji, tidak pernah ada pejabat kecuali ia adalah keturunan Turki. Masyarakat Delhi akhirnya terbiasa dengan keturunan Turki, sehingga ketika atas konspirasi Akat Khan, mereka juga melihat peluang besar karena kepemimpinan di Delhi kosong ditinggalkan Alauddin pergi menaklukkan Rantambhor. Konspirasi untuk merebut kepemimpinan ini terdengar oleh Alauddin, ia mengutus dua pejabatnya selama dalam perjalanan ke Rantambhor untuk menggagalkannya. Akhirnya Umar Khan dan Mangu Khan berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Alauddin yang sedang berada di Rantambhor. Indera penglihatan kedua orang tersebut dibutakan sebagai hukumannya: H. M. Elliot, *The History*, hal. 172-175.

mereka menghadapi pergantian kepemimpinan Delhi kepada orang Khalji dianggap sebagai tindakan perampasan kekuasaan. Mungkin inilah alasan mengapa penobatan Jalaluddin menjadi Sultan dilakukan di Kiloghiri dan bukan di Delhi.<sup>94</sup>

Penobatan Alauddin menjadi Sultan Khalji ternyata berhasil mendapatkan dukungan dari para pejabat pada masa kepemimpinan Jalaluddin Khalji (disebut pejabat *Jalal/Jalali Nobles*) tetapi itu karena Alauddin membagi-bagikan uang, emas, serta menawarkan jabatan yang tinggi kepada mereka. Walaupun demikian di sana masih ada sejumlah *Jagirdar* Muslim dan *Zamindar* Hindu<sup>95</sup> yang belum menerima kepemimpinannya karena memandang Alauddin bukan berdarah Turki.<sup>96</sup>

Bila melihat fakta pola administrasi di wilayah Kesultanan Khalji akan tergambar bahwa seberapa besar wilayah negara diserahkan pengelolaannya kepada para *Jagir*, *'Auqaf*, *'Imlak*, dan *'Inam*. Pola administrasi seperti ini ternyata memiliki andil besar menurunkan pendapatan negara yang luar biasa banyak dan juga telah membuat para *Jagirdar* memiliki kekuatan yang

---

<sup>94</sup> K. Ali, *History.*, hal. 68.

<sup>95</sup> Haji, seorang *maula* Hindu atau pembantu dari *kotwal* yang terakhir *Amir al-Umara* Fakhruddin yang suka membuat kekacauan, memiliki karakter pemberani, dan keras berusaha melakukan pemberontakan yang mana ia didukung oleh pejabat bendahara negara. Ia melihat kekosongan kepemimpinan dan pasukan di Delhi ketika Sultan Alauddin dan pasukannya pergi menaklukkan Rantambhor. Haji Maula bersama pasukannya berhasil naik ke tahta hanya 7 atau 8 hari saja, kemudian pemberontakannya bisa diredam oleh Malik Hamiduddin seorang *Amir* di Koh yang dibantu oleh pasukan Zafar Khan: H. M. Elliot, *The History.*, hal. 175.

<sup>96</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 45.

besar seperti memiliki pasukan karena memang gaji tentara di wilayahnya menjadi tanggungan para *Jagirdar* dan pejabat di sana. Pola administrasi ini sangat memungkinkan bagi mereka membuat ancaman terhadap sultan di Delhi setiap saat. Oleh sebab itu kemungkinan loyalitas mereka kepada sultan yang baru juga masih dipertanyakan karena memang faktanya mereka semua juga adalah pejabat dari era Sultan Jalaluddin.<sup>97</sup>

Berdasarkan kajian atas fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan ini masih banyak kelemahan, dan ini memang terbukti yang mana para *zamindar* Hindu hidup semaunya sendiri dan menolak membayar *kharaj* dan *jizyah*.<sup>98</sup> Hal ini beralasan karena pola administrasi seperti di atas memberikan kebebasan kepada para pejabat di daerah untuk mengatur sendiri wilayahnya, sehingga memberi peluang bagi para *zamindar* Hindu ini bebas berbuat semaunya yang berdampak pada berkurangnya pemasukan bagi kas negara dan muncul banyaknya ketidakpatuhan terhadap pemerintahan pusat.

Di sisi lain yang harus dihadapi Alauddin di awal jabatannya adalah adanya serangan orang-orang Mongol di bagian utara India yang terjadi setiap tahun.<sup>99</sup> Mereka membunuh puluhan ribu orang penduduk dan membawa sebagian dari penduduk untuk dijadikan budak, dan diperjualbelikan di Asia Tengah. Mereka menghancurkan lahan pertanian dan membakar

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> J. C. Powell Pric, *A History.*, hal. 136.

baik desa maupun kota.<sup>100</sup> Mereka juga mencuri ternak yang merupakan kekayaan milik negara. Kemudian serangan orang Mongol ini berlangsung hingga akhir pemerintahan dinasti Khilji di India. Tercatat serangan Bangsa Mongol secara berurutan yang terjadi antara tahun 1297 M sampai 1307 M telah terjadi 7 kali, yang mana pada tahun kedua pemerintahan Alauddin ada sebuah kelompok besar bangsa Mongol datang dipimpin Amir Daud tetapi dapat dikalahkan oleh pasukan Alauddin di bawah pimpinan Zafar Khan yang akhirnya menelan banyak korban jiwa. Selanjutnya bangsa Mongol datang kembali di bawah pimpinan Saldi dan mampu dihadang oleh pasukan di bawah komando Zafar Khan. Pada tahun 1299 M dengan serangan bangsa Mongol datang di bawah komando Qutlugh Khwaja disertai 200.000 personel tentara juga dapat dikalahkan oleh Zafar Khan, namun Zafar Khan terbunuh. Empat tahun kemudian yaitu tahun 1304 M pasukan Mongol di bawah pimpinan Ali Begh keturunan Chengis Khan dan Tartaq dengan 20 – 40 ribu tentara berkuda menyerang Amroha tetapi dapat dikalahkan. Pada tahun 1306 M serangan bangsa Mongol di bawah komando Kabk menyerang Multan dan berhasil merampok namun dikalahkan pasukan Alauddin di bawah komando Tughluq Ghazi. Serangan Mongol terjadi kembali tahun 1307 M dan 1308 M di bawah komando Iqbalmand yang juga dapat dikalahkan.<sup>101</sup>

Banyaknya serangan bangsa Mongol tersebut akhirnya menjadi penyebab munculnya kekuatan yang tidak puas terhadap pemerintahan sultan yang baru semakin menguat dan

---

<sup>100</sup> Alexander Dow, *The History.*, hal. 275.

<sup>101</sup> K. Ali, *History.*, hal. 70-71.

membesar, sehingga muncul banyak kerusuhan di dalam negeri salah satunya adalah karena faktor ketidakpuasan dari para pemimpin Hindu (*Hindu Chiefs*), atau karena kecemburuan di antara para *amir* dan *malik*, serta kekuatan para perampok yang mana mereka semua merasa telah menemukan momentumnya saat itu. Sebagai akibat dari permasalahan politik ini membuat kegiatan perdagangan dan pertanian lumpuh total. Ini beralasan karena serangan-serangan yang sering dilakukan bangsa Mongol tersebut telah membatasi secara total jalur perdagangan ke Asia Tengah. Akumulasi permasalahan dalam negeri seperti lumpuhnya kegiatan perdagangan dan pertanian, terjadinya pemberontakan di dalam negeri, dan lemahnya kekuasaan pemerintah pusat atas wilayah kekuasaannya, ternyata telah berakibat juga pada masalah ketersediaan bahan makanan dan bahan-bahan pokok lainnya yang mana bahan makanan pokok menghilang di pasaran dan barang kebutuhan lain semuanya menjadi mahal. Keadaan ini pun akhirnya mengarahkan pada banyaknya tindakan penimbunan dan munculnya pasar gelap (*black market*), yang mana keadaan ini hanya membuat orang kaya bertambah kaya dan sebaliknya orang miskin bertambah miskin. Sebagaimana diungkapkan Ghulam Sarwar Khan ketika menggambarkan kondisi tersebut: “*this led to hoarding and black marketing, which added to the wealth of the rich but made the poor almost paupers*”.<sup>102</sup>

Permasalahan di dalam negeri yang sudah sedemikian parah ini ternyata semakin bertambah berat tatkala kondisi moral masyarakat juga menurun yang mana kondisinya sebelum

<sup>102</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 45.

Alauddin memimpin seolah-olah dibiarkan rusak karena sikap pemerintah di Delhi tidak tegas.

Fakta lain yang juga menunjukkan bahwa kegiatan administrasi negara berjalan sangat tidak efisien dan cenderung sangat boros, wilayah provinsi ke gubernuran berjalan *semi-independent* dan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap instruksi dan aturan dari pemerintah pusat. Administrasi untuk urusan publik juga lumpuh total. Negara tidak dapat menghasilkan pendapatan untuk mengisi kas negara dan tidak juga dapat menjalankan langkah-langkah penting terhadap masyarakat kecuali dengan bantuan kekuatan pasukan. Di semua departemen pemerintahan yang mengatur urusan umum dan pemasukan negara juga dipenuhi dengan budaya korupsi serta ketidakjujuran oleh para pejabatnya.<sup>103</sup>

Inilah gambaran pemerintahan yang harus dikemudikan oleh kedua tangan Alauddin saat naik tahta di Delhi saat itu. Permasalahan tersebut muncul saling berkaitan (*complicated*) satu sama lain dan sulit bagi sultan sebelumnya untuk mencari solusinya, yang mana jika dibiarkan terus maka itu dapat mengganggu urusan keamanan, militer, serta urusan warga sipil artinya ini dapat membuat negara kehilangan loyalitas dari warga negara sekaligus militernya. Namun, Alauddin sebagai sultan yang baru dengan umur yang terbilang muda tidak menampakkan ketakutannya. Ia mampu menyelesaikan semua permasalahan tersebut dan berhasil menemukan cara penyelesaian yang efisien.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 46-47

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 47.

Dapat disimpulkan dari semua fakta ini bahwa Alauddin naik tahta kesultanan Delhi harus menghadapi kondisi negara yang berjalan tanpa ada kedamaian di dalamnya dan tidak adanya kepatuhan penduduk kepada pemerintah pusat, banyaknya ancaman keamanan karena adanya serangan berbahaya dari bangsa Mongol, kas negara kosong sama sekali, rakyat menderita kelaparan karena bahan pokok langka, harganya mahal, para pejabat termasuk gubernur/*jagirdar* tidak loyal dan tidak patuh, pegawai negara bekerja tidak efisiensi dan cenderung korupsi, otoritas pemerintah pusat tidak memiliki kekuatan dan pengaruh, sehingga kepemimpinan yang baru harus dapat menyelesaikan permasalahan yang berat, saling berkaitan tersebut, dan solusi yang harus diambil tentunya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Alauddin menyelesaikan permasalahan ini di mulai dari akar permasalahannya yaitu membenahi aturan administrasi negara di mana pengaturan negara disandarkan dan dalam menyelesaikannya Sultan harus bersikap tegas terutama dalam penerapan aturan bahkan tidak perlu segan-segan menggunakan pedang jika resep ini dianggap tidak bekerja secara efektif dikarenakan ada hambatan dari para pejabat dan penduduk. Pihak yang menjadi fokus dalam menjalankan kebijakannya ini tidak lain didahului dengan membenahi para pejabatnya sebelum pejabat tersebut diperintahkan untuk mengatur administrasi negara, dan ini terbukti efektif karena akhirnya ia pun berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> K. Ali, *History*, hal. 77.

## BAB III

# KEBIJAKAN SULTAN ALAUDDIN KHALJI

### A. KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI

Saat pergantian kepemimpinan di kesultanan Khalji dari Sultan Jalaluddin kepada Alauddin, ia mencari cara untuk menarik hati para pejabat untuk mendukung dirinya atau membuat mereka tidak menjadi penghalang baginya dengan menawarkan uang yang banyak dan juga jabatan.<sup>1</sup> Tetapi dua tawaran kebaikan dari Alauddin ini selanjutnya tidak dibalas dengan kesetiaan dan berpihaknya mereka hanya didorong karena faktor kepentingan mereka secara pribadi. Ini terlihat sejak para pejabat ini bergabung dengan kekuatan Alauddin yang mana mereka hanya mengejar harta dan jabatan saja. Sikap mereka membuat Sultan Alauddin tidak puas atas pengabdian mereka.<sup>2</sup> Sebagai akibatnya pada saat Alauddin telah mendapatkan posisinya kuat di kesultanan,<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Menurut sejarawan Barani, setiap *malik* dan *amir* era Jalaluddin yang mendukung Alauddin dalam masa transisi menerima uang antara 20 *maund*, 30 *maund*, dan 50 *maund* emas. Dan pasukan yang berada di bawah kendali para pejabat ini menerima tiga ratus *tanka* per orang: H. M. Elliot, *The History of India as Told by Its Own Historians*, (London: Turbner & Co, 1869), III: 159.

<sup>2</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life and Works of Sultan Alauddin Khalji*, (New Delhi: Atlantic Publishers & Distributor, 1992), hal. 51.

<sup>3</sup> Ide ini muncul setelah lima bulan Alauddin pulang dari Rantambhor, menyerang Tilang dan Ma'bar. Saat penaklukan ke

ia kemudian memiliki keinginan untuk menggeser posisi para pejabat yang kemudian diisi oleh teman dan pengikutnya yang loyal yang pernah membantunya mencapai kesuksesan hingga di tahta Delhi. Keputusan ini didasarkan pada tuntutan dari kebijaksanaan tata negara yang ia jalankan yaitu untuk memperkuat posisi dirinya di dalam pemerintahan. Alauddin pun memiliki keinginan untuk memberikan pejabat yang baru nanti dengan penghargaan baik berupa kekayaan, posisi sebagai *Jagirdar* besar, dan mempunyai posisi yang tinggi di kesultanan, yang mana jabatan itu masih berada di para pejabat *Jalali* (orang yang pernah menjabat di pemerintahan Sultan Jalaluddin) yang mana loyalitas dan ketaatan mereka masih dipertanyakan.<sup>4</sup>

Alauddin selama beberapa hari berfikir keras mencari akar masalah dan solusi atas pemberontakan yang terjadi di awal pemerintahannya, kemudian ia menyimpulkan bahwa permasalahan itu muncul karena empat hal yaitu: pertama, tidak ada perhatian sultan sebelumnya terhadap urusan-urusan negara. Kedua, kebiasaan konsumsi minuman keras di kalangan penduduk dan pejabat yang mana ini kebiasaan ini sering mereka lakukan di dalam pesta. Ketiga, hubungan persahabatan, persekutuan dan perkumpulan sering dijadikan cara tersembunyi oleh para bangsawan dan pejabat untuk merencanakan persekongkolan untuk melawan pemerintahan.

---

Rantambhor telah tiga kali terjadi pemberontakan di dalam negeri, baik oleh pejabat muslim maupun pejabat Hindu yang mengabdikan pada Alauddin, maka ia berinisiatif untuk melakukan langkah politik untuk mencegah pemberontakan ini terjadi berulang: H. M. Elliot, *The History*, hal. 179.

<sup>4</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life*, hal. 51.

Keempat, berlimpahnya kekayaan yang telah menjadikan mereka berani untuk membuat rencana makar dan pemberontakan.<sup>5</sup>

Setelah mengetahui faktor penyebab pemberontakan, maka Alauddin memberlakukan empat kebijakan yaitu pertama, penyitaan (*confiscation*) terhadap harta yang dimiliki oleh para *Jagirdar* atau para pejabat lain yang dinilai tidak loyal. Alauddin menghapus hak kepemilikan pribadi mereka (*al-Milkiyah*). Apakah dimiliki sebagai lahan-lahan milik pribadi atautkah lahan pemberian atau sebagai tanah wakaf (*as religious endowment*) semuanya disita. Begitupun dana pensiun diberhentikan.<sup>6</sup> Akibat dari kebijakan Alauddin ini, sejarawan Barani mengatakan untuk menggambarkan dampak kebijakan itu:<sup>7</sup>

*Many were left without any money, till at length it came to pass that, excepting maliks and amir, officials, Multanis, and bankers, no one possessed even a trifle in cash. The people were all so absorbed in obtaining the means of living, that the name of rebellion was never mentioned.* (semua penduduk dibiarkan hidup tanpa memiliki banyak uang, hingga perkara yang sangat detail sekali pun tidak terlewatkan (dari perhatiannya), tidak terkecuali

---

<sup>5</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal. 178.

<sup>6</sup> Ada dua pejabat Jalali yang tidak diberi hukuman bahkan dilindungi oleh Alauddin adalah Malik Qutub-ud-Din Alvi, Nasir-ud-Din Rana dan Malik Amir Jamal Khalji. Alauddin melihat bahwa mereka tetap setia kepada Jalaluddin walaupun telah diberi tawaran harta dan jabatan oleh Alauddin. Mereka berdua dilindungi harta, keluarga dan kehormatannya oleh Alauddin serta diberi kehidupan yang mulia dan terhormat selama pemerintahan Alauddin: Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 51.

<sup>7</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal. 179.

*malik, amir, pegawai kesultanan, orang-orang multan*<sup>8</sup> dan pegawai bank, tidak ada seorang pun memiliki (harta) walaupun hanya sebuah benda berharga berbentuk tunai sekalipun. Mereka menjadi begitu membutuhkan sesuatu untuk bertahan hidup yang tanpa ada pemasukan/income hingga pikiran untuk memberontak tidak pernah terlintas di benak mereka)

Kebijakan kedua adalah mendirikan sebuah badan intelejen (mata-mata) yang selalu melaporkan kepada sultan tentang segala sesuatu yang terjadi di rumah-rumah para bangsawan atau pasar (pusat keramaian) di kota. Akibatnya penduduk tidak dapat berbicara secara bebas dalam pertemuan pribadi bahkan di dalam rumah mereka sendiri karena takut kalau “dinding boleh jadi mendengar (*walls might hear*).” Para pedagang di pasar juga tidak berani melakukan pelanggaran atas aturan yang diterapkan oleh sultan karena kebijakan ini. Ketiga, sultan melarang para pejabat dan bangsawan untuk saling mengunjungi rumah pejabat dan bangsawan lain. Pesta dan acara apapun yang di dalamnya terjadi perkumpulan beberapa orang dilarang, karena biasanya pertemuan itu sering diadakan pesta minuman keras dengan diiringi musik dan tarian dari budak terpilih.<sup>9</sup> Keempat,

---

<sup>8</sup> Orang yang berada di daerah Multan merasakan kebijakan Alauddin ini, yang posisi Multan berada di utara Delhi, sedangkan pusat pemerintahan kesultanan Khalji saat itu di Delhi.

<sup>9</sup> Pesta di dalamnya ada minuman keras dengan diiringi musik dan tarian dari budak terpilih seperti Nusrat Khatoon dan Mehr Afroze sudah biasa dilakukan para pejabat sejak pemerintahan Sultan Kaikabud hingga Sultan Jalaluddin, ini menegaskan kondisi moral pejabat saat itu

penjualan<sup>10</sup> dan konsumsi minuman anggur (*wine*) dan obat-obatan yang bisa menyebabkan mabuk dilarang keras. Praktek perjudian dan pelacuran juga dilarang dan pelakunya diberi sanksi keras.

Sultan Alauddin memberlakukan kebijakan ini yang mana ia sendiri juga memberikan contoh kepada rakyatnya dengan berpantang meminum minuman keras, dan menghancurkan gudang bawah tanah milik negara yang berisi minuman keras. Semua minuman keras di pusat kota dibuang dan membanjiri tanah di depan gerbang Badaun, sehingga itu menimbulkan genangan di sana. Bahkan banyak gajah yang sampai meminum dalam jumlah banyak anggur (*wine*) yang mahal tersebut yang mana sebelumnya disimpan di dalam gudang bawah tanah, sejarawan Firishta mengatakan sambil menghela nafas panjang: “*happy the elephants of those days who thus enjoyed themselves* (sungguh gembiranya para gajah pada hari-hari itu yang mana mereka menikmatinya (minuman anggur) sendirian). Sultan Alauddin juga memerintahkan para pejabat untuk pergi keliling kota dan mengatakan kepada penduduk secara pribadi bahwa meminum minuman keras telah dilarang. Barani mengatakan bahwa setelah pemberlakuan larangan minuman keras ini, banyak orang jahat mulai menyelundupkan dan membuat anggur ke dalam kota-kota tanpa izin. Tetapi sistem administrasi Alauddin begitu ketat sehingga semua orang yang dicurigai

---

penuh dengan kesenangan: Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 91.

<sup>10</sup> Peminum dan penjual (*importer*) akan dihukum dengan hukuman kurungan selama beberapa hari.

ditandai tempatnya dan dicatat dalam buku, kemudian mereka dipukul dan dipenjarakan di penjara-penjara terbuka yang digali dalam tanah di luar gerbang Badaun, sedangkan minuman anggurnya diberikan kepada gajah-gajah. Beberapa hukuman ini mampu membuat jera dan penduduk menjadi taat semua atas langkah-langkah ini.<sup>11</sup>

Kebijakan pelarangan minuman keras ini memunculkan pendapat di antara para sejarawan, K. Ali mengatakan bahwa pelarangan minuman keras untuk mengurangi munculnya pemberontakan<sup>12</sup> mungkin jadi benar, akan tetapi Ghulam Sarwar Khan mengatakan bahwa orang yang kecanduan minuman keras tidak mengancam sultan secara langsung, oleh sebab itu tujuannya semata-mata demi memperbaiki moral penduduknya. Ghulam menyandarkan pada informasi dari sejarawan Firishta penulis *Ghulsan-e-Ibrahimi* yang mengatakan bahwa pada abad pertengahan sudah banyak pejabat bersekongkol untuk melawan Alauddin karena Alauddin dinilai memberlakukan hukuman keras bagi penduduk, namun lemah terhadap para pejabat dan bangsawan. Alasan lain menurutnya adalah intelejen yang diutus oleh Alauddin untuk memantau penerapan aturan tersebut masih dimungkinkan memunculkan kesenjangan informasi karena intelejen yang merupakan pegawai biasa tidak akan mungkin berani memantau secara detail di rumah pejabat tinggi, dan ini berbeda apabila mereka memantau penduduk biasa. Perkataan sejarawan Barani dapat dijadikan sandaran praktek penerapan

---

<sup>11</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 92.

<sup>12</sup> K. Ali, *History of India, Pakistan, and Bangladesh*, (Dhaka: Ali Publications, 1980), hal. 78.

ini yang memungkinkan adanya peluang tersebut:<sup>13</sup>

*the prevention of drinking being found to be very difficult, the Sultan gave orders that if the liquor was distilled privately, and drunk privately in people's own houses; if drinking parties were not held, and the liquor not sold, then the informers were not to interfere in any way, and were not to enter the houses or arrest the offenders.*

Ungkapan Barani ini menunjukkan bahwa penduduk tanpa kecuali masih berpeluang minum minuman keras dalam kondisi tertentu yaitu selama tidak diketahui petugas (*informer*), sehingga itu juga menjadi mungkin bagi kebanyakan pejabat melanjutkan kebiasaannya.<sup>14</sup> Barani mengatakan bahwa Sultan Alauddin bahkan membuat aturan bahwa pajak dalam bentuk apapun yang diambil dari aktivitas yang dilarang tersebut juga dilarang,<sup>15</sup> sehingga semakin jelas bahwa tujuan moral menjadi utama Alauddin atas aturan tersebut. Ibnu Taimiyah dalam sejarahnya ketika memobilisasi penduduk Damaskus untuk melawan bangsa Mongol pada tahun 1300 M juga melakukan motivasi jihad dengan mengingatkan ayat al-Qur'an dan tepat pada tanggal 17 Rajab tahun 1300 M bersama pasukannya pergi ke toko penjual minuman keras lalu memecahkan guci minuman keras serta memberikan sanksi bagi penjualnya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa minuman keras dan tindakan kemaksiatan lain (perjudian dan pelacuran) dapat membuat kaum muslim

---

<sup>13</sup> H. M. Elliot, *The History*., hal. 181.

<sup>14</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life*., hal. 94.

<sup>15</sup> H. M. Elliot, *The History*., hal. 180.

lemah dan tidak berdaya di hadapan orang Mongol.<sup>16</sup>

Setelah mengeluarkan kebijakan yang mengatur pada *Jagirdar*, Alauddin kemudian berkonsultasi dengan orang-orang bijak untuk meminta saran dalam membuat peraturan yang dapat mengurangi pengaruh *Zamindar* Hindu, karena pemberontakan yang terjadi di dalam negerinya dapat dilakukan oleh pejabat Muslim dan pejabat Hindu. Dua kebijakan diterapkan untuk mengatur para *Zamindar* ini yaitu: pertama, semua lahan pertanian yang dikelola orang Hindu baik lahannya luas maupun kecil ditetapkan pajak atasnya dalam ukuran yang sama yaitu setengah dari hasil produksinya. Kebijakan ini berlaku pada *khut* (*farmer of revenue*) dan *bulhar* (*the village watchman*).<sup>17</sup> *Khut* merupakan pemilik tanah beragama Hindu, tanah yang mereka miliki merupakan tanah pemerintah yang dikuasakan kepada mereka untuk dikelola dengan syarat membayar sebagian dari keuntungan hasil pengelolaan tanah, dan selain itu posisi *khut* juga sebagai penghubung (*chaudhri*) antara wali (gubernur) di suatu wilayah bagian Delhi dengan petani atau pengelola tanah (*cultivator*) untuk mengambil pajak atas tanah pertanian karena *khut* juga akan menyerahkan tanah itu ke petani untuk dikelola. Oleh sebab itu ada tiga profesi yang berbeda dalam pengelolaan lahan pertanian di masa Alauddin menurut Tripathi dalam *Some Aspects of Muslim Administration* yaitu *muqaddam* (*headman*), *khut* (*farmer of revenue*), dan *chaudhri* (*revenue collector*).

---

<sup>16</sup> M. Sayyid al-Wakil, *Wajah Dunia Islam; dari Dinasti Bani Umayyah hingga Imperialisme Modern* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hal. 283.

<sup>17</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal. 182.

Tiga profesi ini menggambarkan bahwa pemimpin muslim memberikan kebebasan pada wilayah bagian untuk mengelola tanah pertanian walaupun pengawasannya berada di tangan *zamindar* Hindu, sehingga *zamindar* Hindu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanah dan mampu meningkatkan pendapatan daerah (*local revenue*) yang akan dibayarkan kepada bendahara negara,<sup>18</sup> kebijakan ini diterapkan juga di Deccan sebuah wilayah di selatan Delhi.<sup>19</sup> Walaupun pola hubungan dibangun seperti ini, tetap saja tidak ada keharmonisan dan sikap saling mencurigai antara wali (biasanya seorang muslim) dengan *middleman* (*chaudhri*), akhirnya wali cenderung membiarkan *zamindar* Hindu baik berprofesi sebagai *chaudhri* maupun *khut* berjalan sendiri tanpa pengawasan selama mereka terus menunaikan kewajibannya kepada bendahara negara. Kebebasan yang diberikan wali ini membuka peluang bagi *zamindar* Hindu untuk berbuat tidak jujur dengan mengurangi jumlah setoran dan mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan sendiri (menumpuk harta) dan menyusun kekuatan melawan pemimpin muslim, bahkan menjadi arogan terhadap petani yang posisinya lebih lemah dari mereka. Inilah yang dilakukan Malik Chajju yang melakukan persekongkolan dengan pejabat di kesultanan Khalji untuk memberontak atas kepemimpinan Jalaluddin, yang mana ia juga terkenal keras terhadap petani.<sup>20</sup> Berdasarkan fakta ini Sultan Alauddin kemudian mencabut hak istimewa di antara para *Zamindar* Hindu (*khut*, *muqaddam*, dan *chaudhri*),

---

<sup>18</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 52.

<sup>19</sup> K. Ali, *History.*, hal. 75-77.

<sup>20</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life*, hal. 53.

semua dianggap sama yang mana mereka hanya menerima upah dari negara atas tugas mereka memungut pajak tanpa boleh mengambil lebih dari itu, dan mereka tetap menunaikan pajak atas tanah, padang rumput dan kuda yang diberikan kepada mereka untuk dikelola. Oleh karena itu aturan ini membuat strata agama dalam Hindu tidak berlaku dalam strata sosial, kas negara mampu ditingkatkan karena peluang kebocoran berhasil ditutup, dan petani kecil merasa aman dari eksploitasi ilegal para *Zamindar* Hindu yang berdiri di belakang hak istimewa dari negara sehingga petani bisa fokus meningkatkan produktifitas lahan pertanian.<sup>21</sup>

Kebijakan kedua, berkaitan dengan peternakan sapi, kambing dan hewan lain yang darinya diambil susu. Pajak atas pemanfaatan padang gembalaan dan rumah ditetapkan, namun untuk orang yang tidak mampu dikecualikan atas pajak ini sebagai wujud keadilan antara kaya dan miskin. Pemungut pajak (*collector*), juru tulis (*clerk*), dan pegawai negara lain yang memiliki tugas dalam memungut pajak jika menerima suap (*bribe*) atau tidak jujur maka akan dihukum. Sharaf Kai, seorang *naib wazir-e mamalik* yang terkenal mampu menjadi juru tulis, sangat jujur, cerdas, dan tidak ada orang lain yang sebanding dengannya dalam hal kapasitas dan integritas melaksanakan tugas ini (sebagai juru tulis) dengan rajin di setiap desa dan kota. Mereka (pemungut pajak, juru tulis dan pegawai lain) ditugaskan negara membantu para *chaudhri*, *khut*, dan *muqaddim* di lapangan untuk mendapatkan kuda (kendaraan), alat pertanian,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 55-56.

pakaian yang layak, dan mendapatkan rumah.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada para petani miskin dan *zamindar* lemah dalam memanfaatkan padang rumput milik negara, maka Sultan membebaskan dari pajak atas setiap kepemilikan dua pasang sapi jantan atau betina, dua pasang kerbau, dan sepuluh kambing ketika mereka menggembalannya di padang rumput milik negara. Sejumlah sapi perah (*cattle*) yang melebihi jumlah di atas jika diberi makan dengan menggembalakan di padang rumput milik negara maka akan dikenai pajak *grazing fees* selama mereka masih menghasilkan susu.<sup>23</sup> Pajak ini berlaku atas pemanfaatan padang rumput, sedangkan sapi perah yang diberi makan di rumah dikecualikan atas pajak ini. Pajak atas pemanfaatan padang rumput ini (*grazing tax*) ini barangkali yang menyebabkan naiknya harga daging, namun dari pada menghapus pajak atas padang rumput ini (*grazing tax*),<sup>24</sup> Sultan Alauddin akhirnya menghapus zakat atas binatang ternak (baik untuk diperas susunya atau dijual dagingnya).<sup>25</sup> Alasannya, mungkin sebagai pencegah bagi pemanfaatan tanah kepada selain oleh petani sebagaimana yang pernah dilakukan oleh *khut* dan *muqaddam* dahulu dan jelas Alauddin tidak menghendaki

---

<sup>22</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal. 182.

<sup>23</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 57.

<sup>24</sup> Pajak atas pemanfaatan padang rumput milik negara (*grazing tax*) sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Sultan Jalaluddin yang disebut *charai/chari*. Ada beberapa pajak yang ada pada masa itu antara lain: *kharaj* (*tribute*), *jizya* (*poll tax*), *kari* (*house tax*) dan *chari* (*pasture tax*).

<sup>25</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 57.

ini karena ia menginginkan tanah berproduksi secara maksimal menghasilkan bahan makanan pokok yang mana dengannya ekonomi negara menjadi maju<sup>26</sup> dan itu tidak lain tergantung dari kinerja para petani.

## B. KEBIJAKAN MILITER

Setelah pengendalian keamanan dalam negeri dari pemberontakan dengan kebijakannya berhasil efektif, maka selanjutnya Sultan Alauddin Khalji memfokuskan diri pada menaklukkan daerah Chitor<sup>27</sup>. Penyerangan daerah Chitor ini juga tidak berjalan mulus karena ada ancaman bangsa Mongol yang bisa saja terjadi setiap saat, yang mana di dalam pusat pemerintahan di Delhi juga sedang terjadi kekosongan pemerintahan, Sultan Alauddin sendiri pergi ke Chitor dan para panglima besarnya seperti Malik Fakhruddin Juna (pejabat *dadbak-e hazrat*), Malik Jhaju (keponakan Nusrat Khan) dikirim untuk menaklukkan Arangal. Pengepungan Alauddin di Chitor tidak membuahkan kemenangan, sehingga ia dan pasukannya pulang ke Delhi untuk memulihkan kekuatan (fisik dan peralatan). Saat masa pemulihan ini bangsa Mongol di bawah pimpinan Targhi dengan membawa tiga puluh sampai empat puluh ribu pasukan berkuda menyerang daerah Jumna, serangan mendadak ini membuat Sultan Alauddin tidak mampu berbuat sesuatu karena tidak mungkin merekrut

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Amir Khusru dalam *Tarikh-e Alai* menyebutkan, misi penaklukkan Chitor dilakukan pada hari Senin, 8 Jumada ats-Tsani, tahun 702 H/tahun 1303 M. Benteng Chitor berhasil direbut pada hari Senin, 11 Muharram, tahun 703 H/tahun 1303 M: H. M. Elliot, *The History*, hal. 76-77.

dan memulihkan kekuatan pasukannya dalam waktu singkat dan mendadak tersebut. Sedangkan pasukannya yang baru kembali dari misi ke Arangal yang sebagiannya adalah orang Hindu telah lemah dan berkurang jumlahnya, akhirnya kekuatan perang Alauddin di Multan, Samana, Dipalpur tidak mampu melindungi wilayah Jumna dari penjarahan orang Mongol. Sultan Alauddin kemudian meninggalkan Delhi dengan terpaksa untuk mengusir bangsa Mongol yang menduduki Jumna, faktor keberuntungan berdiri di balik kemenangan Alauddin mengusir bangsa Mongol di Jumna yang memakan waktu dua sampai tiga bulan tersebut. Hal ini memberikan pelajaran bagi Alauddin untuk mencari cara melindungi negara dari serangan Mongol yang terus mengancam dan menyerang tanpa diketahui waktunya.<sup>28</sup> Strategi perang yang digunakan untuk mengetahui potensi lawan adalah mengirim mata-mata, bangsa Mongol berasal dari etnis yang tidak seorangpun dapat menirunya yang mana wajah mereka, mata mereka, dan hidung mereka tidak mirip dengan siapapun. Oleh sebab itu sulit untuk memata-matai mereka, mengetahui apa yang akan mereka perbuat besok pagi. Ini beralasan karena mereka tidak memperbolehkan siapapun masuk ke tempatnya kecuali orang yang telah mereka kenal sebelumnya dan mereka izinkan, sehingga inilah yang menjadi keunggulan mereka.<sup>29</sup>

Kebijakan yang diambil oleh Alauddin adalah pertama, Sultan Alauddin memerintahkan agar semua benteng yang sudah tua di Delhi diperbaiki dan benteng yang baru didirikan di sepanjang jalan menuju arah serangan Mongol. Kedua,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 189-190.

<sup>29</sup> M. Sayyid al-Wakil, *Wajah Dunia.*, hal. 296.

bangunan baru yang di dalamnya berisi mesin produksi (*New Workshop*) juga didirikan untuk membuat senjata-senjata untuk persiapan melawan bangsa Mongol seperti *manjanik* dan *'arada*. Ketiga, *amir* yang mampu dan dapat dipercaya ditempatkan di daerah pos pertahanan tapal batas untuk berjaga-jaga seperti penunjukan Ghazi Malik sebagai gubernur di Punjab pada tahun 1305 dan dia (Ghazi Malik)<sup>30</sup> akhirnya mampu menahan serangan bangsa Mongol. Keempat, jumlah pasukan ditingkatkan dan pasukan terkuat dipusatkan di Dipalpur, Samana dan Multan.<sup>31</sup> Pembangunan benteng yang kuat dan perbaikan benteng yang sudah tua juga disertai dengan pendirian kantor sekaligus gudang senjata sampai batas wilayah kekuasaannya, serta memilih *amir* dan pasukan yang berpengalaman dan dipercaya untuk memimpin tempat tersebut dan mempersenjatai mereka dengan senjata perang paling modern masa itu.<sup>32</sup>

Alauddin selain memperkuat pasukannya di batas terluar negara, juga merombak metode perekrutan dan pembayaran gaji pasukannya. Sebelumnya para pejabat (komandan pasukan) disubsidi/dibayar oleh para *Jagirdar* (pejabat wilayah), sehingga dengan ini *Jagirdar* akan membayar sejumlah pasukan yang dikehendaki (mengikuti keinginannya). Sistem ini dinilai memiliki kelemahan, karena pasukan ini memiliki ketaatan (loyalitas) hanya kepada komandan atau *Jagirdar* dan bukan kepada Sultan karena ia digaji oleh para *Jagirdar*. Sekarang militer direkrut atas nama Sultan langsung dan digaji langsung

---

<sup>30</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 48.

<sup>31</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal. 191.

<sup>32</sup> K. Ali, *History.*, hal. 71.

dari kas Negara secara tunai,<sup>33</sup> sehingga hasil dari penerapan sistem ini sosok Sultan tidak saja menjadi komandan yang paling berkuasa tetapi juga sebagai pemimpin negara yang membayar dan menggaji mereka. Sistem rekrutmen ini diharapkan dapat membuat ketaatan dari seluruh pasukan kepada Sultan, dan juga menjadikan Sultan sebagai mengendalikan secara penuh (satu komando) melalui seorang pejabat yang telah ditunjuk langsung oleh Sultan bukan oleh orang lain karena ikatan personal atau pun ikatan kesukuan (*feudal attachment*).

Ukuran gaji yang dianggap cukup bagi pasukannya ditetapkan yang mana berkisar 234 *tanka* per tahun atau mendekati 20 *tanka* per bulan ditambah rangsum.<sup>34</sup> Bayaran gaji ini terhitung sangat sesuai jika diukur dalam kondisi panen gandum dan saat harga bahan kebutuhan pokok lainnya diatur di bawah sistem pengendalian harga pemerintah (*price control system*), sehingga pekerjaan seorang tentara saat itu sangat dihormati sekali dan sangat menarik.<sup>35</sup> Keuntungan besar lainnya bagi seorang tentara adalah mereka dapat menerima bagian dari harta rampasan perang (*ghanaim*) dan pembagian ini kadangkala sangat besar bahkan dapat membuat tentara yang sangat miskin sekalipun menjadi sangat kaya dalam waktu satu malam.<sup>36</sup>

Alauddin juga menerapkan Dagh sistem (*the system of*

---

<sup>33</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 48.

<sup>34</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal. 197.

<sup>35</sup> Sebagai gambaran, dengan harga (daya beli) dari 20 *tanka* pada masa kejayaan Alauddin, yang mana 1 *jital* atau *pice* (1/64 *tanka*) dapat membeli 2 *seer* (1 *seer* = 1 kg) gandum/terigu, dan harga 1 ekor kambing tidak lebih dari 10 *pice*.

<sup>36</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 48.

*Dagh*) yaitu pemberian label pada kuda (*branding of horses*) untuk meningkatkan efisiensi pasukannya dan memberi catatan bagi setiap kuda. Sistem ini dipergunakan untuk menghindari penggelapan, penipuan, dan lebih lanjut ini juga menurut K.Ali berguna untuk mendata kuda mana yang siap (*fit*) dan yang tidak (*unfit*) untuk dibawa ke medan tempur.<sup>37</sup> Alauddin adalah juga pemimpin negara pertama yang telah mempersenjatai dengan peralatan modern pada masanya pada pasukan pejalan kaki dan menjadikan mereka sebagai pasukan pertahanan (*standing army*),<sup>38</sup> karena penguasa sebelumnya hanya menunjuk pengawal (*body-guard*) sebagai pasukan pertahanan.

Selain membangun pabrik pembuatan meriam untuk menggantikan meriam yang telah lama sebagaimana telah disebutkan di atas juga membuat tempat (peternakan) untuk menjaga pasukannya mendapatkan kuda-kuda dari keturunan yang paling bagus.<sup>39</sup> Langkah ini dibutuhkan karena persediaan kuda-kuda terbaik dari Asia Tengah telah terputus akibat dirampas oleh orang-orang Mongol. Melihat fakta ini, ketika kekuatan Alauddin telah mencapai masa kejayaannya, ia memiliki 475.000 tentara<sup>40</sup> dalam pasukan perangnya termasuk sejumlah kuda yang ditempatkan di daerah dekat Delhi dan di batas wilayah ada 70.000 tentara.<sup>41</sup> Ada lebih dari 50.000 pekerja/budak<sup>42</sup> yang selalu siap untuk mengorbankan diri mereka demi

---

<sup>37</sup> K. Ali, *History.*, hal. 80.

<sup>38</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 48.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 49.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 49.

<sup>42</sup> *Ibid.*

kepentingan tuan mereka. Menurut sejarawan W. Haig, langkah ini membuat pasukannya sulit untuk dikalahkan dan angkatan perangnya termasuk salah satu yang terbaik pada masanya dan itu tidak hanya dihormati di India tetapi juga di Asia Tengah di mana orang Mongol menjadi gentar menghadapinya.<sup>43</sup>

Langkah Alauddin selanjutnya adalah menggerakkan kembali dinas kepolisian dan intelejen. Di setiap desa dan kota ditugaskan *qazis*, *kotwal*, dan *muhtasib* dan dalam bertugas mereka dibantu oleh sejumlah polisi. Yang mana tugas *qazis* adalah mengatur pengadilan/kehakiman sekaligus membantu *mufti* menjelaskan hukum kepada penduduk, sedangkan tugas *kotwal* adalah untuk menjaga ketenangan dan pelaksanaan aturan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya serta melindungi warga dari para pencuri/perampok. *Muhtasib* memiliki tugas mengawasi pasar, perilaku penduduk, dan memutuskan perselisihan di antara warga secara adil, serta mengarahkan penduduk untuk selalu taat pada agama dan budaya yang berlaku.<sup>44</sup> Penduduk merasakan tidak adanya perbedaan antara kaya dan miskin ketika berada di depan hukum karena pejabat berwenang menghukum siapa saja yang berusaha melawan hukum dan prinsip dari aturan lokal yang telah diperkenalkan. Berkaitan dengan keadaan tersebut Amir Khusrau mengatakan: “The very thieves who, before this, set villages on fire, now lit the lamp and guarded the highways; if a traveller lost a piece of thread, the people of the vicinity

---

<sup>43</sup> W. Haig, *Cambridge History of India*, (Delhi: Chand & Co, 1958), III: 103.

<sup>44</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Islam di India*, (Yogyakarta: Bunga Grafis Production, 2003), hal. 51.

either found it or paid its price”<sup>45</sup> (karena) takut dicuri siapapun, sebelum saat ini, selalu menyalakan lampu/penerangan di desa-desa dan berjaga-jaga di jalan (yang dilalui orang), sampai bila seorang kehilangan sepotong (gulungan) benang, penduduk di sekitar akan menemukannya atau memberikannya ganti rugi).

### C. KEBIJAKAN EKONOMI SISTEM PENGENDALIAN HARGA

Permasalahan pertahanan di batas negara dari serangan Mongol berhasil diselesaikan, namun kemudian Alauddin berfikir untuk meningkatkan kekuatan pasukannya selamanya bukan hanya untuk satu atau dua tahun saja. Ia ingin menggaji pasukannya dengan gaji 234 *tanka* secara tetap, 78 *tanka* untuk setiap penjaga 2 kuda perang, dan untuk setiap kelipatan 2 ekor kuda. Ia kemudian mengkonsultasikan kepada orang-orang bijak yang ada di sekitarnya, penasehatnya kemudian mengatakan bahwa menciptakan pasukan hebat dengan batas gaji tersebut dapat mencukupi apabila diukur dengan harga bahan kebutuhan pokok yang rendah, namun tidak mencukupi untuk segala macam kebutuhan tambahan istri dan keluarga. Usulan ini kemudian dikonsultasikan kepada para menterinya yang paling berpengalaman untuk dibuatkan aturan yang tidak memunculkan hukuman keras dan sewenang-wenang, para menteri memberikan kesimpulan bahwa kebutuhan hidup tidak akan menjadi murah apabila harga gandum (segala biji-bijian untuk konsumsi seluruh orang India) tidak ditetapkan

---

<sup>45</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 49.

harganya dalam sebuah aturan dan tarif.<sup>46</sup> K. Ali mengatakan bahwa ada empat alasan Sultan Alauddin mengambil kebijakan pengendalian harga dalam ekonominya yaitu pertama, dia memiliki keinginan menciptakan dan memelihara pasukan yang besar dan kuat tidak saja untuk menghadapi serangan bangsa Mongol tetapi juga untuk melanjutnya ambisinya untuk melebarkan sayap kekuasaannya. Kedua, dalam menjalankan pembenahan kebijakannya ke dalam maupun ke luar melalui pembenahan administrasi maka ia membutuhkan dana besar, walaupun sebelumnya telah menaklukkan Deogir. Kebijakan pematokan harga yang merupakan salah satu kebijakan pengendalian harga akan membuat keperluan hidup menjadi tetap dan ini berguna ketika negara melakukan penundaan gaji tidak membuat perubahan biaya gaji (konsep harga sekarang dan harga akan datang tidak berlaku) terutama pada barang pokok dan barang kebutuhan hidup mendesak lainnya, karena Alauddin sangat memahami gejala kondisi ekonomi akibat kondisi keamanan dan politik seperti saat perang bisa memicu terjadinya gejala di dalam tubuh angkatan perangnya.<sup>47</sup> Ketiga, serangan bangsa Mongol yang telah memutuskan jalur perdagangan dari dan menuju ke wilayah kekuasaannya membuat barang menjadi langka dan membuat harga naik. Alasan keempat, masuknya uang

---

<sup>46</sup> Sejarawan mengakui bahwa penetapan harga kebutuhan pokok tersebut dilakukan Alauddin dengan tujuan membuat pasukannya mampu hidup layak dan penerapannya diharapkan tidak bersifat keras dan sewenang-wenang: H. M. Elliot, *The History*, hal. 192.

<sup>47</sup> K. Ali, *History*, hal. 81 dan R.C. Majumdar dan H.C. Raychaudhuri dan Kalikinkar Datta, *An Advanced History Of India*, Cet.2 (London: Mcmillan and Co, 1948), hal. 308.

yang banyak dari Deccan yang telah ditaklukkan Alauddin juga menyebabkan jatuhnya nilai mata uang dan akhirnya menaikkan harga kebutuhan harga bahan pokok.<sup>48</sup>

**Kebijakan pertama** yang dilakukan Alauddin adalah menetapkan harga barang kebutuhan pokok dan kebutuhan mendesak lainnya dalam harga yang sangat murah adalah seperti gandum (*wheat*) dipatok 7 ½ *jital* per *maund* (1 *maund* = lebih kurang 40 kg), jawawut (*barley*) dipatok 4 *jital* per *maund*, grams dipatok 5 *jital* per *maund*, *dhan* (gabah) dipatok 5 *jital* per *maund*, *mash*<sup>49</sup> dipatok 5 *jital* per *maund*, moth dipatok 3 *jital* per *maund*, gula dipatok 1 ½ *jital* per *seer*, ghir (gula dari pohon kurma) dipatok ¼ *jital* per *seer*, mentega dipatok 1 *jital* per 2 ½ *seer*, senamu 1 *jital* per 3 *seer*, garam dipatok 5 *jital* per 2 ½ *maund*, gula merah (brown sugar) dipatok ¼ *jital* per 1 *seer*, minyak *sesamum* dipatok 1 *jital* per 1 *seer*, *nakhud* dipatok 5 *jital* per *maund*. Pedagang atau penjaga toko diperintahkan untuk menjual barang tersebut sesuai dengan patokan harga dari Sultan dan dianggap melanggar apabila menjual di atas harga tersebut.<sup>50</sup>

Begitu juga dengan harga seluruh barang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sayuran, buah-buahan, peci/kopiah (*caps*), sepatu (*shoes*), pakaian (*cloth*), senjata (*arms*), jarum (alat tenun/*needles*) juga dipatok harganya, bahkan sebuah kuda yang paling bagus dihargai 120 *tanka*, sapi perah (*milch cow*) dihargai

<sup>48</sup> K. Ali, *History*, hal. 81.

<sup>49</sup> Biji-bijian (yang dimasak) yang dimasak di dalam air sampai menjadi lembut/bubur: Oxford Advanced Learner's Dictionary, A. S. Hornby, cet. 5, hal. 720.

<sup>50</sup> R.C. Majumdar dan H.C. Raychaudhuri dan Kalikinkar Datta, *An Advanced*., hal. 308.

4 *tanka*, kerbau perah (*milch buffalo*) dihargai 6 *tanka*, dan lain sebagainya.<sup>51</sup> Yang menarik mengapa peci, sepatu dan jarum atau alat tenun dipatok oleh Alauddin, mungkin ini didasarkan bahwa di India terutama di Bangla dan Gujarat terkenal sebagai pengekspor barang-barang tekstil kapas,<sup>52</sup> sehingga dengan pematokan harga tersebut tidak membuat biaya produksi meningkat yang berakibat matinya usaha utama masyarakat yang lebih jauh berdampak pada bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Tabel 3. 1 Daftar Barang dan Harga dalam Kebijakan Penetapan Harga

<b>Nama Barang</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga</b>
Gandum ( <i>wheat</i> )	1 <i>maund</i> ( $\pm$ 40 kg)	7 $\frac{1}{2}$ <i>jital</i>
Jamawut ( <i>barley</i> )	1 <i>maund</i> ( $\pm$ 40 kg)	4 <i>jital</i>
<i>Gram</i>	1 <i>maund</i> ( $\pm$ 40 kg)	5 <i>jital</i>
Gabah ( <i>dhan</i> )	1 <i>maund</i> ( $\pm$ 40 kg)	5 <i>jital</i>
Bubur ( <i>mash</i> )	1 <i>maund</i> ( $\pm$ 40 kg)	5 <i>jital</i>
<i>Moth</i>	1 <i>maund</i> ( $\pm$ 40 kg)	3 <i>jital</i>
Gula	1 <i>seer</i> ( $\pm$ 1 kg)	1 $\frac{1}{2}$ <i>jital</i>
Gula dari pohon kurma ( <i>Ghur</i> )	1 <i>seer</i> ( $\pm$ 1 kg)	$\frac{1}{4}$ <i>jital</i>
Mentega	2 $\frac{1}{2}$ <i>seer</i>	1 <i>jital</i>
Minyak Sesamum	1 <i>seer</i>	1 <i>jital</i>
<i>Nakhud</i>	1 <i>maund</i>	5 <i>jital</i>
Garam ( <i>salt</i> )	2 $\frac{1}{2}$ <i>maund</i>	5 <i>jital</i>

<sup>51</sup> K. Ali, *History*, hal. 81.

<sup>52</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Islam di India*, (Yogyakarta: Bunga Rafflesia Production, 2003), hal. 5.

Kuda (kualitas terbaik)	1 ekor	120 <i>tanka</i> ( 1 <i>tanka</i> = 64 <i>jital</i> )
Sapi Perah ( <i>milch cow</i> )	1 ekor	4 <i>tanka</i>
Kerbau Perah ( <i>milch buffalo</i> )	1 ekor	6 <i>tanka</i>

**Kebijakan kedua** adalah menunjuk Malik Kabul Ulugh Khan, seorang praktisi dan bijak untuk memantau pasar. Ulugh Khan melaksanakan tugasnya dibantu oleh intelejen yang memberikan informasi semua praktek yang dilakukan setiap pedagang.<sup>53</sup> Pasar yang ada ketika zaman Sultan Alauddin diserahkan pengelolaannya kepada dua pejabat yaitu *Diwan-e-Riyasat* dan *Shahana-e-Mandi*, yang mana tugas *shahana-i-Mandi* adalah mengawasi khusus pasar yang menjual bahan makanan, sedangkan tugas *Diwan-e-Riyasat* adalah mengawasi pasar yang menjual kebutuhan sandang (pakaian) dan pasar secara umum. Malik Kabul Ulugh Khan adalah orang yang pertama menjabat sebagai *Shahana-e-Mandi* dan dibantu oleh banyak staf yang membantunya, yang mana tugasnya secara rinci adalah memantau pasar agar para pedagang yang menjual barang pangan tetap tertib, menjual barang dagangan sesuai dengan harga yang ditetapkan, dan menjaga agar tidak muncul pasar gelap terhadap barang apa pun. Yakub adalah orang pertama yang menjabat sebagai *Diwan-e-Riyasat* bertugas mengatur para pedagang yang tertulis dalam *daftar* dan juga jumlah bahan

---

<sup>53</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal. 193.

pangan yang dibawa mereka dari gudang milik pemerintah untuk dijual ke pasar. Selain mereka, Sultan juga menunjuk sejumlah mata-mata yang selalu memberikan laporan kepada Sultan tentang kondisi pasar.<sup>54</sup>

**Kebijakan ketiga** adalah membangun lumbung gandum untuk menampung bahan kebutuhan pokok terutama gandum. Sultan Alauddin berusaha menghilangkan kelangkaan barang dan mengendalikan kenaikan harga gandum (bahan makanan pokok). Ia mencari sendiri beberapa solusi, mengkonsultasikannya kepada para menteri, dan pejabat bawahannya yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa peraturan tentang pengendalian harga gandum dapat dijalankan apabila persediaan gandum mencukupi kebutuhan pasar, ini sesuai dengan K. Ali terkait hal tersebut: *"Alauddin Khalji realized that mere fixation of prices would be of no use if supplies were not controlled"*.<sup>55</sup> Oleh sebab itu, untuk mencapai keadaan ini (tersedianya gandum di pasar), maka Sultan Alauddin membangun gudang milik negara di ibu kota Delhi dan kota-kota (wilayah) lain dan mengisinya dengan gandum. Ketika terjadi musim hujan atau karena armada angkutan terlambat datang ke Delhi, kemudian cadangan gandum berkurang di pasar maka Sultan akan membuka gudang tersebut dengan harga yang sangat murah (harga yang ditetapkan Sultan), atau mengikuti keinginan rakyat. Sejarawan barani mengatakan bahwa ada dua hukum yang berlaku saat itu yaitu gandum tidak boleh dibiarkan langka (kekurangan) dan tidak boleh muncul

---

<sup>54</sup> K. Ali, *History.*, hal. 82-83.

<sup>55</sup> K. Ali, *History.*, hal. 81.

harga di atas harga yang ditetapkan oleh Sultan.<sup>56</sup>

**Kebijakan keempat** adalah membuat petugas pengangkut. Para petugas ini ditempatkan oleh seluruh wilayah kekuasaannya di bawah perintah petugas pengendali pasar<sup>57</sup> yaitu *Diwan-e-Riyasat* dan *Shahana-e-Mandi*. Tugas mereka adalah membawa gandum dari satu wilayah negara ke wilayah yang lain secara kolektif atau ke pasar yang disebut *Sara-e Adl*,<sup>58</sup> nama mereka pun tertulis dalam sebuah buku yang disebut *Daftar* dan ditempatkan dalam gudang-gudang di tepi sungai Jamuna. Mereka apabila melakukan kelalaian akan diberi hukuman secara kolektif juga.<sup>59</sup>

**Kebijakan kelima** adalah melarang tindakan penimbunan. Berbagai tindakan yang biasa dilakukan para pedagang seperti penimbunan gandum dilarang dan pelakunya akan mendapatkan hukuman. Yang mana pedagang tidak diizinkan menyimpan lebih dari 1 *maund* gandum dan tidak boleh menjualnya lebih dari harga yang telah ditetapkan.<sup>60</sup> Seluruh pedagang di seluruh wilayah negara harus mendaftarkan diri di dalam *daftar* dan diserahkan pengawasannya kepada pejabat *Shahana-i-Mandi*.<sup>61</sup> Selain pedagang, penduduk pun tidak diizinkan untuk

---

<sup>56</sup> Gudang gandum (bulog) dibangun di Delhi, gandum yang dihasilkan di wilayah New City dan Jhain diangkut ke Delhi menggunakan angkutan milik pemerintah hingga terisi penuh. Sultan membangun banyak gudang di Delhi, dan ia tidak membiarkan satu gudang gandum yang kosong dari gandum saat musim panen: H. M. Elliot, *The History*, hal. 193.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 193.

<sup>58</sup> K. Ali, *History*, hal. 82.

<sup>59</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life*, hal. 61.

<sup>60</sup> H. M. Elliot, *The History*, hal. 194.

<sup>61</sup> K. Ali, *History*, hal. 82.





















































pedagang dengan tujuan mendapatkan keuntungan besar ketika harga telah naik.<sup>3</sup>

Perang dan keadaan politik yang tidak aman dalam bahasa ekonomi, dapat menjadi *starter* atau sebab bagi munculnya suatu *response* masyarakat. *Response* itu dapat berupa perubahan volume produksi dan permintaan, ini berakibat terhadap jumlah uang yang beredar, tingkat harga, bahkan tingkat upah. Selanjutnya mempengaruhi tingkat kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, besarnya volume produksi untuk perdagangan luar negara termasuk pandangan optimis dan pesimis bagi iklim usaha. Logika ini beralasan karena dunia ekonomi menggariskan bahwa faktor yang bermain di dalamnya saling berkaitan, saling memperkuat, dan saling menunjang.<sup>4</sup>

Perang juga merupakan perkara yang dapat menimbulkan ketidakpastian terutama terhadap ekonomi, padahal ketidakpastian dapat menyebabkan harga tidak stabil, bahkan cenderung menaikkan biaya produksi. Akibat dari keadaan ini adalah harga jual produk menjadi meningkat, sehingga menyulitkan produsen atau pedagang untuk menjualnya di pasar. Sementara itu daya beli masyarakat menurun, sehingga sudah dapat dipastikan produk apapun tidak akan laku di pasar.<sup>5</sup> Pendapat ini sejalan dengan penemuan Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, yang mana mereka mendapatkan bahwa

---

<sup>3</sup> Taquuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Maghfur Wahid, Cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 209.

<sup>4</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi.*, hal. 395.

<sup>5</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 5.

pertumbuhan ekonomi ternyata lebih dipengaruhi oleh stabilitas dari suatu rezim politik ketimbang jenis rezim itu sendiri, dengan kata lain iklim politik yang dibangun oleh pemegang otoritas sangat menentukan stabilitas suatu perekonomian.<sup>6</sup> Inilah gambaran awal permasalahan yang dihadapi Sultan Alauddin dalam perspektif ekonomi.

Sejarawan Ziauddin Barani mengatakan bahwa langkah yang diambil Sultan Alauddin Khalji untuk meredam permasalahan tersebut adalah dengan mengembalikan pengaruh pemerintah yaitu melalui penguatan angkatan perang atau tentaranya, karena selama ini pengaruh pemerintah di mata rakyat sangat rendah sehingga hukuman tidak membuat jera, dan ini membuat pelanggaran serta pembangkangan semakin merajalela. Tentara yang kuat ini diharapkan mampu meredam pemberontakan dari dalam dan serangan bangsa Mongol,<sup>7</sup> yang mana serangan bangsa Mongol tersebut telah memutus jalur perdagangan dari dan ke wilayah kekuasaannya, sehingga berdampak ekonomi.<sup>8</sup>

Pada bab sebelumnya disebutkan alasan-alasan Sultan Alauddin Khalji memberlakukan kebijakan ekonominya. Pertama adalah keinginannya menciptakan dan memelihara pasukan yang besar dan kuat, tidak saja untuk menghadapi serangan bangsa Mongol tetapi juga untuk melanjutkan ambisinya melebarkan sayap kekuasaannya. Kedua, dalam

---

<sup>6</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), hal. 94.

<sup>7</sup> H. M. Elliot, *The History of India as Told by Its Own Historians*, (London: Turbner & Co, 1869), III: 171

<sup>8</sup> K. Ali, *History of India, Pakistan, and Bangladesh*, (Dhaka: Ali Publications, 1980), hal. 81.

menjalankan pembenahan kebijakannya ke dalam maupun ke luar melalui pembenahan administrasi, ia membutuhkan dana besar dan harus mengurangi beban negara terutama dalam masalah gaji pegawai.<sup>9</sup> Ketiga, serangan bangsa Mongol yang telah memutuskan jalur perdagangan dari dan menuju ke wilayah kekuasaannya membuat barang menjadi langka dan membuat harga naik, serta masuknya uang yang banyak dari Deccan yang telah ditaklukkan Alauddin juga menyebabkan jatuhnya nilai mata uang dan akhirnya menaikkan harga kebutuhan harga bahan pokok.<sup>10</sup>

Berdasarkan fakta di atas, langkah yang selanjutnya diambil Sultan Alauddin Khalji di awal pemerintahannya adalah melakukan ekspansi dan juga memperkuat posisinya di dalam negeri. Bagaimanakah kebijakan pemimpin muslim yang lain dalam awal pemerintahannya?, salah satu tokoh yang coba dibandingkan dalam pembahasan ini adalah Umar ibn Khaththab (634-644 M)<sup>11</sup> yang dalam penelitian ini disebut

---

<sup>9</sup> K. Ali, *History of India.*, hal. 81 dan R. C. Majumdar and H. C. Raychaudhuri and Kalikinkar Datta, *An Advanced History Of India*, Cet. 2 (London: Mcmillan & Co, 1948), hal. 308.

<sup>10</sup> K. Ali, *History of India.*, hal. 81.

<sup>11</sup> Umar ibn Khaththab ibn Nufail ibn Abdul 'Uzza ibn Rabbah ibn Qurth ibn Razah ibn Ady ibn Ka'ab ibn Luay adalah nama lengkap khalifah kedua yang memerintah umat muslim, ia memiliki nama panggilan yaitu *amir al-mu'minin*, Abu Hafash al-Qurasyi, al-Adawi, al-Faruq. Menurut Imam an-Nawawi, Umar ibn Khaththab dilahirkan pada tahun ketiga belas setelah peristiwa Tahun Gajah. Ia masuk Islam pada tahun keenam kenabian, saat ia berusia 27 tahun. Ia termasuk orang yang paling mulia di kalangan suku Quraisy, ia dipercaya sebagai penengah atas setiap peperangan di antara para kabilah karena kemampuan diplomasinya: Imam as-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, alih

Umar I, di awal pemerintahannya ia tetap melanjutkan ekspansi perjuangan Islam sebagaimana khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar as-Shiddiq ke front Timur (Persia), Utara (Syam), dan Barat (Mesir).<sup>12</sup> Masa Umar I adalah masa perang dan penaklukan, dengan kemenangan yang selalu berada di pihak kaum muslim. Kedaulatan mereka meluas sampai mendekati Afghanistan dan Cina di sebelah timur, Anatolia dan Laut Kaspia di utara, Tunis dan sekitarnya di Afrika Utara di bagian barat dan kawasan Nubia di Mesir di bagian selatan. Politik yang Umar I jalankan adalah hendak menggabungkan semua ras Arab ke dalam satu kesatuan yang membentang dari Teluk Aden di selatan sampai ke ujung utara di pedalaman Samawah (Irak dan Syam termasuk di dalam kesatuan itu), yang mana saat itu kekuasaan di sana berada di tangan Arab Banu Lakhmi dan Banu Gassan.<sup>13</sup> Umar I juga melakukan reformasi dalam pemerintahannya dan membuat

bahasa Samson Rahman, Cet. 7 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 121. Umar I bukanlah orang yang berambisi menjadi khalifah sebagaimana terungkap dalam isi pidatonya saat dibai'at oleh kaum muslim: "Saudara-saudara!, saya hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah saya pun akan segan memikul tanggungjawab ini", dan satu malam sebelumnya setelah menghadap Abu Bakar tentang berita penunjukkan dirinya untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, pikiran Umar I dipenuhi pertanyaan bagaimana mengemban tanggungjawab besar itu apalagi harus menghadapi situasi perang di Syam dan Irak, yang mana kekuatan besar yang harus dihadapi umat Islam saat itu untuk menyebarkan Islam adalah kekuatan Persia dan Romawi yang terkenal kuat dan kejam: Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khattab*, alih bahasa Ali Audah, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), hal. 90-94.

<sup>12</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), hal. 85.

<sup>13</sup> Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khattab*., hal. 635.

kebijakan untuk mensejahterakan masyarakatnya.<sup>14</sup>

Kebijakan Umar I berbeda dengan Umar bin Abd al-Aziz (tahun 99-101 H)<sup>15</sup> yang dalam penelitian ini disebut Umar II, ketika menerima jabatan menggantikan khalifah Sulaiman ibn Abd al-Malik (tahun 92-99 H),<sup>16</sup> ia mengucapkan *inna lillahi wa*

<sup>14</sup> Karim, *Sejarah Pemikiran.*, hal. 86.

<sup>15</sup> Umar ibn Abd al-Aziz ibn Marwan atau sering diberi sebutan Abu Hafsh atau dalam penelitian ini disebut Umar II dianggap sebagai *Khalifah Rasyidin* yang kelima sesuai ijma ulama. Ini disandarkan pada pendapat Sufyan ats-Tsauri yang berkata, “Para *khalifah* itu adalah lima: yaitu Abu Bakar, Umar ibn Khaththab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, dan Umar ibn Abd al-Aziz.” (diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan-nya*) Ia merupakan sosok yang saleh, yang dilahirkan di Hulwan nama sebuah desa di Mesir pada tahun 61 H (ada yang menyebut 63 H). Ibunya bernama Ummu ‘Ashim binti ‘Ashim ibn Umar ibn al-Khaththab. Kepemimpinannya telah disebutkan oleh kakek buyutnya Umar ibn Khaththab sebagaimana diriwayatkan Imam at-Tirmidzi yang mengatakan: “akan ada dari keturunanku (Umar ibn Khaththab) seorang anak yang di wajahnya ada bekas luka, Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan.” Tanda bekas luka di wajah Umar II terdapat di wajahnya karena ditendang seekor binatang dan mengalir darah segar, kemudian ayahnya mengusap darah itu dan memberitahukan kepadanya perkataan kakek buyutnya tersebut: Imam as-Suyuthi, *Tarikh Khulafa’*, alih bahasa Samson Rahman, Cet. 7 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 269-270.

<sup>16</sup> Khalifah Sulaiman lahir pada tahun 54 H, dilantik menjadi khalifah setelah saudaranya al-Walid meninggal dunia. Al-Walid pernah ingin memecat Sulaiman dari kedudukannya sebagai putra mahkota, karena al-Walid ingin mengangkat putranya Abd al-Aziz sebagai khalifah menggantikan dirinya. Usul al-Walid ini disetujui oleh al-Hajjaj, Muhammad ibn al-Qasim, dan Qutaibah ibn Muslim, namun Umar ibn Abd al-Aziz menolak keras karena Sulaiman lebih berhak atas itu, hingga ia akhirnya dipecat dari jabatannya sebagai gubernur Madinah oleh al-Walid. Kejadian ini membuat Sulaiman membenci tiga orang pendukung al-Walid dan mencintai Umar ibn al-Aziz: A. Syalabi,

*inna ilaihi raji'un*,<sup>17</sup> bahkan ia terkulai lemas dan berkata “demi Allah, sesungguhnya saya tidak pernah memohon perkara ini kepada Allah sekali pun,”<sup>18</sup> ini menunjukkan karakternya yang tidak haus akan kekuasaan. Umar II diangkat menjadi *khalifah* berdasarkan surat wasiat khalifah Sulaiman pada bulan Safar tahun 99 H, ia menjadi khalifah dalam waktu yang sangat singkat yaitu dua tahun lima bulan sebagaimana masa Abu Bakar menjadi khalifah. Orientasi kebijakan administrasi Umar II fokus pada dua hal yaitu: pertama, memberikan jaminan keamanan bagi rakyat, demi mewujudkan ketenangan dan keamanan, ia meninggalkan kebijakan-kebijakan para pendahulunya yang memfokuskan pada perluasan dan penguasaan negara. Kedua, demi mewujudkan keamanan dan ketertiban, baik ia secara pribadi maupun kebijakan pemerintah yang netral dan berada di atas semua golongan, ras, dan suku.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan aksi penaklukan wilayah sekitar kesultanan Khalji oleh Sultan Alauddin menimbulkan perbedaan pendapat, sejarawan Ziauddin Barani mengatakan ini merupakan ambisi Alauddin untuk menjadi Alexander II dan bukan karena dorongan agama sebagaimana yang diucapkannya kepada penasehatnya Alaul Mulk,<sup>20</sup> pendapat Barani ini diikuti oleh sejarawan setelahnya. Namun apabila melihat teori dan praktek

---

*Sejarah dan Kebudayaan Islam*, alih bahasa Mukhtar Yahya, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992), II: 94.

<sup>17</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran.*, hal. 123.

<sup>18</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan kebudayaan Islam*, alih bahasa H. A. Bahaudin, Cet. 2 (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), II: 95.

<sup>19</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran.*, hal. 124.

<sup>20</sup> Elliot, *The History.*, hal. 169-172.

ekonomi Islam dalam sebuah negara termasuk praktek pada masa khalifah Umar Ibn Khaththab, akan ditemukan bahwa pendapatan untuk kas negara salah satunya adalah berasal dari ekspansi ke negara lain yaitu negara kafir, seperti harta *anfal*, *ghanimah*, *fai*, *khumus*, *kharaj*, dan *jizyah*.<sup>21</sup> *Ekspansi ke negara kafir merupakan tuntutan agama sebagai jihad* untuk menyebarkan Islam dan menundukkan mereka pada hukum Tuhan bukan ambisi nafsu materi semata, yang mana sebenarnya praktik penaklukan dan meminta upeti atas ketundukan penduduk taklukan juga dilakukan oleh bangsa lain selain Islam, walaupun ada perbedaan konsep dalam Islam dan selain Islam di dalamnya.<sup>22</sup>

Penulis melihat bahwa perlu ada pemaparan fakta yang terjadi selama masa kepemimpinan Sultan Alauddin Khalji.

---

<sup>21</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, alih bahasa Ahmad S, Cet. 1 (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 23.

<sup>22</sup> Definisi *jihad* adalah pengerahan segenap upaya dalam peperangan di jalan Allah baik secara langsung atau dengan bantuan harta, pendapat dan lain sebagainya. Hukum *jihad* adalah fardhu kifayah, jika umat Islam yang memulai aktivitas peperangan. Hukumnya fardhu 'ain, jika aktivitas *jihad* ditujukan untuk menyingkirkan musuh dari negeri-negeri umat Islam. Tujuan *jihad* adalah menyebarkan Islam, mengubah *darul kufur* menjadi *darul Islam*, menerapkan hukum Islam terhadap penduduk negeri yang telah ditaklukan. Penerapan hukum Islam dengan metode *jihad*, diakui sebagai salah satu bagian dari aktivitas da'wah, bahkan metode ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar untuk melipatgandakan kuantitas umat Islam di dunia. Aktivitas ini merupakan kewajiban hingga hari kiamat bersama *amir* (apakah ia pemimpin yang baik atau jahat) dan dalam kondisi saat ada atau tidak adanya *darul Islam*: Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, alih bahasa Zamroni, Cet. 2 (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 167.

Apabila penaklukan tersebut didasarkan pada ambisi Alauddin semata tentu ia akan melakukan tindakan kesewenangan bukan mensejahterakan rakyat di wilayah yang ditaklukan, sebaliknya apabila didasarkan pada tuntutan *jihad (the holy war)* maka konsekuensi bagi Sultan Alauddin Khalji adalah melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Fakta yang diungkapkan sejarawan seperti Amir Khusru dan Barani sebagaimana tertuang dalam Bab IV menunjukkan bahwa Sultan Alauddin berhasil memberikan keamanan, kemajuan ekonomi, dan kemakmuran bagi rakyatnya. Barani menceritakan Alauddin mau bersusah payah turun sendiri ke pasar untuk melakukan peninjauan harga.<sup>23</sup> Sikap kepedulian Alauddin yang lain terhadap rakyatnya menurut pengakuan Hamid Qalandar, pengarang *Khair al-Majalis* yang ditulis pada tahun 755-756 H atau pada masa Sultan Alauddin, yaitu ketika Qadhi Hamid Multani masuk ke dalam gudang milik negara, ia menemukan Alauddin duduk sambil berpangku tangan seolah menggambarkan sultan sedang berfikir berat, kemudian Alauddin memanggil Malik Qara Beg dan Qadhi Hamid Multani. Selanjutnya keduanya masuk ke dalam kantor sultan di salah satu ruang gudang milik negara, untuk membicarakan masalah amanah Allah kepadanya, dan ia takut akan salah dalam melaksanakan kebijakannya.<sup>24</sup>

Penaklukan yang dilakukan oleh Alauddin sebenarnya juga dilakukan oleh Umar Ibn Khatthab saat menjadi khalifah,

---

<sup>23</sup> H. M. Elliot, *The History*, hal. 196.

<sup>24</sup> Ghulam Sharwar Khan Niazi, *The Life and Works of Sultan Alauddin Khalji*, (New Delhi: Atlantic Publishers & Distributor, 1992), hal. 68-69.

yang mana ia melakukan penaklukan terhadap Persia yaitu Irak, kemudian memungut *kharaj* atas tanahnya. Umar I juga melakukan penaklukan Palestina dan Mesir, selanjutnya juga memungut *jizyah* atas penduduknya. Aktivitas penaklukan ini kadang disebut dengan *tahrir* (pembebasan) apabila wilayah tersebut direbut kembali oleh umat Islam setelah dikuasai oleh orang kafir kembali, seperti pembebasan di Mesir, Persia, dan Mada'in oleh Umar I.<sup>25</sup> Penaklukan atas negeri kafir juga membawa konsekuensi atas status harta dan tanah yang ada di negeri taklukan.<sup>26</sup>

Namun memang ada fakta sejarah yang mengarahkan bahwa Sultan Alauddin adalah sosok yang ambisius sebagaimana diungkapkan sebelumnya. Pertama, ia pernah berniat menjadi Alexander II sebagai penakluk dunia, dan juga ingin menjadi nabi. Kedua, Alauddin ketika melangkah naik ke tahta kesultanan Delhi sebagai sultan setelah kematian pamannya Sultan Jalaluddin, yang terbunuh oleh pengawal Alauddin sendiri saat Jalaluddin menemui Alauddin di perkemahan Alauddin di daerah Kara. Selain itu, Jalaluddin sebenarnya memiliki putra mahkota yang berhak atas jabatan sultan yaitu Arkali Khan yang menjadi gubernur di Multan. Ketiga, Alauddin pernah memburu Rukunuddin Ibrahim yang secara sah menjadi sultan setelah

---

<sup>25</sup> Husein Haekal, *Umar*, hal. 131, 388, 595, 382, 462, dan 221.

<sup>26</sup> Status tanah taklukan dibagi 3 jenis yaitu milik negara, umum, dan pribadi tergantung pada keadaan tanah tersebut, apakah itu termasuk tanah yang masuk wilayah Islam lewat penaklukan (*fathu*), masuk dalam wilayah Islam lewat da'wah, atau melalui perjanjian (*shulhu*): M. Baqir ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishoduna*, alih bahasa Yudi, Cet. 1 (Jakarta: Zahra Publishing, 2008), hal. 189-194.

kematian ayahnya Sultan Jalaluddin, Alauddin mengejarnya sampai Multan kemudian membunuhnya. Berdasarkan fakta-fakta ini memang ada perbedaan karakter antara Alauddin Khalji, Umar ibn Khaththab dan Umar ibn Abd al-Aziz ketika menerima jabatan sebagai pemimpin negara, serta persamaan dan perbedaan dalam kebijakan mereka.

#### Pembahasan Penerapan Kebijakan Pengendalian Harga

Kebijakan pengendalian harga Sultan Alauddin Khalji ini ada tujuh sebagaimana yang dijelaskan pada Bab III, tetapi apabila diringkaskan ada 4 yaitu: pertama, melakukan penetapan harga atas kebutuhan pokok, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat sekalipun ia miskin. Kedua, mendirikan lembaga pengawas pasar dan memilih pejabat yang mampu melaksanakannya, serta mengatur mereka dalam sebuah sistem kontrol yang mewajibkan memberikan laporan langsung kepada sultan. Ketiga, mendirikan gudang penampungan gandum milik negara, yang pengelolaannya diserahkan pada badan tertentu. Keempat, menyediakan transportasi pengangkutan dari petani ke gudang, dan dari gudang ke wilayah pemasaran. Kelima, peningkatan produksi pertanian.

#### 1. Kebijakan Pertama

Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Sultan Alauddin adalah menetapkan harga barang kebutuhan pokok dan kebutuhan mendesak lainnya dalam harga yang sangat murah, tujuannya adalah agar barang kebutuhan pokok tersebut tidak hanya ada di pasar namun juga dapat dijangkau oleh siapa pun

tanpa memandang status ekonomi. Kebijakan penetapan harga tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak menzhalimi siapa pun.<sup>27</sup>

Penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam disebut *tas'ir*,<sup>28</sup> Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*. *Ats-tsaman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fikih menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *ats-tsaman*. Berkaitan dengan hukum dari kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) ini ada sebagaimana fuqaha yang mengharamkannya, dasarnya adalah hadist Nabi Muhammad SAW ketika menolak saat diminta untuk menetapkan harga tatkala terjadi kenaikan harga di Madinah, namun ada juga fuqaha yang membolehkannya.

Apabila melihat Hadist Nabi Muhammad SAW di atas, ada sebagian fuqaha berpendapat bahwa sifat dasar dari penetapan harga (*tas'ir*) adalah menzhalimi dan tidak ada keraguan bahwa

---

<sup>27</sup> H. M. Elliot, *The History*., hal. 192.

<sup>28</sup> *Tas'ir* secara bahasa berasal dari kata *as-si'ru* dari susunan huruf *sin*, *a'in* dan *ra'* yang artinya berlaku atasnya harga (*aladzi yaqumu 'alaihi ats-tsamanu*), dan dikatakan dalam kata kerja *as'aruw* dan *sa'aruw tas'iran* artinya bersepakat atas harga (*ittafaqu 'ala si'rin*). Secara istilah kata *tas'ir* adalah urusan dari seorang sultan (penguasa) atau pembantu/wakilnya (*naibuhu*) atau wali-walinya (*wulatuhu*) untuk membatasi bagi pedagang di pasar untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan satu harga seperti ini tanpa tambahan atau pengurangan untuk tujuan kemashlahatan: Muhammad Sulaiman al-Asyqar dkk., *Mabhuts Fiqhiyah Fi Qadhaya Iqtishodiyatin Mu'ashiratin*, (Aman: Dar al-Nafais, 1998), I: 365.

kezhaliman adalah haram, oleh sebab itu *tas'ir* adalah haram.<sup>29</sup> Keharaman penetapan harga ini bersifat umum untuk semua barang, tanpa dibedakan antara barang makanan pokok maupun bukan pokok, ini disebabkan hadist-hadist tersebut melarang penetapan harga secara mutlak, yang mana tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya.<sup>30</sup> Namun ada juga yang mengatakan bahwa *tas'ir* diperbolehkan jika adanya jaminan dari penguasa dengan pemberlakuan *si'ru al-mitsli* pada saat inflasi yang melebihi dari nilai keadilan (harga normal) sebagai akibat dari penimbunan oleh pedagang (pelaku pasar), atau negara dalam keadaan miskin (defisit anggaran) sehingga membutuhkan barang-barang untuk tetap melayani (masyarakat) seperti pada saat perang atau paceklik (*maja'atun*), jadi *tas'ir* dibolehkan karena suatu keadaan tertentu seperti di atas dengan pemberlakuan harga pasar yang adil (*si'ru as-suqi al-'adl*) atau dengan harga satuan yang wajar (*tsamanu al-mitsli*), berkaitan dengan hal ini Ibnu Qoyyim al-Jawziyah berkata:

---

<sup>29</sup> Hadist tersebut berbunyi “dari Anas, ia berkata: harga barang naik di Madinah pada masa Rasulullah SAW, maka seorang penduduk berkata: “Ya Rasulullah harga barang naik dan andai saja engkau (Rasulullah) menetapkan harga”. Maka Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah Yang Menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan rezeki, dan sesungguhnya Aku (Rasulullah) sangat berharap bertemu Allah tidak ada seorang manusia menuntut-ku karena kezhaliman yang kulakukan kepadanya atas darah dan juga hartanya” (Asy-Syaukani, *Nailu al-Awthar*, hal. 220): Mahmud Hamudah dan Mushtafa Hasanain, *Adhwau 'ala al-Mu'amalati al-Maliyati fi al-Islami*, Cet. 2 (Oman: Muasasah al-Warraq, 1999), hal. 106.

<sup>30</sup> An-Nabhani, *Membangun.*, hal. 212-214

Dan *pada tas'ir* (penetapan harga pasar) itu sebagiannya adalah zhalim yang (jelas) haram, dan sebagiannya adalah keadilan yang diperbolehkan, maka termasuk kezhaliman terhadap manusia dan memaksa mereka tanpa dasar yang dibenarkan untuk menjual beli jika dengan *tsaman* (harga satuan) yang mereka tidak ridha atau melarang mereka atas apa saja yang telah diperbolehkan Allah atas mereka maka itu termasuk haram, dan termasuk adil di antara manusia seperti jika memaksa mereka atas apa yang wajib bagi mereka termasuk ganti rugi dengan *tsaman al-mitsli* dan melarang mereka untuk mengambil tambahan atas ganti rugi *al-mitsli*, maka itu boleh tetapi juga wajib.<sup>31</sup>

Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang sama bahwa *tas'ir* tidak diizinkan *syari'at* dalam keadaan normal, ia mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad menolak melakukan penetapan harga atas gejolak harga di Madinah karena Rasulullah menghendaki harga berkembang alami. Kesimpulannya, *tas'ir* tidak boleh diterapkan bila tidak ada hambatan artificial (tidak alami) dalam menentukan tingkat harga di pasar. Ibnu Taimiyah selanjutnya lebih dalam membahas tentang perkara ini, ia mengatakan jika gejolak inflasi disebabkan oleh sesuatu yang tidak alami seperti harga dikendalikan oleh orang yang secara ekonomi kuat demi kepentingan mereka, maka *muhtasib* (badan pengawas pasar) memiliki kewajiban untuk menerapkan

---

<sup>31</sup> Muhammad Ali Jum'ah, *Mawsu'at al-Iqthishodi al-Islamiyy: Fi al-Mashorifi wa an-Nuqudi wa al-Aswaqi al-Maliyyat*, (Kairo: Dar as-Salam, 2009), I: 402

ukuran-ukuran yang benar karena *syari'at* memiliki tujuan menciptakan keadilan dan menjaga kepentingan umum dari kesulitan. Ada kemungkinan bahwa kelompok-kelompok yang kuat di pasar dapat mempermainkan harga lewat penimbunan pasokan, mengurangi produksi, membanjiri pasokan, atau sekedar lewat kolusi. Dalam kasus seperti ini, harga dapat ditetapkan oleh *muhtasib* pada tingkat yang wajar yang bisa menyehatkan kembali harga alami. *Muhtasib* dapat menerbitkan laporan beberapa harga barang yang telah ditetapkan kemudian dipublikasikan, sehingga pedagang yang menjual di atas harga tersebut dapat diberi hukuman.<sup>32</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa perbedaan di antara para ulama tentang *tas'ir* adalah pada masalah persetujuan sukarela dan kontrol memaksa, yang mana ini dapat diuraikan apabila memahami fakta Madinah saat Rasulullah menolak menetapkan harga. Salah satu orang ulama yang membolehkan *tas'ir* yaitu Ibnu Habib, yang mana ia memberikan solusi terkait mekanisme penetapan harga. Ibnu Habib memberikan cara kerja sistem ini, yang mana hendaknya imam (pemerintah) mengumpulkan pihak yang ada di pasar dan menghadirkan satu pihak lain lagi sebagai penilai atas kejujuran pihak-pihak dari pasar. Imam selanjutnya menanyakan tentang bagaimana mereka membeli dan bagaimana mereka menjual, kemudian imam menetapkan harga yang tidak merugikan kedua belah pihak dan masyarakat. Jadi harga yang ditetapkan adalah harga sukarela

---

<sup>32</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa Arif Maftuhin Dzofir, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 47.

bukan harga paksa. Cara ini diharapkan mampu mengetahui kepentingan penjual dan pembeli. Penjual tetap memperoleh keuntungan yang menjadi haknya, sementara pada saat yang sama tidak merugikan kepentingan umum. Jika *tas'ir* ditetapkan atas para penjual bukan didasarkan pada kerelaannya karena hilangnya keuntungan mereka, maka hal itu dapat merusak harga, melemahkan kekuatan ekonomi, dan merugikan harga seseorang. Hal ini jelas tidak diperbolehkan. Adapun jika orang tidak menjual apa yang wajib mereka jual, maka dalam hal ini mereka diperintahkan untuk menunaikan kewajibannya dan diberi sanksi jika tidak menjualnya. Demikian pula bagi orang yang berkewajiban menjual dengan harga standar (yang ditetapkan) dan ia tidak mau menjual kecuali dengan harga yang lebih mahal dari pada harga yang ditetapkan, maka ia diperintahkan untuk menunaikan kewajibannya dan diberi sanksi jika tidak melaksanakannya.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kondisi Madinah ketika inflasi terjadi dan Rasulullah menolak untuk menetapkan harga adalah unik. Madinah saat itu, umumnya makanan diperoleh dari luar. Adakalanya memang makanan yang dijual dari hasil pertanian Madinah sendiri seperti gandum. Madinah saat itu tidak ada penjual atau pembeli khusus, sehingga tidak ada seorang pun yang mungkin dipaksa untuk menjual atau mengerjakan sesuatu. Sebaliknya, warga muslim Madinah semuanya satu jenis, semuanya berjihad di jalan Allah. Semua orang yang sudah baligh, mampu berjihad, pergi ke medan perang. Semua berjihad dengan jiwa dan harta rampasan perang yang mereka

terima, maka memaksa penjual untuk tidak menjual kecuali dengan harga tertentu adalah kezaliman. Jika memaksa mereka untuk menjual saja tidak boleh, maka memaksa mereka dengan harga tertentu jelas lebih tidak boleh lagi.<sup>33</sup>

Fuqaha yang mengharamkan secara mutlak, menganggap bahwa *tas'ir* terjadi manakala negara ikut terlibat dalam menentukan harga dan membuat harga tertentu untuk semua barang atau beberapa barang, serta melarang tiap individu untuk melakukan transaksi jual beli melebihi atau mengurangi harga yang telah ditentukan oleh negara, sesuai dengan kepentingan khalayak yang dijadikan pijakan oleh negara. Pijakan dalil yang digunakan adalah pendapat Imam Ahmad dari hadist yang diriwayatkan oleh Anas, dan pendapat Imam Abu Daud dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang penolakan Rasulullah untuk menetapkan harga di Madinah ketika harga membumbung.

Pematokan harga dinisbatkan sebagai bentuk kezaliman yang harus diadakan kepada penguasa agar menghilangkannya, namun apabila yang melakukan pematokan harga adalah penguasa apakah ia seorang khalifah atau pun gubernur, maka rakyat harus mengadukan ke *mahkamah mazhalim* untuk menghilangkannya. Pengharaman ini bersifat umum, tanpa dibedakan antara barang makanan pokok dengan bukan makanan pokok, antara keadaan perang dengan damai. Sebab, hadist-hadist tersebut melarang pematokan harga secara mutlak, sehingga maknanya umum, yang mana tidak terdapat dalil yang mengkhuseuskannya. Pematokan harga dianggap

<sup>33</sup>Taimiyah, *Tugas.*, hal. 52-54.

membahayakan umat baik dalam keadaan perang atau damai, karena akan memunculkan pasar gelap, yang mana orang-orang akan melakukan transaksi jual beli dengan penjualan di bawah tangan, yang tidak diketahui oleh pengawasan negara. Naiknya harga pada masa perang, atau pada saat terjadinya krisis politik dapat terjadi akibat dari penimbunan barang, atau karena kelangkaan barang karena produksi. Apabila membunganya harga disebabkan karena penimbunan maka itu diharamkan dan ditindak oleh negara, namun jika disebabkan oleh rendahnya produksi maka khalifah harus mencukupi kebutuhan barang tersebut di pasar dengan mengusahakan pengadaannya dari kantong-kantong pusat produksi barang tersebut.<sup>34</sup>

Praktek *tas'ir* ini tidak dipraktekkan pada masa Umar Ibn Khaththab karena beberapa alasan, pertama karena pajak bagi barang-barang masuk (barang impor) sangat rendah dan negara sangat memperhatikan keadaan rakyat dengan banyak membangun pasar, hasilnya barang banyak beredar di pasar sehingga harga barang bersaing dan terjangkau. Alasan kedua karena industri pertanian sudah maju saat itu, sehingga harga barang kebutuhan pokok sangat rendah, kalau pun pernah terjadi kenaikan harga itu disebabkan paceklik (gagal panen), maka khalifah Umar I melakukan impor besar-besaran sehingga harga turun, tetapi harga yang telah turun ini pun belum mampu dijangkau oleh rakyat karena memang daya beli masyarakat saat itu sangat rendah, akhirnya Umar I membagikan kupon yang bisa ditukarkan dengan barang kebutuhan pokok untuk fakir

---

<sup>34</sup> An-Nabhani, *Membangun.*, hal. 212-214.

miskin secara gratis.<sup>35</sup>

Sultan Alauddin Khalji juga menetapkan harga seluruh barang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sayuran, buah-buahan, peci/kopiah (*caps*), sepatu (*shoes*), pakaian (*cloth*), senjata (*arms*), jarum (alat tenun/*needles*) juga dipatok harganya, bahkan sebuah kuda yang paling bagus dihargai 120 *tanka*, sapi perah (*milch cow*) dihargai 4 *tanka*, kerbau perah (*milch buffalo*) dihargai 6 *tanka*, dan lain sebagainya.<sup>36</sup> Yang menarik mengapa peci, sepatu dan jarum atau alat tenun dipatok oleh Alauddin, mungkin ini didasarkan bahwa di India terutama di Bangla dan Gujarat terkenal sebagai pengeksport barang-barang tekstil kapas yang mana sebagian besar penduduknya menggantungkan pada kegiatan ini.<sup>37</sup> Penulis menilai kebijakan ini penting jika disandarkan atas pendapat Ibn Taimiyah, yang mana negara wajib memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang produksi, seperti produk pertanian, tekstil, dan bangunan. Sebab masyarakat tidak dapat berjalan tanpa adanya makanan untuk dikonsumsi, baju untuk dikenakan, dan perumahan untuk tempat tinggal. Ketika produk tekstil lokal seperti produk Hijaz di masa Rasulullah tidak dapat mencukupi kebutuhan pasar, maka dapat diambilkan produk tekstil dari Yaman, Mesir, dan Syam. Walaupun di sana penduduknya kafir, umat Islam boleh mengenakan pakaian yang mereka tenun tanpa perlu dicuci terlebih dahulu. Termasuk juga berkaitan dengan makanan dan

---

<sup>35</sup> Husein Haekal, *Umar.*, hal. 358-363.

<sup>36</sup> K. Ali, *History.*, hal. 81.

<sup>37</sup> M Abdul Karim, *Sejarah Islam di India*, (Yogyakarta: Bunga Rafflesia Production, 2003), hal. 5.

bangunan untuk berteduh dan istirahat, maka menurut Ibn Taimiyah sebgaaian besar ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hamad, Imam al-Ghazali dan al-Jauzi menetapkan hukumnya *fardhu kifayah* untuk memproduksi barang-barang tersebut.<sup>38</sup>

## 2. Kebijakan Kedua

Berkaitan dengan Kebijakan Kedua yang dilakukan oleh Sultan Alauddin Khalji yaitu menunjuk Malik Kabul Ulugh Khan, seorang praktisi dan orang bijak untuk memantau pasar. Ulugh Khan melaksanakan tugasnya dibantu oleh intelejen yang memberikan informasi semua praktek yang dilakukan setiap pedagang.<sup>39</sup> Pasar yang ada ketika zaman Sultan Alauddin diserahkan pengelolaannya kepada dua pejabat yaitu *Diwan-e-Riyasat* dan *Shahana-e-Mandi*, yang mana tugas *shahana-e-Mandi* adalah mengawasi khusus pasar yang menjual bahan makanan, sedangkan tugas *Diwan-e-Riyasat* adalah mengawasi pasar yang menjual kebutuhan sandang (pakaian) dan pasar secara umum. Malik Kabul Ulugh Khan adalah orang yang pertama menjabat sebagai *Shahana-e-Mandi* dan dibantu oleh banyak staf yang membantunya, tugasnya secara rinci adalah memantau pasar agar para pedagang yang menjual barang pangan tetap tertib, menjual barang dagangan sesuai dengan harga yang ditetapkan, dan menjaga agar tidak muncul pasar gelap terhadap barang apa pun. Yakub adalah orang pertama yang menjabat sebagai *Diwan-e-Riyasat* bertugas mengatur para pedagang yang tertulis dalam *daftar* dan juga jumlah bahan pangan yang dibawa mereka

<sup>38</sup> Taimiyah, *Tugas.*, hal. 32-33.

<sup>39</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal. 193.

dari gudang milik pemerintah untuk dijual ke pasar. Selain mereka, Sultan juga menunjuk sejumlah mata-mata yang selalu memberikan laporan kepada Sultan tentang kondisi pasar.<sup>40</sup>

Umar I juga melakukan pemantauan terhadap penerapan aturan di masyarakat, ia adalah orang yang pertama kali mendirikan *al-Muhtasib* yang bertugas memperhatikan urusan yang berhubungan dengan tata tertib (peraturan) umum dan dalam kriminalitas (pidana) yang terkadang menghendaki penyelesaian dengan cepat. Umar I menempatkan dirinya sebagai *al-Muhtasib*, walaupun dahulu kata ini belum dipergunakan kecuali sejak masa pemerintahan Khalifah al-Mahdi dari Abbasiyah, namun posisi Umar I dan tugasnya menggambarkan kesamaan fungsi. Selain itu Umar I sebagai *al-Muhtasib* memiliki tugas *amar ma'ruf nahyi munkar* serta memelihara etika, memelihara hukum syara', mengatasi peraturan pasar, mencegah bermunculannya kedai-kedai sehingga peraturan lalu lintas tidak terganggu, mengawasi para debitur agar melunasi hutangnya, memeriksa timbangan dan takaran agar tidak terjadi kecurangan, menghukum orang yang mengabaikan syariat atau menaikkan harga, melarang pelanggaran atas aturan bertetangga, melarang mendirikan bangunan *ahlu dzimmah* lebih tinggi dari bangunan kaum muslim.<sup>41</sup>

Ibn Taimiyah memberikan rincian atas tugas dari *al-muhtasib* ini yaitu melakukan *amar ma'ruf nahyi munkar* seperti memerintahkan orang untuk sholat lima waktu dan menjatuhkan sanksi bagi yang meninggalkan sholat, memerintahkan orang

---

<sup>40</sup> K. Ali, *History.*, hal. 82-83.

<sup>41</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah.*, hal. 377-378.

berkata jujur dan benar, menunaikan amanat, dan mencegah kemungkar.<sup>42</sup> Salah satu bentuk pencegahan kemungkar adalah mengawasi ukuran takaran dan timbangan agar benar, mengawasi kecurangan dalam perdagangan seperti praktek menyembunyikan kecacatan barang ketika jual beli, mencegah munculnya akad atau transaksi illegal seperti penimbunan, judi, riba, *gharar*, dan akad perdagangan yang dilarang syara'. Bahkan pada kasus tertentu, yang mana ketika masyarakat sangat membutuhkan, pemerintah melalui *al-muhtasib* berkewajiban untuk memaksa para penjual untuk menjual apa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang layak. Termasuk jika ada orang yang memiliki simpanan beras yang berlimpah melebihi kebutuhan hidupnya sendiri, sedang pada saat yang sama masyarakat dilanda kelaparan, maka pemerintah melalui *al-muhtasib* harus memaksanya menjual beras yang berlimpah itu dengan harga standar, dan ini menurut Ibn Taimiyah disepakati oleh para fuqaha.<sup>43</sup>

Pada masa kekhilafahan Umayyah, termasuk di dalamnya Umar II juga dibentuk *al-muhtasib* yang disebut juga *shahib al-suq* di setiap kota, yang mana tugas mereka juga mengemban urusan yang berhubungan dengan para pedagang pasar maka disyaratkan orang yang ditunjuk memiliki ilmu, *ma'rifah*, cerdas, dan terpilih dari kalangan hakim. *Al-muhtasib* di Andalusia ini memiliki sistem pada bidang yang detail, sampai ketentuan harga berbagai kebutuhan ditulis secara rinci, pengawasan kepada pedagang juga sangat ketat, bahkan mereka dilengkapi dengan

---

<sup>42</sup> Taimiyah, *Tugas.*, hal. 17.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 18-24.

undang-undang tentang *hisbah* yang harus mereka pelajari dan kuasai dengan seksama sebagaimana mereka menguasai dan mempelajari fiqih, karena menurut mereka urusan *ihtisab* termasuk dalam seluruh barang dagangan.<sup>44</sup>

*Muhtasib (qadhi hisbah)* dalam melaksanakan tugasnya berhak memutuskan tindakan penyelewengan (*mukhalafah*), begitu kasusnya terjadi, di mana pun posisinya berada tanpa memerlukan ruang sidang pengadilan. Saat menjalankan tugasnya *qadhi hisbah* biasanya didampingi oleh beberapa polisi (*syurthah*) untuk melaksanakan perintah dan menjalankan keputusannya seketika itu juga.<sup>45</sup>

Polisi adalah pasukan yang ditugaskan oleh khalifah atau gubernur untuk memelihara keamanan, menjaga penerapan aturan, menangkap orang melakukan tindak pidana dan kerusakan, di samping mengawal dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah agar berjalan dengan baik dalam upaya mewujudkan keselamatan dan ketenangan masyarakat. Mereka mengenakan tanda khusus dalam melaksanakan tugas sehingga mereka mudah dikenal. Umar I adalah orang pertama yang menerapkan sistem ini, yang mana pada saat kaum muslim menaklukkan Mesir (tahun 20 H) kepolisian berkedudukan di Fusthath. Pada mulanya kepolisian menginduk pada pengadilan, namun kemudian kepolisian terpisah dari pengadilan dan bersifat independen yang berwenang melacak berbagai tindakan kriminal sebagaimana pada masa Umar II. Pada masa

---

<sup>44</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah.*, hal. 379-380.

<sup>45</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Maghfur Wahid, Cet. 3 (Bangil Jatim: Al Izzah, 2002), hal. 242.

Hisyam ibn Abdul Malik (724-743 M) ada modifikasi dengan menambahkan posisi orang yang bertugas meneliti tindakan-tindakan militer dan menjadi penengah antara wewenang kepala polisi dan komandan militer. Pada masa Shalih ibn Ali al-Abbasi mendirikan markas kepolisian di al-Mu'askar diberi nama *asy-Syurthah al-'Ulya*, dan markas kepolisian di al-Fusthath diberi nama *asy-Syurthah as-Sufla*.<sup>46</sup>

Pada masa kekhilafahan Umayyah di Andalusia (termasuk di dalamnya Umar II), pimpinan polisi disebut *Shahib al-Madinah*, sedangkan pada kekhilafahan Utsmani di Turki jabatan ini disebut *al-Wali*. Jabatan ini di bawah kepemimpinan panglima angkatan bersenjata dalam pemerintahan dan kadang dipegang oleh kepala negara langsung. Kepolisian di masa Umayyah dibagi dalam dua bagian yaitu Kepolisian Besar dan Kepolisian Kecil, yang mana Kepolisian Besar diberi wewenang untuk menindak kalangan elit atas berbagai tindakan kejahatan, sedangkan Kepolisian Kecil diberi wewenang untuk menindak kalangan rakyat biasa.<sup>47</sup>

Fakta pada masa Umar I dan Umar II menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan atas pelaku pasar sudah berjalan, termasuk pada masa khilafah Abbasiyah dan Utsmani.

### 3. Kebijakan Ketiga dan Keempat

Kebijakan ini adalah membangun lumbung gandum untuk menampung bahan kebutuhan pokok terutama gandum dan

---

<sup>46</sup> A. Syalabi, *Sejarah*., hal. 329-330.

<sup>47</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, alih bahasa Masturi Ilham dkk, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2011), hal. 448-449.

menyediakan transportasi pengangkutan dari petani ke gudang, dan dari gudang ke wilayah pemasaran.

Pengelolaan lumbung pangan ini pada masa pemerintahan Islam diserahkan kepada *Muhtasib*, yang mana pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin badan ini disebut *Diwan-e Riyasat* dan *Shahana-e Mandi*. Tugas *Muhtasib* secara rinci adalah mengatur produksi dan pasokan barang dengan berbagai cara. Pertama, ia harus memastikan bahwa semua sumber daya tidak mengalir kepada produksi dan distribusi yang secara kategoris tergolong haram menurut syari'ah. Kedua, *Muhtasib* harus selalu ketat mengawasi posisi pasokan barang kebutuhan pokok, khususnya bahan makanan. Ketiga, semua perdagangan harus dilakukan di pasar terbuka. Keempat, para pedagang tidak boleh bersekongkol untuk menawarkan harga yang tinggi secara artifisial. Kelima, para pedagang tidak boleh membuat kelompok untuk mencegah masuknya pemain baru di pasar. keenam, pedagang kota tidak diizinkan untuk menjemput pemasok desadi tengah jalan dan membeli produk mereka dengan harga yang lebih murah. Ketujuh, di sebagian negeri muslim seperti Tunisia (seperti di Qairawan), para pemasok desa cukup diberi akomodasi, hotel, dan tempat peristirahatan di dekat pasar, sehingga mereka dapat menunggu beberapa hari dan menilai pasar bagi diri mereka sebelum melakukan tawar menawar. Kedelapan, makelar yang tidak memberikan sedikit pun manfaat pada produk kecuali hanya menambah harga lebih tinggi harus disingkirkan. Kesembilan, kepentingan para pedagang sebagai suatu kelas juga dilindungi dari tindakan *dumping* di pasar oleh

kelompok yang lain.<sup>48</sup>

Umar I juga membuat kebijakan untuk mengatur persediaan bahan pokok, perihal ini telah diriwayatkan oleh Ibnu As'ad bahwa Umar I membuat lumbung yang di dalamnya disimpan tepung gandum, kurma, anggur kering (kismis), dan semua bahan logistik yang diperlukan. Lumbung itu dipergunakan Umar I untuk membantu orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Lumbung itu didirikan di antara Mekkah dan Madinah yang mudah dijangkau oleh orang yang membutuhkan apa yang disimpan di dalamnya. Umar I juga orang yang pertama kali membawa bahan makanan dari Mesir lewat Laut Iyilah ke Madinah.<sup>49</sup> Lumbung di Madinah ini merupakan bagian dari *bait al-mal* yang digunakan Umar I untuk menyimpan cadangan bahan makanan pokok ketika lapang, dan ketika kemarau mereka akan mengeluarkan makanan itu untuk dimakan.<sup>50</sup>

Sebagai contoh dari pemanfaatan lumbung pangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan orang miskin adalah ketika Umar I berkeliling di tengah malam memeriksa kondisi penduduknya, ia menemukan tangisan bayi yang membutuhkan makan namun ibu bayi tidak memiliki makanan tersebut. Kemudian Umar I pergi ke lumbung pangan untuk mengambil dan membawa sendiri satu karung tepung terigu dan sekantong lemak untuk

---

<sup>48</sup> Prolog yang ditulis Muhammad Akram Khan sebagai ringkasan atas tugas *muhtasib* yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah: Taimiyah, *Tugas.*, hal. xx-xxii

<sup>49</sup> Imam as-Suyuthi, *Tarikh Khulafa'*, alih bahasa Samson Rahman, Cet. 7 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 159.

<sup>50</sup> Husein Haekal, *Umar.*, hal. 357.

diberikan ke keluarga tersebut.<sup>51</sup> Keefektifan pemanfaatan lumbung pangan ini terbukti ketika terjadi sebuah bencana kelaparan yang menimpa kaum Muslim di Madinah, yang mana penyebabnya adalah kemarau yang berlangsung selama sembilan bulan, tetapi penduduk bisa bertahan dengan cadangan makanan selama itu. Akibat kemarau yang berlangsung lama, akhirnya persediaan makanan menipis dan ditambah lagi penduduk Arab pedalaman yang jauh dari lumbung berdatangan ke kota untuk meminta pertolongan kepada Umar I. Umar I akhirnya meminta bantuan kepada gubernurnya di Irak, Syam, dan Palestina untuk mengirimkan cadangan makanan berupa ternak, gandum, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya.<sup>52</sup> Inilah fakta pemanfaatan fungsi dari lumbung pangan di masa Umar I.

#### 4. Kebijakan Kelima

Kebijakan ini adalah meningkatkan produksi pertanian. Pada masa Sultan Alauddin kebijakan peningkatan produksi pertanian dilaksanakan dengan meminta kepada para *wali* (pimpinan ke gubernuran) untuk memaksimalkan dan menjaga produktifitas tanah pertanian, selain itu Sultan Alauddin menata kembali kepemilikan tanah-tanah pertanian ini yang sebelumnya dimiliki *jagirdar* (tuan tanah) muslim dan kemudian mengubah statusnya menjadi tanah negara (*crown land*).<sup>53</sup> Sultan Alauddin juga menghapus hak istimewa *zamindar* Hindu yang sebelumnya memiliki hak istimewa untuk menarik pajak dari petani dengan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 655-656.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 358-359.

<sup>53</sup> Ghulam Sarwar Khan Niazi, *The Life.*, hal. 55.

sistem bagi hasil dengan negara diubah menjadi sistem upah yang mereka terima setiap bulannya.<sup>54</sup> Sebagai hasilnya petani lepas dari ikatan sistem *jagirdari* dan *zamindari* tersebut, produktifitas pertanian meningkat karena petani bersemangat dan keuntungan dari pertanian tidak mengalami penyusutan karena langsung berhubungan dengan sultan melalui bendahara negara, tidak melalui pihak ketiga. Kebijakan ini juga dilakukan oleh Umar I, yang mana gubernur diangkat dan digaji oleh khalifah. Selanjutnya khalifah juga memilih seseorang sebagai *naib* (pembantu) bagi gubernur dalam menjalankan tugasnya, dan pegawai untuk menangani urusan negara serta menarik harta. Berkaitan dengan hakim di daerah dan pegawai perpajakan di daerah, maka Umar I mengontrol langsung kinerja mereka secara pribadi sekaligus pelaporannya.<sup>55</sup>

Kebijakan Umar I memiliki kesamaan dengan Alauddin Khalji dalam memaksimalkan produktifitas pertanian, hal itu sebagaimana termaktub dalam dekrit Umar I terkait tanah *sawad* (tanah subur) yang mana ia melarang orang Arab termasuk di dalamnya tentara untuk melakukan transaksi jual beli tanah di luar Arab, alasannya adalah untuk meningkatkan mutu tentara Islam agar lebih fokus kepada penaklukan, dan produksi pertanian meningkat karena diserahkan kepada ahlinya (orang Arab terkenal pandai berperang dan berdagang bukan pandai bertani). Sebagai gantinya para tentara diberi gaji bulanan,

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>55</sup> Qutbh Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab*, alih bahasa Ahmad Syarifuddin, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 131.

sehingga inilah awal munculnya tentara *regular*.<sup>56</sup> Adapun tanah yang berhasil ditaklukkan tetapi tidak dibagikan kepada tentara muslim adalah tanah *sawad* di Mesir<sup>57</sup> dan di Irak,<sup>58</sup> Umar I hanya memberlakukan *kharaj*<sup>59</sup> dan *jizyah*<sup>60</sup> pada kedua tanah tersebut.

---

<sup>56</sup> M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran.*, hal. 87-88.

<sup>57</sup> Qutbh Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi.*, hal. 85.

<sup>58</sup> Husein Haekal, *Umar.*, hal. 761-764.

<sup>59</sup> *Kharaj* adalah pajak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah diambil dari kaum kafir (non muslim), baik dengan cara perang maupun damai. Apabila perdamaian tersebut menyepakati, bahwa tanah itu milik orang muslim, mereka (kaum kafir) dapat memanfaatkannya dengan membayar *kharaj* sebagai bentuk pengakuan bahwa tanah itu milik orang muslim. *Kharaj* menurut bahasa bermakna *al-kara'* (sewa) dan *al-ghullah* (hasil). Tiap tanah yang diperoleh secara paksa (perang), maka tanah itu menjadi tanah *kharajiyah*, apabila mereka memeluk Islam setelah penaklukan tersebut, status tanah mereka tetap *kharajiyah*. Umar I menetapkan *kharaj* atas tanah dihitung berdasarkan 3 hal yaitu luas tanahnya, tanamannya, atau berdasarkan kadar hasil panennya, dan ia tidak bertindak zalim terhadap si pengelola. Umar I mengambil *kharaj* dari pengelola setiap akhir tahun *Qomariyah*, dan berbeda aturan di setiap daerah: Taqiyyuddin An-Nabhaniy, *Membangun.*, hal. 260-261.

<sup>60</sup> *Jizyah* adalah pajak atas jiwa yang dipungut oleh kaum muslim dari orang kafir sebagai tanda ketundukannya kepada Islam. Apabila orang kafir telah memberikan *jizyah*, maka wajib bagi kaum muslim untuk melindungi jiwa dan harta mereka. Pihak yang diwajibkan mengeluarkan *jizyah* adalah ahli kitab baik Yahudi dan Nashrani, baik mereka dari ahli kitab itu dari Arab atau non-Arab, termasuk juga dari Majusi, Shabiah, Hindu, dan orang komunis. Terkait dengan orang Paganis Arab, tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali masuk Islam atau diperangi, karena mereka dikategorikan sebagai orang musyrik, pengecualian ini didasarkan pada surat al-Baraah yang turun pada saat perang Tabuk di tahun 9 H, yang mana memerintahkan untuk memungut *jizyah* dari ahli kitab dan memerangi orang Paganis Arab. Dahulu, ukuran *jizyah* adalah 1 dinar per orang setiap tahun, yang diambil dari setiap laki-laki baligh dan bukan pada anak-anak, orang gila, dan wanita.

Berkaitan dengan kebijakan untuk memaksimalkan produksi pertanian, Umar ibn Abd al-Aziz (Umar II) dari Dinasti Umayyah juga memberlakukan kebijakan yang sama dengan Umar I yaitu ia mencabut seluruh hak Banu Marwan atas tanah di Irak karena dianggap sebagai harta illegal. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa kekhilafahan Umayyah, banyak ahli sejarah yang mengakui sejak berdirinya kekhilafahan ini sudah tampak tata politik yang berbeda dengan *al-Khulafa ar-Rasyidun*.<sup>61</sup> Muawiyah sebagai pendiri kekhilafahan ini lebih menonjolkan politik Arab-nya, dan membagi wilayah kekuasaannya dalam lima front yang berbeda penerapan kebijakan di setiap frontnya. Berbagai pendekatan psikologis dan sosial kesejahteraan dilakukan oleh Muawiyah dan penerusnya, semua itu dimaksudkan untuk mendapatkan pengaruh dan dukungan penduduk untuk memperkuat posisinya.<sup>62</sup> Namun kadang kebijakan itu keras terhadap front yang lain, seperti penguasaan tanah tanpa tuan di Irak yang mana pada masa Umar ibn Khaththab diserahkan kepada golongan Khawarij dan Murji'ah, dan khalifah selanjutnya Orang yang tergolong fakir, maka tidak dipungut *jizyah* darinya tetapi mereka disantuni. Berhentinya pemungutan *jizyah* atas seseorang ketika ia masuk Islam atau menjadi muslim: Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, alih bahasa Ahmad S, Cet. 1 (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 57-61.

<sup>61</sup> Inilah sebab Effat al-Sharqawiy menilai bahwa telah terjadi perbedaan besar dalam peradaban Islam, yaitu antara politik Islam dan politik kaum muslimin. Politik Islam merupakan tata aturan dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, namun politik kaum muslimin lebih cenderung kepada partai atau golongan: Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 38.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 38-39.

tetap mempercayakan penguasaannya kepada dua golongan tersebut hingga datang masa Muawiyah, Muawiyah melalui gubernurnya Ziyad ibn Abihi mencabut hak penguasaan tanah itu dari golongan Khawarij dan menyingkirkan mereka dari sana. Tindakan ini dinilai oleh Khawarij sebagai tindakan sewenang-wenang seorang penguasa zalim, maka mereka bertekad memeranginya terus hingga datang masanya Umar ibn Abd al-Aziz.<sup>63</sup>

Ibnu Jauzi pernah meriwayatkan, bahwa Umar II pernah mengurung dirinya dalam rumahnya selama tiga malam bersama *wazir*-nya Muzahim untuk mengumpulkan arsip tentang seluruh tanah yang telah dikuasakan kepada *amir-amir* oleh khalifah pendahulunya, termasuk daftar tanah yang dihibahkan kepada mereka, surat-surat perjanjian dari para khalifah tentang tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada mereka. Setelah surat dan daftar tanah itu terkumpul, maka ia memerintahkan penduduk untuk shalat berjama'ah di masjid, setelah shalat ia naik mimbar dengan pakaian yang sangat murah<sup>64</sup> dan di sampingnya berdiri *wazir* sekaligus penasehatnya Muzahim. Umar II berdiri mengumumkan bahwa apa yang diberikan para khalifah terdahulu adalah tidak sah, dan hadiah itu tidak patut diterima oleh siapa pun, ia juga menegaskan tindakan ini telah ia mulai dengan dirinya sendiri dengan mengembalikan harta yang

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 40.

<sup>64</sup> Sebelum menjadi *khalifah*, Umar selalu membeli pakaian seharga seribu dinar, bilamana ia memakainya maka pakaian tersebut dibuatnya kusut. Namun setelah menjadi *khalifah*, ia hanya membeli baju kurung seharga sepuluh dirham dan bilamana memakainya sengaja dilusuhkannya: Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah.*, hal. 101.

dimilikinya ke *bait al-mal*. Muzahim kemudian diperintahkan Umar II untuk membacakan arsip-arsip tersebut satu demi satu, kemudian Umar II merobek-robeknya, dan menegaskan bahwa semua tanah yang termaktub dalam arsip dikembalikan ke *bait al-mal* tanpa peduli khalifah siapa yang memberikan dan siapa yang menerima. Pembacaan keputusan yang Umar II lakukan ini berlangsung hingga waktu zhuhur tiba. Langkah ini mengguncangkan Bani Marwan, Bani Umayyah, pembesar tentara, dan pemimpin Arab lainnya.<sup>65</sup> Ini membuktikan adanya perubahan (*ishlah*) atas budaya di kekhilafahan Umayyah yang dilakukan Umar II secara total, tidak saja untuk meluruskan kezaliman tetapi juga berdampak positif yaitu maksimalnya produksi pertanian di Irak yang tanahnya subur.

Sebagai tambahan tentang perbandingan gaji tentara antara masa Alauddin dan Umar I. Sultan Alauddin menggaji pasukannya dengan gaji tetap sebesar 234 *tanka* per tahun, atau sekitar mendekati 20 *tanka* perbulan ditambah ransum, dan 78 *tanka* untuk setiap penjaga 2 kuda perang, serta untuk setiap kelipatan 2 ekor kuda.<sup>66</sup> Pada masa Umar I, gaji tentara terendah adalah 250 dirham per tahun ditambah ransum berupa 2 ember gandum untuk roti per bulan.

## 5. Pandangan Ekonomi Kapitalisme terhadap Pengendalian Harga

Ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tabiat manusia dalam menggunakan sumber daya untuk memenuhi

---

<sup>65</sup> A. Syalabi, *Sejarah.*, hal. 109-110.

<sup>66</sup> H. M. Elliot, *The History.*, hal. 192.

kebutuhan manusia.<sup>67</sup> Ekonomi terdiri dari 2 suku kata yang berasal dari bahasa Yunani (*Greek Words*) yaitu *Oikos* yang artinya rumah tangga dan *Nemein* yang artinya mengatur (*manage*), akan tetapi selanjutnya oleh para pakar ekonomi mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda. Ahli Ekonomi Klasik (*Classical Economist*) seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill mendefinisikan sebagai ilmu tentang kekayaan (*the science of wealth*), yang mana definisi ini didasarkan bahwa disebut puas jika sampai ketidakpuasan yang terletak dari kesulitan besar menjadi kaya/makmur dan sampai ketidakpuasan itu terletak pada posisi yang tertinggi, meskipun definisi ini akhirnya berhubungan dengan kekayaan juga. Hakikat ilmu ekonomi tersebut merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang pada mulanya adalah sebuah penelusuran terhadap manusia, dan penelusuran tentang manusia ini juga merupakan hal terpenting yang mana definisi yang di ajukan Alfred Marshall tentang ekonomi telah diterima sebagai definisi yang benar dan menjadi dasar dalam mempelajari ilmu ekonomi.

Sebagai kesimpulan sementara, Prof. Dr. Suroso Imam Zadjuli<sup>68</sup> memberikan definisi bahwa ilmu ekonomi (*economics*) adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia baik selaku individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk badan hukum maupun bukan dan dapat pula berbentuk penguasa/pemerintah) dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang

<sup>67</sup> Muhammad Muslehuddin, *Economics and Islam*, (Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1982), hal. 3.

<sup>68</sup> Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya dan Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Minat Studi Ilmu Ekonomi Islam.

mana kebutuhan itu cenderung mengarah menjadi tidak terbatas sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut terbatas.<sup>69</sup>

Pemahaman kata kebutuhan (*need*) dalam pandangan sistem ekonomi kapitalisme dipadankan dengan pemahaman kata keinginan (*want*), di dalam kajian pustaka lain disebut kemauan (*desire*), sebagai contoh: makan makanan bergizi dianggap kebutuhan, makan yang banyak, dan enak, serta dan bervariasi juga dianggap sebagai kebutuhan. Sebagai contoh (*tamtsil*) lain: si A berdagang bakso keliling untuk mencari sesuap nasi dianggap bekerja untuk memenuhi kebutuhan, dan si B yang memiliki perusahaan yang menguasai sumber tambang minyak bumi juga dianggap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan semuanya harus difasilitasi oleh negara.

Kebutuhan dan kelangkaan alat pemenuhan di atas merupakan pondasi awal dibangunnya teori ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme, bahkan Adam Smith yang dijuluki Bapak Ekonomi Dunia menempatkan salah satu dari dua prinsip penting dalam membangun ekonomi pasar bebas yaitu prinsip kebebasan dan prinsip kebutuhan, yang mana manusia menurut kodratnya memiliki sifat mementingkan diri sendiri dan sifat ini dianggap baik karena mampu mendorong manusia untuk memperoleh materi yang sebanyak-banyaknya dan menuntut adanya perbaikan hidup.<sup>70</sup> Sifat manusia yang mementingkan

---

<sup>69</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya:FE Univ.Airlangga, 1999), hal. 8 dan Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), hal. 19.

<sup>70</sup> Paul Heinz Koesters, *Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hal. 8.

diri sendiri atau serakah ini sebenarnya sudah dikenal dalam pemahaman filosof Yunani Kuno salah satunya adalah Plato, dan selanjutnya dilontarkan kembali oleh Bernard de Mandeville pada tahun 1714 lewat bukunya *The Fable of The Bees*, tetapi antara Smith dan Mandeville memiliki kesimpulan yang berbeda tentang penerapan sifat serakah manusia ini, yang mana menurut yang kedua bahwa kehidupan sosial-ekonomi akan rusak bila prinsip kebebasan dan kebutuhan kebutuhan ini diterapkan secara bebas oleh sebab itu ia menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Namun yang pertama berpikiran lain, ia cenderung membebaskan dan menganggap ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan, dan bukanlah kerugian atau kerusakan masyarakat sepanjang terciptanya persaingan bebas.<sup>71</sup> Argumentasi yang diajukan Smith berkaitan dengan hal tersebut adalah bahwa secara alami orang yang ingin mendapatkan laba dalam jangka panjang yang mana laba adalah simbol keuntungan untuk menumpuk kekayaan, maka ia tidak akan pernah menaikkan harga di atas harga pasar (batas kemampuan daya beli), karena memang harga pasar terbentuk dari jumlah barang yang ditawarkan di pasar dan harga yang mampu dibayar oleh pembeli, artinya berhasil atau tidaknya sebuah transaksi jual beli tergantung pada bertemunya *supply* dan *demand* sebagaimana ungkapan Smith: “*The market price of every particular commodity is regulated by the proportion between the quantity which actually brought to market, and the demand of those who are willing to pay the natural price of the*

---

<sup>71</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Cet. 3 (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 30-31.

*commodity*.<sup>72</sup>

Adam Smith juga menganggap bahwa kebutuhan hakekatnya tidak terbatas (*unlimited*), sehingga kebutuhan manusia yang tanpa batas itu harus dibiarkan secara bebas agar memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, inilah yang dimaksudkan oleh Smith ada korelasi positif antara dua prinsip ekonomi pasar bebas akan berjalan yaitu jika ada prinsip kebutuhan dan kebebasan. Inilah logika yang dibangun untuk mendasari sistem ekonomi kapitalisme hakikatnya berangkat dari filsafat atau pandangan hidup yang dipahami oleh filosof Yunani yaitu filsafat Plato tentang manusia.

Selanjutnya muncul pertanyaan sebagaimana yang dikhawatirkan Mandeville ”bukankah kebebasan ini justru akan memicu adanya monopoli ekonomi?”, namun Smith tetap berkomitmen bahwa justru kebebasan ini sebaliknya justru akan menciptakan kesetaraan harga secara otomatis, sebagaimana ungkapannya dalam buku *The Wealth of Nations*:

*If a pin manufacturer tried to charge more than his competitors, they would take away his trade; if workman asked for more than the going wage, he would not be able to find work; if a landlord sought to exact a rent steeper than another with land of the same quality, he would get no tenants*

Adam Smith menjelaskan bahwa jika seorang penjual peniti menetapkan harga lebih tinggi dari pesaing dagangnya, maka bisnisnya akan hancur, karena secara alami orang tidak mau membeli lagi peniti dari dia, dan lari ke pesaingnya. Begitu juga

---

<sup>72</sup> Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature And Causes of The The Wealth of Nations* (New York: Random House, 1937), hal. 56.

buruh yang menetapkan upah lebih tinggi dari upah pasar akan sulit memperoleh pekerjaan, dan tuan tanah yang menetapkan harga sewa yang lebih tinggi untuk kesuburan tanah yang sama, tidak akan menemukan penggarap atau penyewa tanah. Menurut Smith, persaingan ini dengan sendirinya akan diatur oleh tangan-tangan yang tidak kentara (*the invisible hand*) yang terjadi karena mekanisme tawar-menawar yang alami antara pihak pen-*supply* (tenaga dan barang) dengan pihak yang memiliki *demand* terhadapnya, inilah yang menjadi dasar pijakan sikap *laissez faire-laissez passer*. Sikap “biarkan saja terjadi dan biarkan saja berlalu” ini diibaratkan mengikuti filosofi air yang mengalir dari tempat tinggi ke rendah mengikuti hukum gaya berat, yang mana justru ekonomi akan mengalami distorsi ketika ada campur tangan pemerintah (*The market will be broken*).

Selain itu prinsip kebebasan ini juga menciptakan inovasi barang yang dijual atau diproduksi secara berkelanjutan karena seseorang produsen atau penjual harus membuat atau menjual barang yang lebih baik dari pesaingnya, karena pembeli memiliki tabiat membeli barang yang bermutu paling baik, sehingga apabila mengikuti hukum permintaan dan penawaran, maka hanya barang yang memiliki kualitas yang terbaik yang akan terseleksi pasar. Secara tidak langsung Smith mengatakan bahwa inovasi produk adalah buah manis dari kebebasan pasar yang lain.<sup>73</sup>

Mendasarkan pada alasan tersebut di atas membuat Smith menolak adanya campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi dalam bentuk apa pun.

<sup>73</sup> Paul Heinz Koesters, *Tokoh-Tokoh Ekonomi.*, hal. 9.

Kesimpulan “mengapa sistem ekonomi Kapitalisme menghendaki kebebasan dalam ekonomi dari campur tangan pemerintah?” yaitu:

1. akan terjadinya kestabilan harga barang produksi (*out put of production*) secara otomatis yang dilempar ke pasar, karena mengikuti hukum *supply and demand* (Berbunyi: Jika harga barang yang ditawarkan (*supply*) tinggi, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun. Sebaliknya jika harga barang yang ditawarkan rendah, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat)
2. akan lahir inovasi produk yang cepat dengan harga relatif murah.

Berkaitan dengan membungunya harga barang secara umum, teori ekonomi kapitalis menilai bahwa itu terjadi karena terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang, yang mana arus barang mencerminkan sisi *supply* dan arus uang mencerminkan sisi *demand*. Kalau semua berjalan lancar dan ada kecocokan antara *supply* dan *demand*, maka ekonomi nasional dikatakan dalam keadaan seimbang yaitu ketika produksi berjalan lancar dan melayani kebutuhan/permintaan masyarakat, hasil produksi terjual (tidak terlalu banyak atau sedikit) dengan harga yang tidak terlalu mahal atau terlalu murah, jumlah uang beredar tepat sesuai untuk melayani kebutuhan ekonomi, dan ini ditandai dengan harga yang stabil. Keadaan ekonomi juga mengalami ketidakseimbangan tatkala terganggunya arus barang dengan arus uang, gangguan itu dapat muncul dari beberapa sisi: Pertama, sisi produksi (sisi *supply*)

sebagai contoh terjadinya gagal panen, ada hama, banjir, atau bencana alam lain, kemacetan transportasi, perubahan teknik produksi. Kedua, sisi permintaan (sisi *demand*) dapat mengalami kenaikan atau penurunan, seperti: naiknya permintaan gula ketika mendekati hari raya, menurunnya permintaan atas mode pakaian karena adanya mode baru. Ketiga, sisi harga bahan baku yang dapat memicu naiknya inflasi, sebagai contoh naiknya harga bahan kimia untuk obat naik di Jepang akan membuat harga obat di dalam negeri naik, karena biaya produksi barang tersebut naik. Keempat, sisi uang yang mana karena ekspansi jumlah uang beredar oleh pengeluaran pemerintah lebih cepat dari pada uang yang diserap oleh masyarakat.

Berdasarkan empat sisi yang dapat mempengaruhi harga ini, maka ada beberapa teori muncul. Teori Ekonomi Klasik yang dipelopori oleh Smith mengatakan, tingkat harga yang berlaku di dalam masyarakat pada dasarnya ditentukan oleh jumlah uang beredar. Jika jumlah uang beredar bertambah, nilai uang merosot, dan harga-harga naik. Jadi inflasi menurut teori ini disebabkan oleh banyaknya jumlah uang yang dipegang masyarakat, sehingga obatnya adalah membatasi jumlah uang beredar dan kredit.

Teori monetaris yang dipelopori oleh Friedman berpendapat bahwa seluruh kegiatan ekonomi nasional ditentukan dan diatur oleh jumlah uang beredar. Jadi fluktuasi dalam kegiatan ekonomi (ekspansi, resesi, depresi, atau pemulihan), dan dalam tingkat harga (inflasi atau deflasi) ditentukan oleh jumlah uang dan kredit yang beredar, maka sumber masalahnya adalah pemerintah dan bank yang terlalu baik hati terhadap pengusaha.

Teori Keynes mengatakan bahwa seluruh proses kegiatan ekonomi tanpa terlalu mementingkan peranan uang. Yang penting dalam kehidupan ekonomi nasional adalah keseimbangan antara produksi (*supply*) dan pembelanjaan (*demand*), sehingga jumlah uang dengan mudah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat oleh dunia perbankan. Sedangkan teori post-keynesian berusaha menyusun suatu sintesis dengan menghubungkan keseimbangan pasar (barang) dengan keseimbangan moneter (uang).<sup>74</sup>

Teori-teori dalam ekonomi kapitalisme ini menunjukkan bahwa harga akan mengalami keseimbangan dengan sendirinya, sedangkan posisi pemerintah adalah bagaimana mengurangi ketidakseimbangan yang telah menjadi sumber kenaikan harga.

Inilah pemaparan yang membandingkan antara kebijakan Sultan Alauddin Khalji dengan Khalifah Umar ibn Khatthab (Umar I), dan Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz (Umar II) termasuk pandangan ekonomi kapitalisme.

---

<sup>74</sup> Gilarso, *Pengantar.*, hal. 398-400.

## BAB VI

# PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Alasan Sultan Alauddin Khalji memberlakukan kebijakan pengendalian harga adalah untuk menjaga stabilitas negaranya dari permasalahan politik, ekonomi dan sosial. Ia berkeyakinan bahwa untuk menghadapi bangsa Mongol dan melakukan ekspansi wilayah membutuhkan kekuatan militer yang besar dan kuat, yang mana tentara akan memiliki semangat berperang apabila kondisi ekonomi keluarga berkecukupan, hal ini hanya dapat terwujud apabila menerima gaji yang cukup dan harga bahan kebutuhan pokok terjangkau (murah). Ia juga berkeyakinan bahwa loyalitas rakyat bisa didapatkan apabila pemerintah mampu menciptakan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang aman dan damai, oleh sebab itu pemerintah harus dapat membuat harga bahan kebutuhan pokok menjadi murah (terjangkau), mampu menjaga eksistensi negara dari serangan pemberontak atau penjajah, dan mampu menciptakan moral penduduk menjadi lebih baik.
2. Cara yang dilakukan oleh Sultan Alauddin Khalji dalam kebijakan pengendalian harga tersebut adalah: pertama, menetapkan harga barang kebutuhan pokok dan kebutuhan mendesak lainnya dalam harga yang sangat murah. Kedua,

membentuk dua badan pengawas yaitu *Shahana-e-Mandi* yang bertugas mengawasi khusus pasar yang menjual bahan makanan, sedangkan tugas *Diwan-e-Riyasat* bertugas mengawasi pasar yang menjual kebutuhan sandang (pakaian) dan pasar secara umum. Pada setiap badan dipilih seorang praktisi dan bijak untuk memantau pasar, ketika melaksanakan tugasnya dibantu oleh intelejen yang memberikan informasi semua praktek yang dilakukan setiap pedagang. Ketiga, membangun lumbung gandum untuk menampung bahan kebutuhan pokok terutama gandum. Keempat, membentuk dan memilih petugas yang bertugas mengangkut bahan pokok dari daerah ke lumbung pangan, yang mana petugas ini ditempatkan oleh seluruh wilayah kekuasaannya di bawah perintah petugas pengendali pasar yaitu *Diwan-e-Riyasat* dan *Shahana-e-Mandi*. Kelima, melarang tindakan penimbunan dan praktek buruk yang mengganggu keharmonisan pasar, serta memberlakukan hukuman keras bagi pelakunya. Keenam, memberikan perintah kepada pimpinan daerah untuk menjaga produktifitas pertanian dengan kebijakan apapun. Ketujuh, membuat sistem pelaporan harian kepada sultan, yang mana berisi keadaan harga pasar dan transaksi yang dilakukan pelaku pasar.

3. Hasil dari penerapan kebijakan pengendalian harga ini membuat rakyat kesultanan Khalji mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga keadaan dalam negeri menjadi aman, fasilitas perang dan mental tentara dapat ditingkatkan, pembangunan infrastruktur fisik dapat

dijalankan yang mana terlihat dari banyaknya bangunan megah dibangun, peradaban ilmu dan budaya meningkat, serta penaklukkan negeri di sekitar Kesultanan Khalji dapat dilakukan. Bangsa Mongol yang menjadi ancaman dapat dihalangi dengan perlawanan angkatan perang yang besar tersebut, yang mana selama masa pemerintahan Sultan Alauddin serangan bangsa Mongol tidak pernah menguasai Delhi.

4. Sultan Alauddin Khalji adalah keturunan bangsa Khalji dari Afghanistan, akan tetapi terbukti mampu menjadi pemimpin bangsa India (mencakup wilayah Pakistan, India, Bangladesh, dan sekitarnya kala itu) yang memiliki budaya, warna kulit, dan agama yang berbeda dengan tetap menjaga keadilannya. Pemberontakan di dalam oleh bangsa pribumi yang beragama Hindu, dan pejabat dari bangsa Turki yang beragama Islam juga dapat diredam, serta dirangkul dengan kebijakan-kebijakan politik dan ekonominya.
5. Kebijakan pengendalian harga Sultan Alauddin Khalji terbukti juga pernah dilakukan oleh pemimpin negara Islam seperti masa Khalifah Umar Ibn Khatthab dan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, sehingga ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam masih diterapkan pada abad XIII di India. Namun kebijakan ini tidak ditemukan bahkan sangat bertentangan dengan kajian teori dan praktek sistem ekonomi kapitalisme yang cenderung pro-pasar.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penulisan ini, maka penulis memberikan saran beberapa hal di barah ini:

1. Keadaan negara Indonesia saat ini dan keadaan kesultanan Khalji di India dahulu memiliki kesamaan dalam permasalahan yang dihadapi, yaitu administrasi negara yang tidak efektif, dipenuhi oleh para pejabat korup, keadaan ekonomi yang sulit berupa harga bahan kebutuhan pokok, dan kebutuhan lain juga yang mahal sehingga tidak terjangkau rakyat, kas negara defisit dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola negara, serta kondisi moral rakyat dan pejabat rendah, namun perbedaannya kesultanan Khalji juga harus menghadapi serangan pihak luar dari bangsa Mongol dan serangan pihak internal dari pemberontak muslim dan Hindu secara fisik. Walaupun demikian kesultanan Khalji selama kepemimpinan Sultan Alauddin Khalji mampu membenahi negara dalam waktu 20 tahun kepemimpinannya, tetapi tidak bagi negara Indonesia sehingga sebaiknya pemimpin negeri ini berkaca pada sejarah melalui tinta dan kertas para akademisi, salah satunya adalah melihat sejarah kesultanan Khalji di India.
2. Tujuh langkah dari kebijakan pengendalian harga yang dijalankan selama kesultanan Khalji di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Khalji yang merupakan keturunan bangsa Afghanistan, yang memiliki budaya, warna kulit, dan agama yang berbeda dengan penduduk India terbukti berhasil, berdasarkan hal ini seharusnya kebijakan ini lebih

mudah diduplikasi di Indonesia karena kepemimpinan mengharuskan dipegang oleh orang pribumi Indonesia sendiri sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara.

3. Penulisan ini telah menemukan hal positif dari kehidupan ekonomi di tanah Hindustan (India, Pakistan, Bangladesh, dan sekitarnya), yang mana peradaban ekonomi, politik, dan keilmuan mereka pernah maju. Banyak terdapat bangunan fisik yang megah di tanah Hindustan, itu membuktikan bahwa tidak akan mungkin dibangun sebuah peradaban kecuali kondisi ekonomi dan politiknya maju, dan itu masih dapat dilihat sampai saat ini. Oleh karena itu, perlu ada usaha akademisi untuk mengkaji lagi penerapan ekonomi Islam dari bangsa manapun untuk mencari solusi atas problem negeri Indonesia.
4. Pemerintah Indonesia yang saat ini terlihat pro-pengusaha, maka pada masa kepemimpinan yang akan datang seharusnya lebih mampu melakukan intervensi terhadap pasar dengan tujuan menciptakan kebaikan (*mashlahat*), sebagaimana yang dilakukan pemerintah kesultanan Khalji yakni intervensi negara apabila ditemukan terjadinya inflasi itu diakibatkan oleh perbuatan buruk pedagang atau industri yang dengan sengaja melakukan penimbunan atau dengan semena-mena menaikkan harga barang kebutuhan pokok hanya untuk mengejar keuntungan pribadi.

# DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Husain. 2002. *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*; Terjemahan Zamroni. Cetakan Kedua. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ackley, Gardner. 1961. *Teori Ekonomi Makro*; Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: UI Press.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman. 1998. *Mabhuts Fiqhiyah Fi Qadhaya Iqtishodiyatin Mu'ashiratin*. Jilid I. Oman: Dar al-Nafais.
- Al-Baghdady, Abdurrahman. 1987. *Serial Hukum Islam*; Terjemahan Abu Laila. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2002. *Sistem Sanksi dalam Islam*; Terjemahan Syamsuddin Ramadhan. Cetakan Pertama. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2001. *Politik Ekonomi Islam*; Terjemahan Ibnu Sholah. Cetakan Pertama. Bangil Jatim: Al-Izzah.
- Ali, K. 1980. *A Study of India, Pakistan, and Bangladesh*. Dhaka: Ali Publication.
- Al-Wakil, Sayyid. 1998. *Wajah Dunia Islam: dari Dinasti Umayyah hingga Imperialisme Modern*; Terjemahan

- Fadhli Bahri. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- An-Nabhaniy, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*; Terjemahan Muh. Maghfur. Cetakan Kedua. Surabaya: Risalah Gusti.
- Arfida. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan Kedua Belas. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Suyuthi, Imam. 2007. *Tarikh Khulafa'*; Terjemahan Samson Rahman. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ash-Shadr, M. Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishoduna*; Terjemahan Yudi. Cetakan Pertama. Jakarta: Zahra Publishing.
- Baum, Warren C. 1988. *Investasi Dalam Pembangunan: Pelajaran dari Pengalaman Bank Dunia*; Terjemahan Bassilius Bengo Teku. Jakarta: UI Press.
- Bello, Walden. 2002. *Deglobalisasi*. Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Black, Anthony. 2006. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi hingga Masa Kini*; Terjemahan Abdullah Ali. Cetakan Pertama. Jakarta: Serambi.
- Caroe, Olaf. 1958. *The Pathans*. London: tnp.
- Cheung, Steven N. S. "A Theory of Price Control". Dalam *Journal of law and Economics*, No. 1, Vol. 17, April 1974.
- Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Cetakan Ketiga. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Dow, Alexander. 1803. *The History of Hindostan*. Jilid I. London: A. Wilson.
- Elliot, H. M. 1869. *The History of India as Told by Its Own Historians*. Jilid III. London: Turbner & Co.
- Fakih, Mansour. 2003. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Furchan, Arief. 2005. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gilarso, T. 1992. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian makro*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Haekal, Muhammad Husain. 2002. *Umar bin Khattab; Terjemahan Ali Audah*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Haig, W. 1958. *Cambridge History of India*. Jilid III. Delhi: Chand&Co.
- Hamudah, Mahmud dan Mushtafa Hasanain. 1999. *Adhwau 'ala al-Mu'amalati al-Maliyati fi al-Islami*. Cetakan Kedua. Oman: Muasasah al-Warraq.
- Hasan, Hasan Ibrahim. 2006. *Sejarah dan kebudayaan Islam; Terjemahan H. A. Bahaudin*. Cetakan Kedua. Jilid II. Jakarta: Kalam Mulia.
- Hitti, Phillip K. 2008. *History of The Arabs; From the Earliest Times to the Present; Terjemahan Cecep Lukman*. Cetakan Pertama. Jakarta: Serambi.
- <http://economy.okezone.com>. Harga Pangan Minyak Melambung, diakses pada tanggal 1 Maret 2011

- Hunter, William Wilson. 1893. *A Brief History of The Indian Peoples*. Oxford: The Clarendon Press.
- Irawan. 1988. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Jhingan, M. L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*; Terjemahan D. Guritno. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Jum'ah, Muhammad Ali. 2009. *Mawsu'at al-Iqthishodi al-Islamiy: Fi al-Mashorifi wa an-Nuqudi wa al-Aswaqi al-Maliyyat*. Jilid I. Kairo: Dar as-Salam.
- Karim, M. Abdul. 2003. *Sejarah Islam di India*. Yogyakarta: Bunga Grafies Production.
- Karim, M. Abdul. 2009. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Kasmir dan Jakfar. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Keene, H. G. 1906. *History of India*. Jilid I. Edinburgh: John Grant.
- Khalidun, Ibnu. 2011. *Mukaddimah*; Terjemahan Masturi Ilham dkk. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Al kautsar.
- Khudori. 2005. *Gula Rasa Neoliberalisme: Pergumulan Empat Abad Industri Gula*. Jakarta: LP3ES.
- Koesters, Paul Heinz. 1988. *Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia*; Terjemahan Titi Soentoro. Cetakan Kedua. Jakarta: Percetakan Gramedia.
- Majumdar, R. C. 1948. *An Advanced History of India*. London: Macmillan and Co.

- Mangkoesoebroto, Guritno. 1998. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YKPN Press.
- Marshman, John Clark. 1869. *The History of India: From The Earliest Period to The Close of Lord Dalhousie's Administration*. Jilid I. London: Longmans Green Reader & Tyer.
- Muhammad, Qutbh Ibrahim. 2002. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab*; Terjemahan Ahmad Syarifuddin. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Murad, Anatol. 1969. *Economics Principles and Problems*. Iowa: Littlefield Adams and Co.
- Musannif, IL. 1882. *The Romantic Land of Hind*. London: W. H. Allen & Co.
- Muslehuddin, Muhammad. 1982. *Economics and Islam*. Delhi: Markazi Maktaba Islami.
- Niazi, Ghulam Sharwar Khan. 1992. *The Life and Works of Sultan Alauddin Khalji*. New Delhi: Atlantic Publishers & Distributor.
- Perwataatmadja, Karnaen. 2008. *Jejak rekam Ekonomi Islami*. Jakarta: Cicero Publishing.
- PowellPric, J. C. 1955. *A History of India*. Toronto: Thomas Nelson & Sons.
- Salam, Zahid Ivan. 2003. *Jihad dan Kebijakan Luar Negeri Daulah Khilafah*; Terjemahan Abu Faiz. Cetakan Pertama. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Smith, Adam. 1937. *An Inquiry Into The Nature And Causes of The The Wealth of Nations*. New York: Random House.

- Stonier, Alfred W. 1984. *Teori Ekonomi*; Terjemahan Aminuddin Asmawi. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukirno, Sadono. 1981. *Ekonomi Pembangunan*. Medan: Borta Gorat.
- Syalabi, A. 1992. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*; Terjemahan Mukhtar Yahya. Cetakan Kedua. Jilid II. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Taimiyah, Ibnu. 2004. *Tugas Negara Menurut Islam*; Terjemahan Arif Maftuhin Dzofir. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thohir, Ajid. 2004. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Koordinasi Ekonomi Mikro Pengantar. 2000. *Ekonomi Mikro Pengantar*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Todaro, Michael P. 1987. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*; Terjemahan Burhanuddin Abdullah. Jilid Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Tohir, Kaslan A. 1961. *Ekonomi Selayang Pandang*. Cetakan Keempat. Jilid I. Bandung: Penerbit Sumur.
- Tohir, Kaslan A. 1961. *Ekonomi Selayang Pandang*. Cetakan Kedua. Jilid II. Bandung: Penerbit Sumur.
- www.google.com, *The Theory of Price Controls*, diakses pada tanggal 11 Juli 2010
- www.mediaindonesia.com. Impor Beras Tidak Serta Stabilkan Harga, diakses pada tanggal 1 Maret 2011
- www.republika.co.id, diakses pada tanggal 27 Juli 2010
- Zadjuli, Suroso Imam. 1999. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*.

Surabaya: FE Universitas Airlangga.

Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*; Terjemahan Ahmad S. Cetakan Pertama. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam*; Terjemahan M. Maghfur Wahid. Cetakan Ketiga. Bangil Jatim: Penerbit al-Izzah.



# BIODATA PENULIS

## **JOKO SUSILO, S.PdI., M.SI**

Lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 09 Oktober 1974 dari pasangan Masudi dan Lasmi. Menempuh pendidikan dasar di kampung halamannya di SDN Jatiroto 1 Kayen, Pati. Kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Kayen, Pati dan SMAN 1 Kayen, Pati. Jenjang pendidikan sarjana ditempuh di STAIN Samarinda, Kalimantan Timur, dan kemudian melanjutkan jenjang magister di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sekarang sebagai dosen tetap di Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur memegang Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam, sekaligus selaku Koordinator Dosen Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam. Aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi lain di Samarinda, seperti AKPER YARSI Samarinda, STIMIK SPB Erlangga Samarinda, dan lain-lain. Selain itu, juga sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Samarinda, aktif di Lembaga Bimbingan dan Penyuluhan Islam (LBIPI) Samarinda, aktif membina majelis-majelis ta'lim dan kegiatan dakwah ke berbagai daerah di Kalimantan Timur.

## **MOHAMMAD RIDWAN, S.HI., M.SI**

Dosen tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Mulawarman; Lahir Handi Mico, Santan Tengah, Kutai Kartanegara 28 Januari 1980, Alumni Program Pascasarjana

Filsafat Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Organisasi dan lembaga profesional yang diikuti; Ketua OSIS-Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Ketua OSIS PMH Al-Junaidiyyah, Pengurus HMJ Syariah, Menteri Sosial Politik pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Kordinator Focus ISLAMICA, Kordinator Bulletin Lentera, Kegiatan Ektra, Pengurus Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU), Samarinda, Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Samarinda. Koordinator wilayah JIE-P3M Kalimantan Timur. Surveyor *Centre Strategic for International Studies* (CSIS), Kabag Administrasi Yayasan Melati Kaltim. Sekretaris Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT) Cabang Jakarta, 2007-2008, Direktur LEKDIS Cabang Jawa Timur, Senior Staff LAPIS (*Learning Assistance Program for Islamic Schools*) – AUSAID, Surabaya, Jawa Timur 2008-2009. Tim Pendiri dan Pendamping SMA Unggulan Kutai Timur, 2007-2010, Sekretaris UPT. MPK Universitas Mulawarman, 2014, Ketua MPK Universitas Mulawarman, 2015-sekarang. Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Pengarus Utamaan Gender, Kutai Kartanegara - Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman 2015, Ketua Tim Seleksi Provinsi Pendamping Profesional 2016 Pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2016